



LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
TAHUN 2024



MAHKAMAH PELAYARAN

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Pelayaran Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Pelayaran Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Mahkamah Pelayaran atas penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LAKIP Mahkamah Pelayaran ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi dan visi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LAKIP Mahkamah Pelayaran ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Dalam Penyusunan LAKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya.

Semoga LAKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Pelayaran dalam rangka memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2025  
**Ketua Mahkamah Pelayaran**



**Baitul Ihwan S.H., DESS., CGCAE**  
**NIP. 19650317 199103 1 001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
EXECUTIVE SUMMARY .....	iii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR DIAGRAM DAN BAGAN .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR GRAFIK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	3
C. Sumber Daya Manusia (SDM).....	8
D. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.....	21
E. Sistematika Penyajian .....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	24
A. Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran .....	24
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 .....	29
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
A. Capaian Kinerja .....	38
I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	41
II. Perbandingan Target Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya .....	45
III. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (RENSTRA)...	48
IV. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi .....	50
V. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	75
A. Sumber Daya Manusia .....	75
B. Sumber Daya Keuangan dan Pengelolaan Anggaran .....	77
BAB IV PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran/Rekomendasi .....	93

## EXECUTIVE SUMMARY

Penyusunan LAKIP Mahkamah Pelayaran Mahkamah Pelayaran tahun 2024 disusun melalui pengukuran dan data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Mahkamah Pelayaran sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan unit kerja yang wajib menjalankan Amanat yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, dimana unit kerja Mahkamah Pelayaran bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mahkamah Pelayaran dalam menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- 2) Pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
- 3) Penyusunan rekomendasi pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- 4) Pemberian dukungan administratif dan teknis Mahkamah Pelayaran;
- 5) Penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Mahkamah Pelayaran.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dimaksud melalui 5 (lima) sasaran kinerja yang meliputi :

- 1) Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi.
- 2) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.
- 3) Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum di Mahkamah Pelayaran.
- 4) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- 5) Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan perkantoran

Berdasarkan tahapan pengukuran dihasilkan Nilai capaian kinerja sasaran program Mahkamah Pelayaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tahun 2024 sebesar 75%, realisasi mencapai 100% dan persentase capaian kinerja 133,33%, sedangkan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program tersebut adalah sebesar 100% dari alokasi anggaran DIPA 2024.

**Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Mahkamah Pelayaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan Realisasi Kinerja		
				Target Renstr a	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IKK 1.1 Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75	100	133,33
		IKK 1.2 Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	100	100
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	IKK.2.1 Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Indeks	3,04	3,382	111,25
		IKK 2.2 Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100

		IKK 2.3	Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100	100	100
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	IKK 3.1	Penyusunan Regulasi Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1	1	100
4.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	IKK 4.1	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH, RKA-K/L, Data Statistik Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100
		IKK 4.2	Pengelolaan Keuangan Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100
		IKK 4.3	Barang Milik Negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100	100	100
		IKK 4.4	Data Statistik Kecelakaan Kapal	%	100	100	100
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 5.1	Kegiatan Sosialisasi/bimbingan teknis/seminar/workshop/ Focus Group Discussion (FGD)	%	88	210	238,63
		IKK 5.2	Pengelolaan Kearsipan dan Surat Masuk serta Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	%	85	92,66	109,01
		IKK 5.3	Pengembangan	%	100	83,33	83,33

		Kompetensi SDM dan Peningkatan Manajemen SDM Pegawai Mahkamah Pelayaran				
	IKK 5.4	Pembinaan Pegawai	%	100	100	100
	IKK 5.5	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100

Adapun Capaian dari Sasaran Strategis Kantor Mahkamah Pelayaran antara lain :

- a. **Sasaran Strategis Pertama** adalah “Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi”.



- b. Sasaran Strategis ke dua adalah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”.



- c. Sasaran Strategis ke tiga adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum di Mahkamah Pelayaran”.



d. Sasaran Strategis ke empat adalah “Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan penganggaran”.



e. Sasaran Strategis ke lima adalah “Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan perkantoran”.



**Tabel Jumlah Pegawai Mahkamah Pelayaran Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Aparatur Sipil Negara	32
2.	Panel Ahli	11
3	PPPK	2
4.	Tenaga Kontrak :	
	a.Pengadministrasi Umum	4
	b.Satpam	7
	c.Pramubakti	1
	d.Pengemudi	2
	e.Petugas kebersihan	6
	Jumlah	65

Sumber : Data Unit Kepegawaian tanggal 31 Desember 2024

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh personil sumber daya manusia yang dimiliki oleh Mahkamah Pelayaran sebanyak 65 Pegawai terdiri dari 32 orang PNS dan 31 PPNPN, 2 orang PPPK, serta kesediaan anggaran sebesar Rp. 22.172.039.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.792.069.000, Belanja Barang sebesar Rp. 12.518.970.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 861.000.000. Realisasi penyerapan anggaran sampai 2024 adalah sebesar Rp. 21.504.437.084 atau 97%, sisa dana tidak terserap sebesar Rp. 667.601.916 merupakan sisa kegiatan dari :

**a. Belanja Pegawai**

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2024 Mahkamah Pelayaran sebesar Rp.148.308.942,-,

**b. Belanja Barang**

Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2024 Mahkamah Pelayaran sebesar Rp 519.292.974,-

**c. Belanja Modal**

Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2024 Mahkamah Pelayaran sebesar Rp.0,-

Adapun prestasi yang di capai Mahkamah Pelayaran Tahun 2024 dalam rangka Penilaian Kearsipan Internal di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan adalah peringkat 3 dari 63 Unit Kerja pengolah arsip dengan Kategori AA “Sangat Memuaskan” yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2024.



Secara rinci dan detail penjelasan terhadap seluruh keberhasilan yang ada dalam Sasaran Strategis disetiap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan terdapat dalam BAB III pada LAKIP Mahkamah Pelayaran. Dengan demikian sesuai kriteria keberhasilan dapat dikatakan unit kerja Mahkamah Pelayaran telah berhasil dalam mencapai kinerjanya, karena hampir seluruh sasaran dapat dilaksanakan melebihi dari target awal yang telah ditentukan.

## DAFTAR TABEL

Nomor	Keterangan	Halaman
1.1	SDM kantor Mahkamah Pelayaran dan Jenis Kelamin	BAB I – 8
1.2	SDM 2 Subbagian dan 2 Sub Koordinator dan Jenis Kelamin	BAB I – 9
1.3	SDM PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin	BAB I – 9
1.4	SDM PNS Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin	BAB I – 11
1.5	SDM PNS Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 13 BAB I – 13
1.6	SDM PNS Menurut Keikutsertaan Dalam Program Tugas Belajar S.2/S.3 di dalam/luar negeri dan Jenis Kelamin	BAB I – 14
1.7	SDM PNS Menurut Pelatihan Teknis dan Jenis Kelamin	BAB I – 15
1.8	SDM PPNPN Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	BAB I – 16
1.9	SDM PPNPN Menurut Keikutsertaan S.2/S.3 di dalam/luar negeri dan Jenis Kelamin	BAB I – 18
1.10	SDM PPNPN Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 19
1.11	SDM PPNPN Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 20
2	Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Pelayaran	BAB II – 25
2.1	Tabel RKT 2024	BAB II – 30
2.2	Perjanjian Kinerja 2024	BAB II – 33
2.3	Target IKU Tahun 2020 - 2024	BAB II – 36
2.4	Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2024	BAB II – 37
3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	BAB III – 41
3.1	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	BAB III – 45
3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah (Renstra)	BAB III – 48
3.3	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024	BAB III – 77
3.4	Matriks Perhitungan Capaian Kinerja dalam Rangka	BAB III – 79

	Perhitungan Efisiensi Matriks Revisi Anggaran 2024	
3.5	Matriks Revisi Anggaran 2024	BAB III – 81
3.6	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2020 – 2024	BAB III – 82
3.7	Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran	
3.8	Dana Belanja Pegawai Yang Tidak Dapat Terealisasikan/Terserap	BAB III – 83
3.9	Dana Belanja Barang Yang Tidak Dapat Terealisasikan/Terserap	BAB III – 84
3.10	Dana Belanja Modal Yang Tidak Dapat Terealisasikan/Terserap	BAB III – 85
3.11	Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan	BAB III – 85

#### DAFTAR DIAGRAM DAN BAGAN

Nomor	Keterangan	Halaman
1	Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran	BAB I – 7

## DAFTAR GAMBAR / DIAGRAM

Nomor	Keterangan	Halaman
3.1	Capaian IK Dalam Sasaran Pertama (Diagram 1.1)	BAB III – 50
3.1.1	Indikator Kinerja Utama (IKU 1)	BAB III – 51
3.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan Satu Dua (IKK 1.2)	BAB III – 52
3.2	Capaian IK Dalam Sasaran Kedua (Diagram 2.2)	BAB III – 53
3.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan Dua Satu (IKK 2.1)	BAB III – 55
3.2.2	Indikator Kinerja Kegiatan Dua Dua (IKK 2.2)	BAB III – 56
3.2.3	Indikator Kinerja Kegiatan Dua Tiga (IKK 2.3)	BAB III – 56
3.3	Capaian IK dalam Sasaran Ketiga (Diagram 3.3)	BAB III – 58
3.3.1	Indikator Kinerja Kegiatan Tiga Satu (IKK 3.1)	BAB III – 59
3.4	Capaian IK dalam Sasaran Keempat (Diagram 3.4)	BAB III – 60
3.4.1	Indikator Kinerja Kegiatan Empat Satu (IKK 4.1)	BAB III – 62
3.4.2	Indikator Kinerja Kegiatan Empat Dua (IKK 4.2)	BAB III – 63
3.4.3	Indikator Kinerja Kegiatan Empat Tiga (IKK 4.3)	BAB III – 64
3.4.4	Indikator Kinerja Kegiatan Empat Empat (IKK 4.4)	BAB III – 65
3.5	Capaian IK dalam Sasaran Kelima (Diagram 3.5)	BAB III – 66
3.5.1	Indikator Kinerja Kegiatan Lima Satu (IKK 5.1)	BAB III – 67
3.5.2	Indikator Kinerja Kegiatan Lima Dua (IKK 5.2)	BAB III – 68
3.5.3	Indikator Kinerja Kegiatan Lima Tiga (IKK 5.3)	BAB III – 70
3.5.4	Indikator Kinerja Kegiatan Lima Empat (IKK 5.4)	BAB III – 72
3.5.5	Indikator Kinerja Kegiatan lima lima (IKK 5.5)	BAB III – 73
3.6	Grafik Perkembangan Pagu Tahun 2020 - 2024	BAB III – 82
3.7	Daya Serap Anggaran Keuangan	BAB III – 87
4	Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024	BAB IV – 93

## DAFTAR GRAFIK

Nomor	Keterangan	Halaman
1.1	SDM Kantor Mahkamah Pelayaran dan Jenis Kelamin	BAB I – 8
1.2	SDM PNS Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	BAB I – 9
1.3	SDM PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin	BAB I – 10
1.4	SDM PNS Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin	BAB I – 12
1.5	SDM PNS Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 13
1.6	SDM PNS Menurut keikutsertaan dalam program S.2/S.3 di dalam/luar negeri dan Jenis Kelamin	BAB I – 14
1.7	Jumlah SDM Mahpel Menurut Pelatihan Teknis dan Jenis Kelamin	BAB I – 15
1.8	SDM PPNP Menurur Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	BAB I – 16
1.9	SDM PPNP Menurut S.2/S.3 di dalam/luar negeri dan Jenis Kelamin	BAB I – 18
1.10	SDM PPNP Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 19
1.11	SDM PPNP Menurut Satuan Kerja dan Jenis Kelamin	BAB I – 20
1.12	Diagram 2 Target IKU tahun 2020-2024	BAB II – 36
2		

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2024;

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;

Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;

Lampiran 4 Rencana Aksi Tahun 2024;



## A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran maka setiap instansi pemerintah diharuskan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai salah satu alat pemacu dalam peningkatan dan perbaikan kinerja bagi instansi pemerintah. Sebagai upaya untuk memastikan peningkatan pelayanan publik, pelaksanaan *good governance* dalam organisasi dan untuk memudahkan penilaian terhadap suatu organisasi sebagaimana tuntutan masyarakat pada era keterbukaan seperti yang terjadi saat ini.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Mahkamah Pelayaran merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang wajib menjalankan amanat yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan sebagai bentuk manifestasi dan evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Fungsi utama LAKIP adalah sebagai alat kontrol dan evaluasi kinerja yang sistematis dan terstruktur.

Dalam kerangka regulasi di Kementerian Perhubungan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Pelayaran diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran. Dimana Mahkamah Pelayaran memiliki Fungsi dan peran yang sangat strategis sebagai garda terakhir dalam penanganan perkara kecelakaan kapal di perairan Indonesia.

Lebih lanjut terkait Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk mengetahui keberhasilan target kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung sasaran program Mahkamah Pelayaran perlu dilakukan pencapaian kinerja pada capaian indikator kinerja, capaian kinerja (*Performance Result*) tahun 2024 yang akan dibandingkan dengan rencana kerja (*Performance Plan*) yang tercantum dalam perjanjian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Mahkamah Pelayaran. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika pelaporan LAKIP ini berisikan pendahuluan, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan kegiatan Mahkamah Pelayaran Tahun 2024. LAKIP Mahkamah Pelayaran Tahun 2024 dapat tersusun, sebagai bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Mahkamah Pelayaran atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2024. Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2024 juga merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Mahkamah Pelayaran pada tahun 2024 sekaligus juga merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal serta sebagai pedoman dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pada tahun mendatang.

Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun 2024, dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategis ini disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Mahkamah Pelayaran, yang pemenuhannya akan terakumulasi pada pencapaian tujuan strategis Mahkamah Pelayaran di akhir tahun kelima. Apabila tujuan strategis ini telah terpenuhi maka dapat dipersepsikan bahwa visi dan misi Mahkamah Pelayaran terpenuhi.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, Mahkamah Pelayaran adalah Unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan, Ketua dibantu oleh Sekretariat Mahkamah Pelayaran. Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.

Mahkamah Pelayaran bukan merupakan lembaga peradilan tetapi merupakan suatu lembaga kode etik profesi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Mahkamah Pelayaran mengemban peranan yang sangat penting dalam hal keselamatan pelayaran serta dapat mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan keamanan pelayaran sesuai dengan Visi dan Misi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, Mahkamah Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan atau/perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
2. Pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
3. Penyusunan rekomendasi pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
4. Pemberian dukungan administratif dan teknis Mahkamah Pelayaran; dan
5. Penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Mahkamah Pelayaran.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Mahkamah Pelayaran memiliki susunan organisasi yang terdiri atas :

1. Ketua;
2. Anggota Panel Ahli;
3. Sekretariat, dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Ketua dan Anggota Panel Ahli :

1) Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran.

2) Anggota Panel Ahli

Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau/tidak adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal serta melaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, serta menyusun rekomendasi pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau

kelalaian terhadap penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nakhoda dan/atau perwira Kapal atas terjadinya kecelakaan kapal.

Anggota Panel Ahli, Jumlah dan Tanggung Jawab :

- a. Anggota Panel Ahli terdiri atas Ahli Nautika Tingkat I, Ahli Teknik Tingkat I, Sarjana Hukum dan Sarjana Teknik Perkapalan;
- b. Jumlah Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20 (dua puluh) orang, dan saat ini Panel Ahli berjumlah 14 (empat belas) orang;
- c. Anggota Panel Ahli bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Pelayaran.

### 3) Sekretariat

#### a. Tugas

Sekretariat Mahkamah Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan teknis Mahkamah Pelayaran

#### b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi;
- b) Pelaksanaan urusan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas;
- c) Pelaksanaan urusan tata usaha, arsip, kepegawaian, organisasi, pengelolaan reformasi birokrasi, rumah tangga, hubungan masyarakat, kerja sama serta pengelolaan barang milik negara dan urusan perlengkapan; dan
- d) Pemeriksaan kelengkapan dokumen berita acara pemeriksaan pendahuluan dan dokumen pendukung lainnya, pelaksana verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan substantif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan serta penyiapan dan koordinasi kebutuhan para Anggota Panel Ahli.

### 4) Sekretaris Panel Ahli

Sekretaris Panel Ahli adalah Aparatur Sipil Negara, yang diangkat oleh Ketua Mahkamah Pelayaran sebagai Sekretaris Panel Ahli. Mahkamah Pelayaran mempunyai 3 (tiga) orang yang menjabat Sekretaris Panel Ahli.

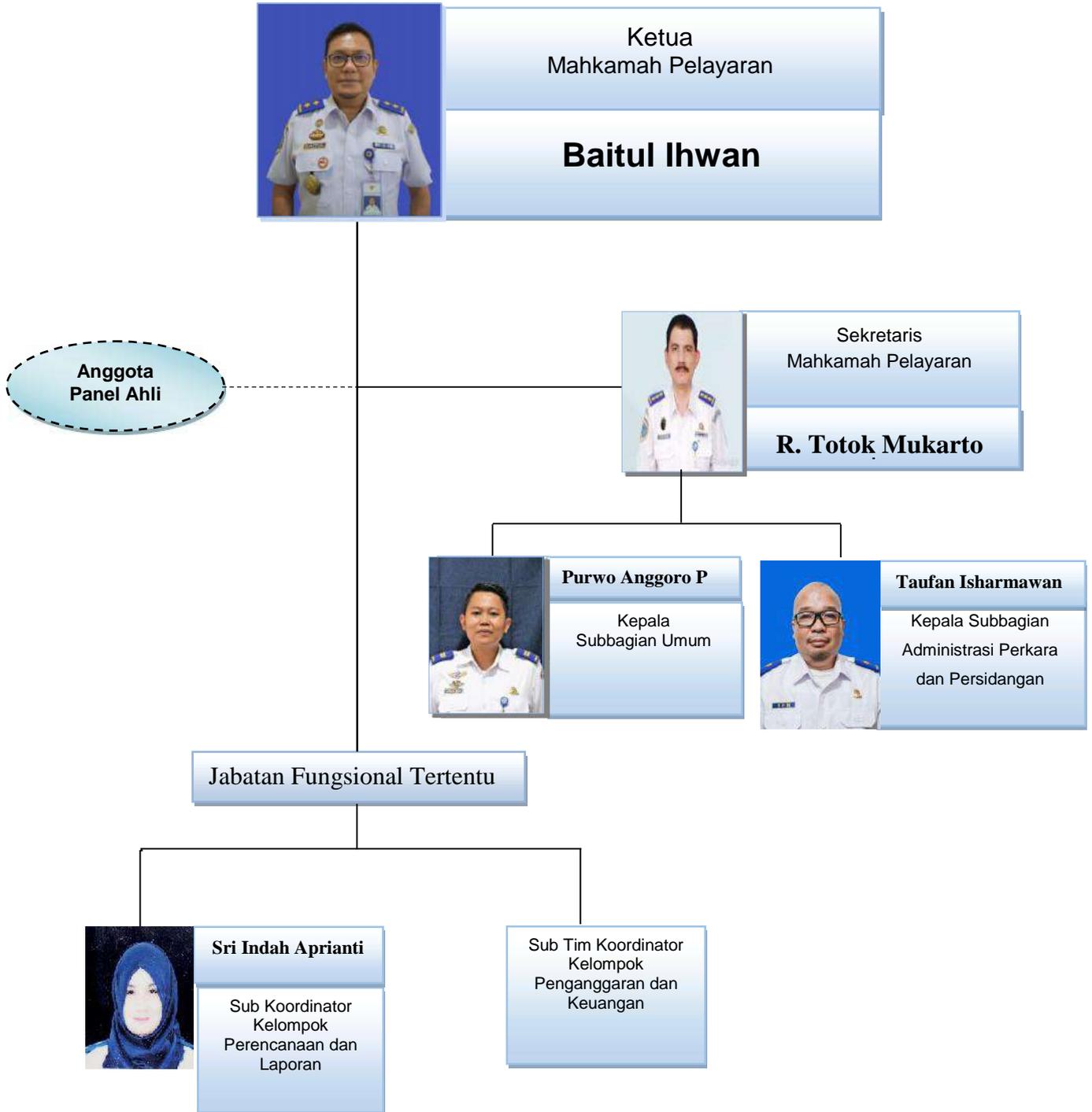
#### 5) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Di Lingkungan Mahkamah Pelayaran dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Mahkamah Pelayaran saat ini mempunyai 3 (tiga) orang yang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu.
- c) Dalam Pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.
- d) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Menteri.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- h) Tugas dan jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional di atur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Bagan organisasi Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.

Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran sesuai pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran adalah sebagai berikut :

**Bagan 1. Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran**  
Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2021



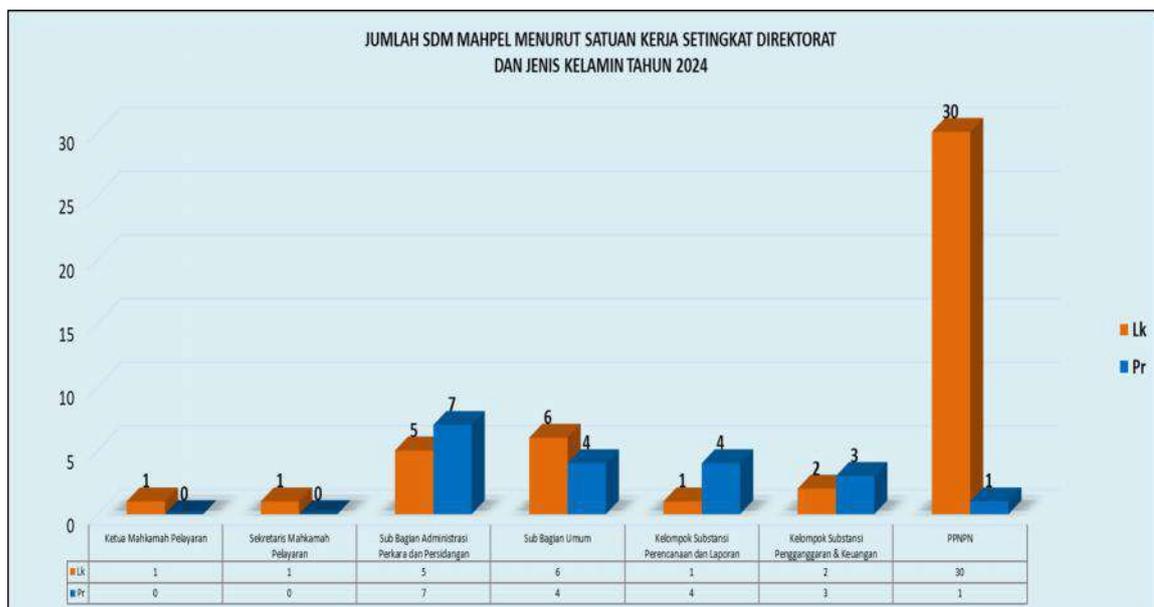
### C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Mahkamah Pelayaran hingga saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 65 (enam puluh lima) orang, terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 4 (empat) orang, Fungsional tertentu ada 2 (dua) orang, Pegawai Fungsional Umum sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, 2 (dua) orang PPPK, 31 (tiga puluh satu) orang Non PNS terdiri dari 11 orang Anggota Panel Ahli dan 20 orang PPNPN. SDM Mahkamah Pelayaran dapat di lihat dari Tabel dan Grafik Data Terpilah (format data dari Pusdatin) :

Tabel 1.1 SDM Kantor Mahkamah Pelayaran Menurut Jenis Kelamin

No	Pusat/Biro/Direktorat	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Mahkamah Pelayaran									
1	Ketua Mahkamah Pelayaran	1	0	1	100.00	0.00	100.00	2.17	0.00	1.54
2	Sekretaris Mahkamah Pelayaran	1	0	1	100.00	0.00	100.00	2.17	0.00	1.54
3	Sub Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan	5	7	12	41.67	58.33	100.00	10.87	36.84	18.46
4	Sub Bagian Umum	6	4	10	60.00	40.00	100.00	13.04	21.05	15.38
5	Kelompok Substansi Perencanaan dan Laporan	1	4	5	20.00	80.00	100.00	2.17	21.05	7.69
6	Kelompok Substansi Penganggaran & Keuangan	2	3	5	40.00	60.00	100.00	4.35	15.79	7.69
7	PPNPN	30	1	31	96.77	3.23	100.00	65.22	5.26	47.69
	<b>JUMLAH</b>	<b>46</b>	<b>19</b>	<b>65</b>	<b>70.77</b>	<b>29.23</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

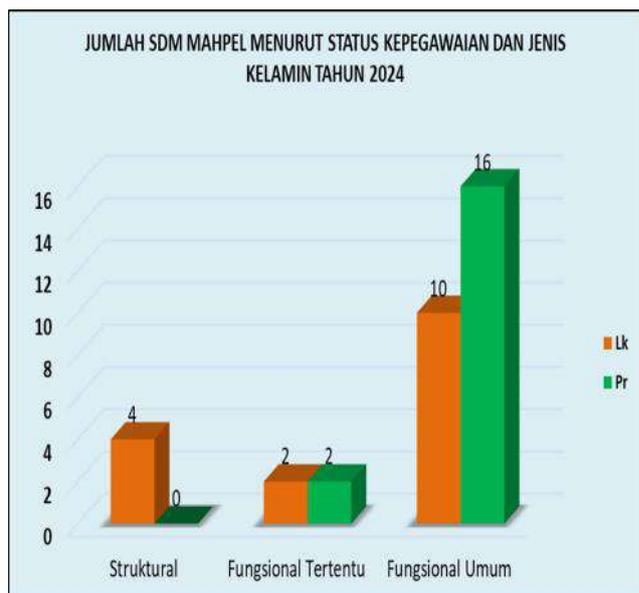
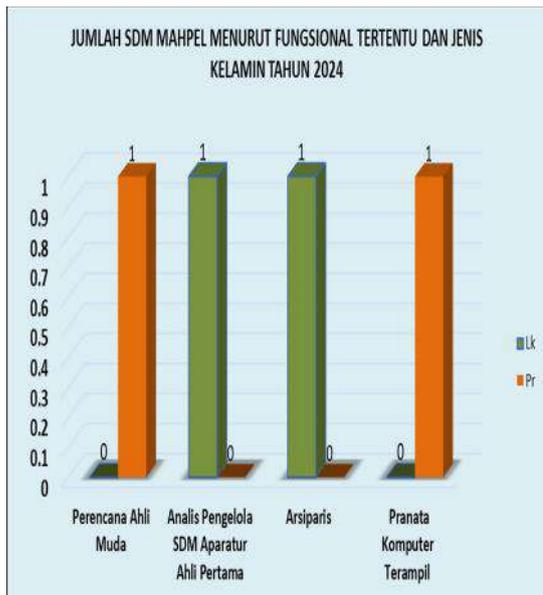
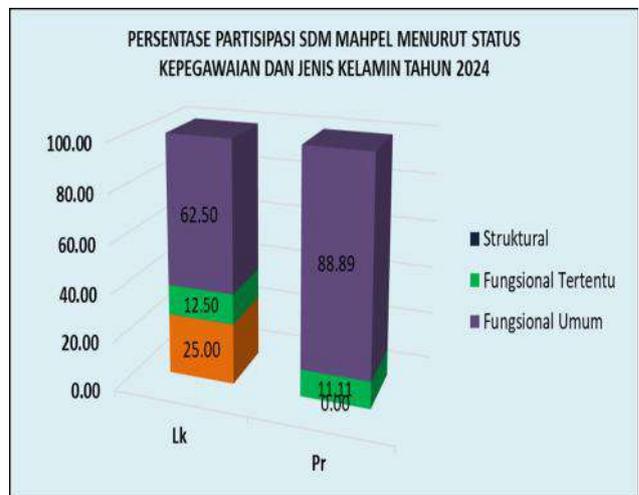
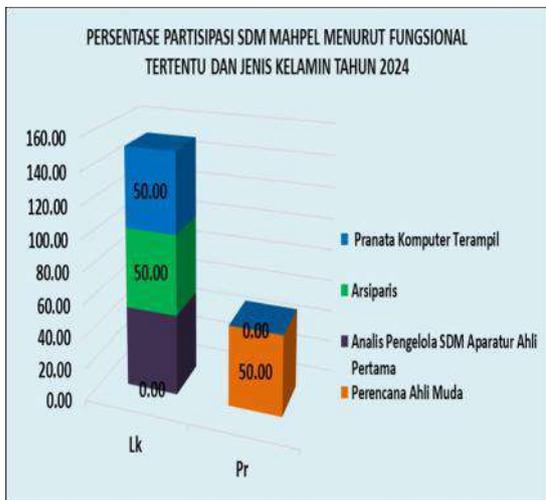
Grafik 1.1. SDM Kantor Mahkamah Pelayaran dan Jenis Kelamin

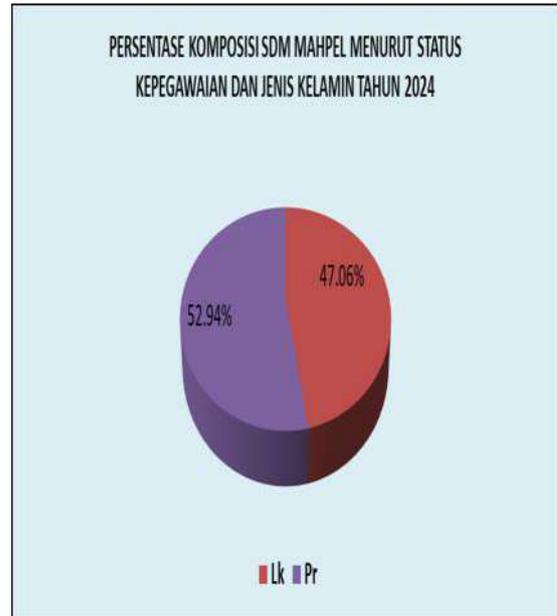
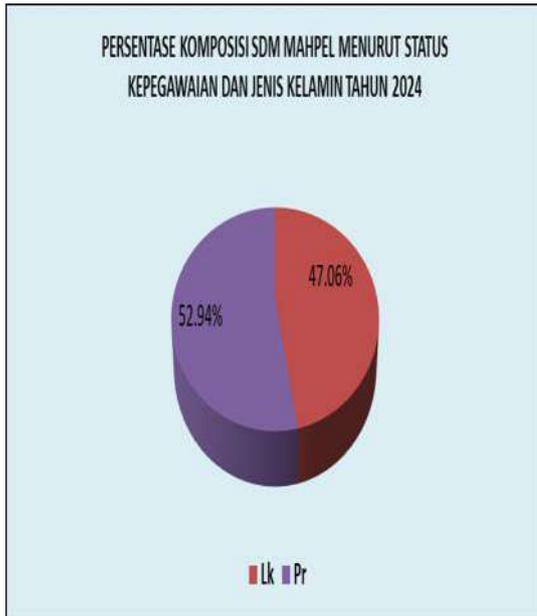


Tabel 1.2. SDM PNS Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
I	Struktural									
1.1	Eselon II	1	0	1	100.00	0.00	100.00	25.00	-	25.00
1.2	Eselon III	1	0	1	100.00	0.00	100.00	25.00	-	25.00
1.3	Eselon IV	2	0	2	100.00	0.00	100.00	50.00	-	50.00
	Sub Total	4	0	4	100.00	0.00	100.00	25.00	0.00	11.76
II	Fungsional Tertentu									
2.1	Perencana Ahli Muda	0	1	1	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	25.00
2.2	Analisis Pengelola SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	25.00
2.3	Arsiparis	1	0	1	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	25.00
2.4	Pranata Komputer Terampil	0	1	1	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	25.00
	Sub Total	2	2	4	50.00	50.00	100.00	12.50	11.11	11.76
III	Fungsional Umum	10	16	26	38.46	61.54	100.00	62.50	88.89	76.47
	Sub Total	10	16	26	38.46	61.54	100.00	62.50	88.89	76.47
	<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>47.06</b>	<b>52.94</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Grafik 1.2. SDM PNS Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

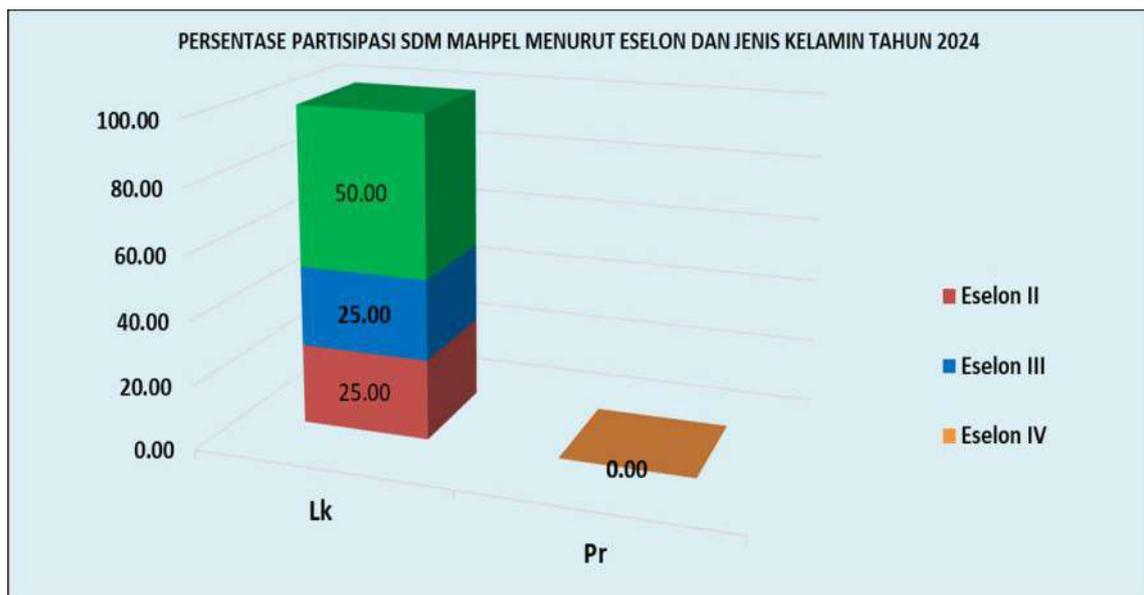


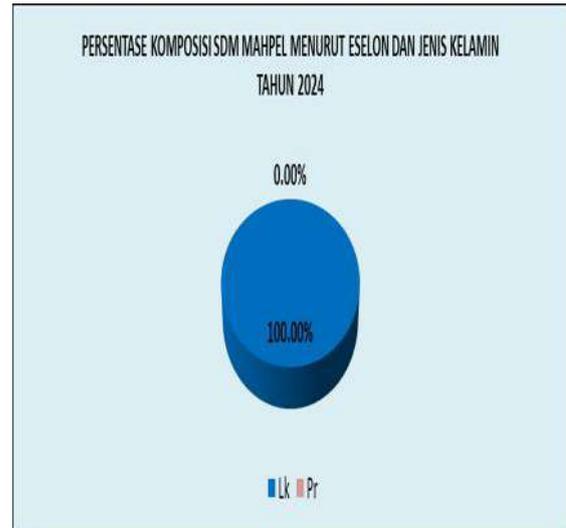
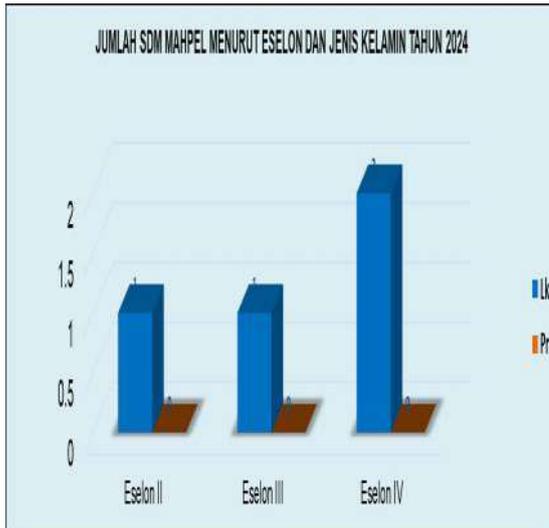


Tabel 1.3 SDM PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon II	1	0	1	100.00	0.00	100.00	25.00	0.00	25.00
2	Eselon III	1	0	1	100.00	0.00	100.00	25.00	0.00	25.00
3	Eselon IV	2	0	2	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00
	Jumlah	4	0	4	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

Grafik 1.3 SDM PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin

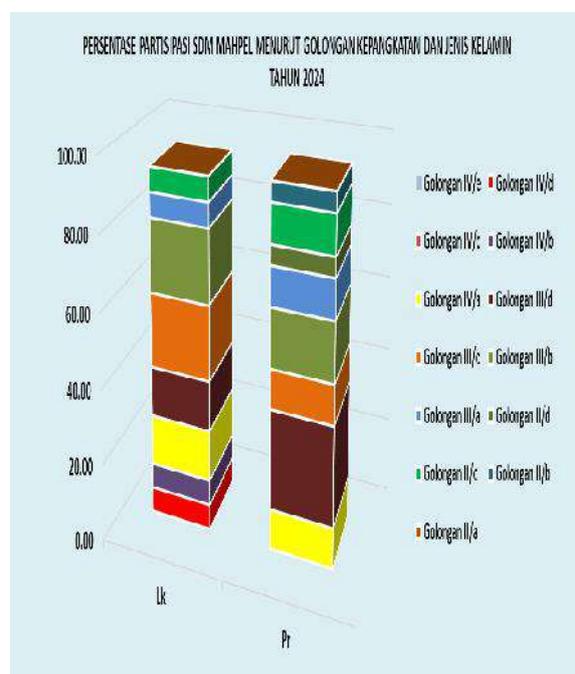
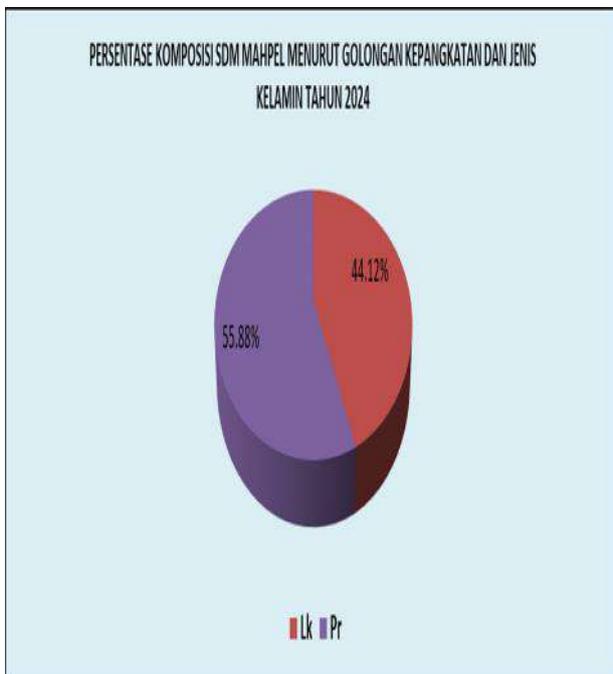
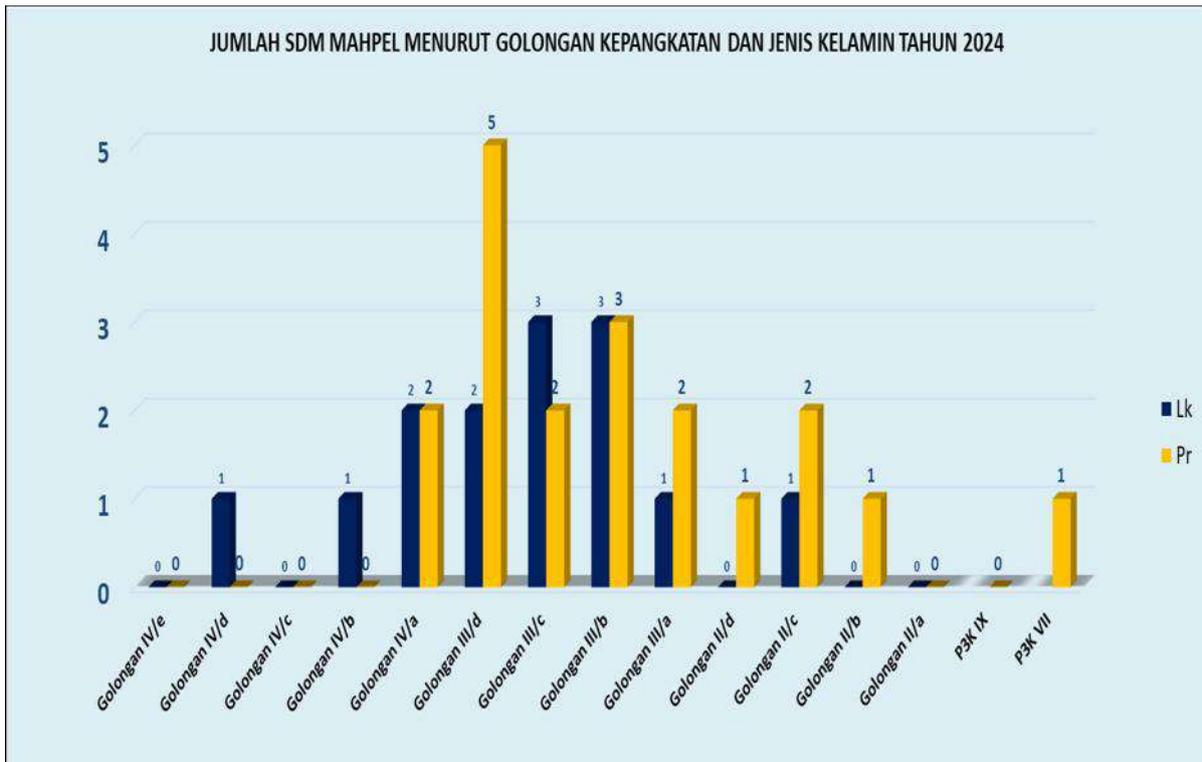




Tabel 1.4 SDM PNS Menurut Golongan Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawaiian			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Parisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan IV/e	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Golongan IV/d	1	0	1	100.00	0.00	100.00	6.67	0.00	2.94
3	Golongan IV/c	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Golongan IV/b	1	0	1	100.00	0.00	100.00	6.67	0.00	2.94
5	Golongan IV/a	2	2	4	50.00	50.00	100.00	13.33	10.53	11.76
6	Golongan III/d	2	5	7	28.57	71.43	100.00	13.33	26.32	20.59
7	Golongan III/c	3	2	5	60.00	40.00	100.00	20.00	10.53	14.71
8	Golongan III/b	3	3	6	50.00	50.00	100.00	20.00	15.79	17.65
9	Golongan III/a	1	2	3	33.33	66.67	100.00	6.67	10.53	8.82
10	Golongan II/d	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	2.94
11	Golongan II/c	1	2	3	33.33	66.67	100.00	6.67	10.53	8.82
12	Golongan II/b	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	2.94
13	Golongan II/a	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	P3K IX	1	0	1	100.00	0.00	100.00	6.67	0.00	2.94
15	P3K VII	0	1	1	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	2.94
	JUMLAH	15	19	34	44.12	55.88	100.00	100.00	94.74	100.00

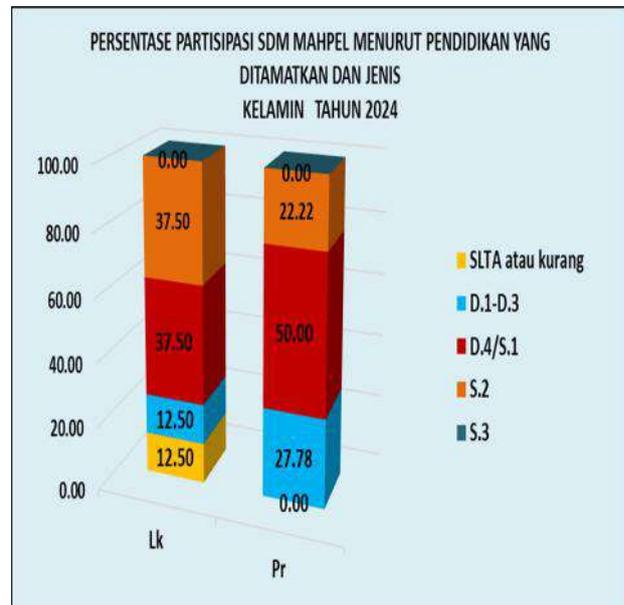
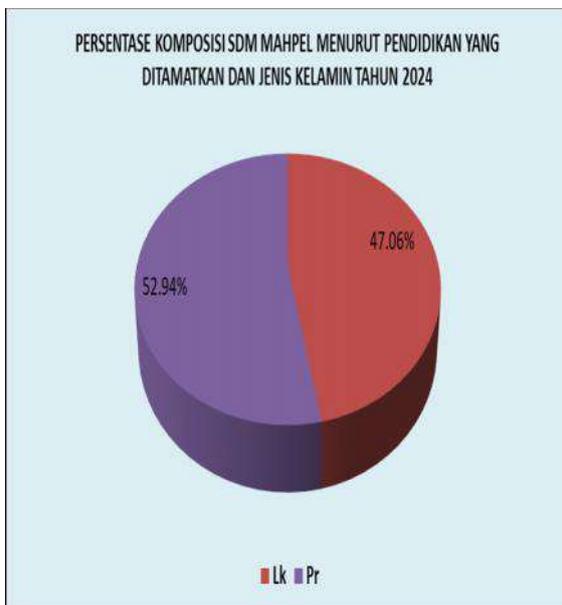
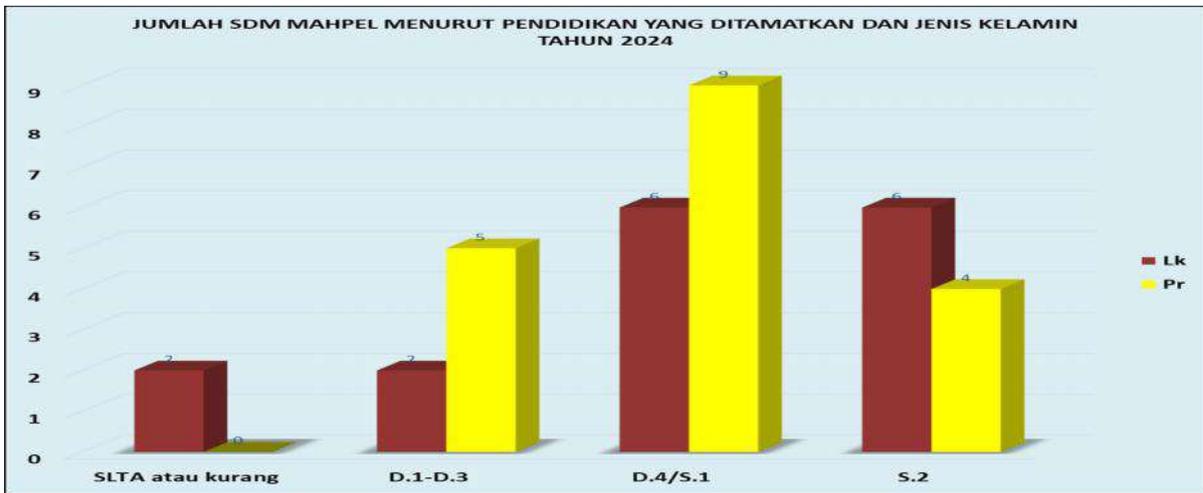
Grafik 1.4 SDM PNS Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin



Tabel 1.5. SDM PNS Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan yang ditamatkan	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	SLTA atau kurang	2	0	2	100.00	0.00	100.00	12.50	0.00	5.88
2	D.1-D.3	2	5	7	28.57	71.43	100.00	12.50	27.78	20.59
3	D.4/S.1	6	9	15	40.00	60.00	100.00	37.50	50.00	44.12
4	S.2	6	4	10	60.00	40.00	100.00	37.50	22.22	29.41
5	S.3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		16	18	34	47.06	52.94	100.00	100.00	100.00	100.00

Grafik 1.5 SDM PNS Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin



Tabel .1.6 SDM PNS Menurut Keikutsertaan Dalam Program Tugas Belajar S2/S3 di Dalam/Luar Negeri dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan di Luar/Dalam Negeri	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Pendidikan Luar Negeri									
	S.2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S.3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pendidikan Dalam Negeri									
	S.2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S.3	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Sub Jumlah	0	1	1	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
	JUMLAH	0	1	1	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

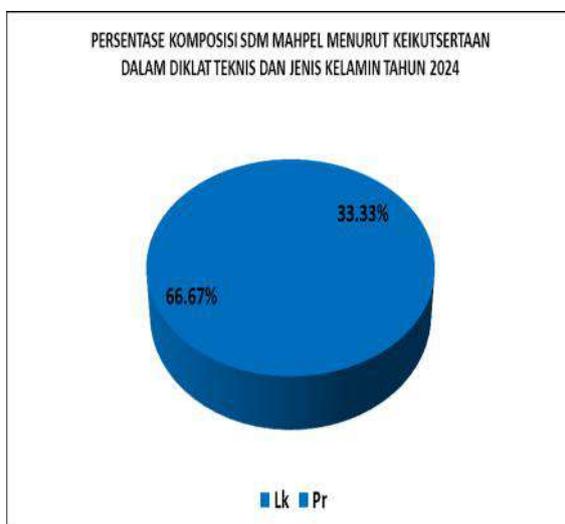
Grafik 1.6. SDM PNS Menurut Keikutsertaan dalam Program Tugas Belajar S2/S3 di Dalam/Luar Negeri dan Jenis Kelamin



Tabel 1.7. SDM PNS Mahpel Menurut Pelatihan Teknis dan Jenis Kelamin

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Pendidikan/Pelatihan Administrasi									
1.1	Diklat Sustainable & Entrepreneurial leadership	2	0	2	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	22.22
1.2	Diklat Junior Web Developer/Coding	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	11.11
1.3	Diklat Pengadaan Barang/Jasa	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
1.4	Diklat Bendaharaha Pengeluaran	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	22.22
1.5	Diklat Sekretaris yang Efektif	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	Diklat Bahasa Inggris	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	Diklat Manajemen Talenta	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Diklat Pembekalan dan pelaksanaan penyesuaian Ijaza	0	1	1	0.00	100.00	100.00	0.00	16.67	11.11
1.9	Diklat Manajemen Kinerja	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Diklat SPIP	0	2	2	0.00	100.00	100.00	0.00	33.33	22.22
	Sub Jumlah	3	6	9	33.33	66.67	100.00	0.00	100.00	100.00
2	Pendidikan/Pelatihan Penjurangan									
2.1	Diklat Penjurangan P PIM IV	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Diklat Penjurangan Q PIM III	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Diklat Penjurangan R, dst PIM II PIM I, LEMHANAS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3	6	9	33.33	66.67	100.00	0.00	100.00	100.00

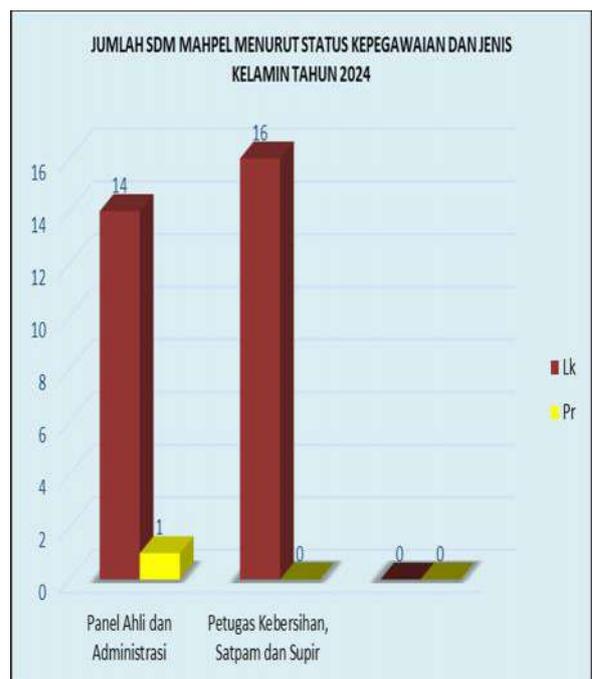
Grafik 1.7 Jumlah SDM Mahpel Menurut Pelatihan Teknis dan Jenis Kelamin

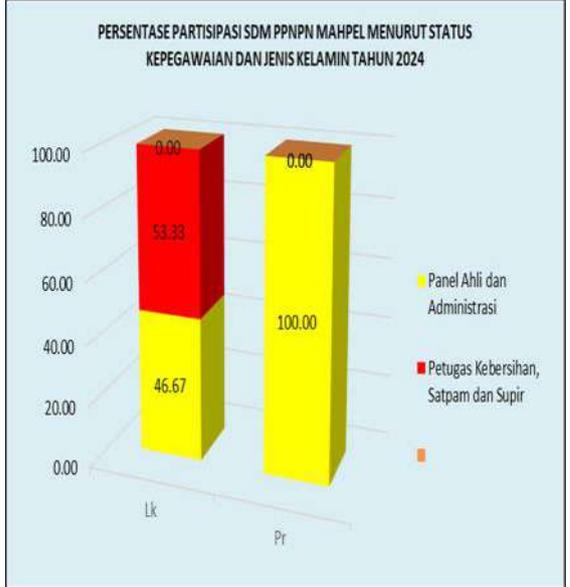
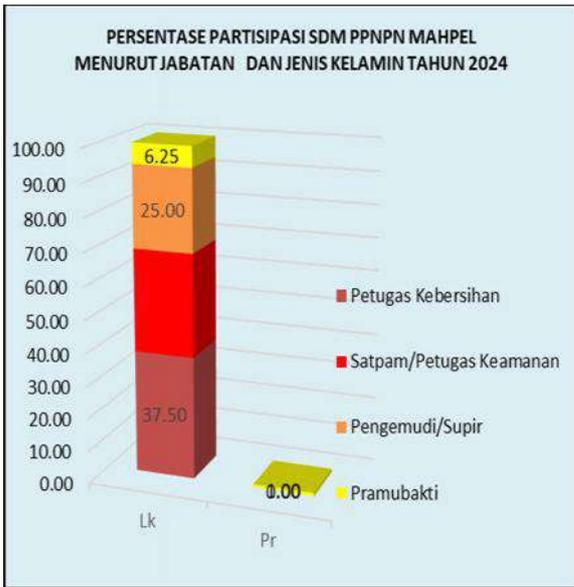
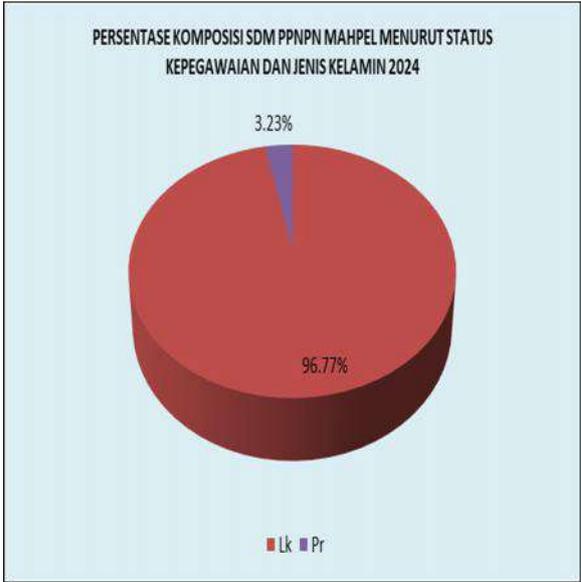
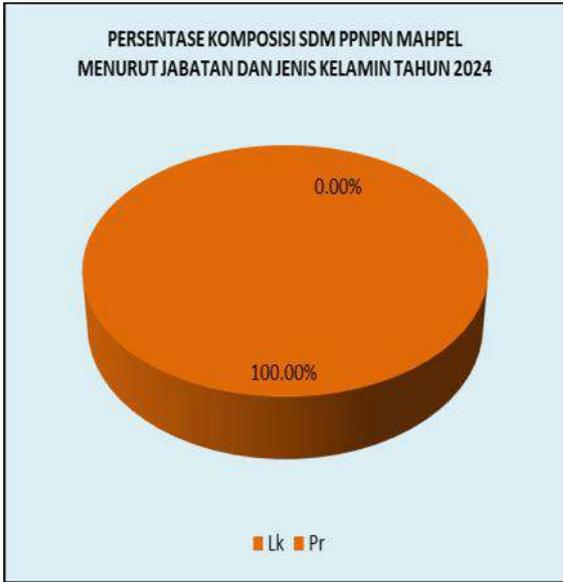


Tabel 1.8. SDM PPNPN Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
I	<b>Panel Ahli dan Administrasi</b>									
1.1	Panel Ahli	10	1	11	90.91	9.09	100.00	71.43	100.00	73.33
1.2	Pengadministrasi Umum	4	0	4	100.00	0.00	100.00	28.57	0.00	26.67
		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>93.33</b>	<b>6.67</b>	<b>100.00</b>	<b>46.67</b>	<b>100.00</b>	<b>48.39</b>
II	<b>Petugas Kebersihan, Satpam dan Supir</b>									
2.1	Petugas Kebersihan	6	0	6	100.00	0.00	100.00	37.50	0.00	37.50
2.2	Satpam/Petugas Keamanan	7	0	7	100.00	0.00	100.00	43.75	0.00	43.75
2.3	Pengemudi/Supir	2	0	2	100.00	0.00	100.00	12.50	0.00	12.50
2.4	Pramubakti	1	0	1	100.00	0.00	100.00	6.25	1.00	6.25
	<b>Sub Total</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>53.33</b>	<b>0.00</b>	<b>51.61</b>
III		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>96.77</b>	<b>3.23</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Grafik 1.8. SDM PPNPN Menurut Status kepegawaian dan Jenis Kelamin

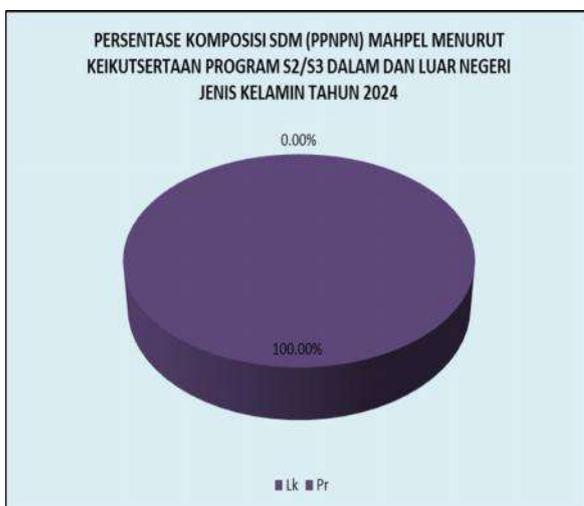
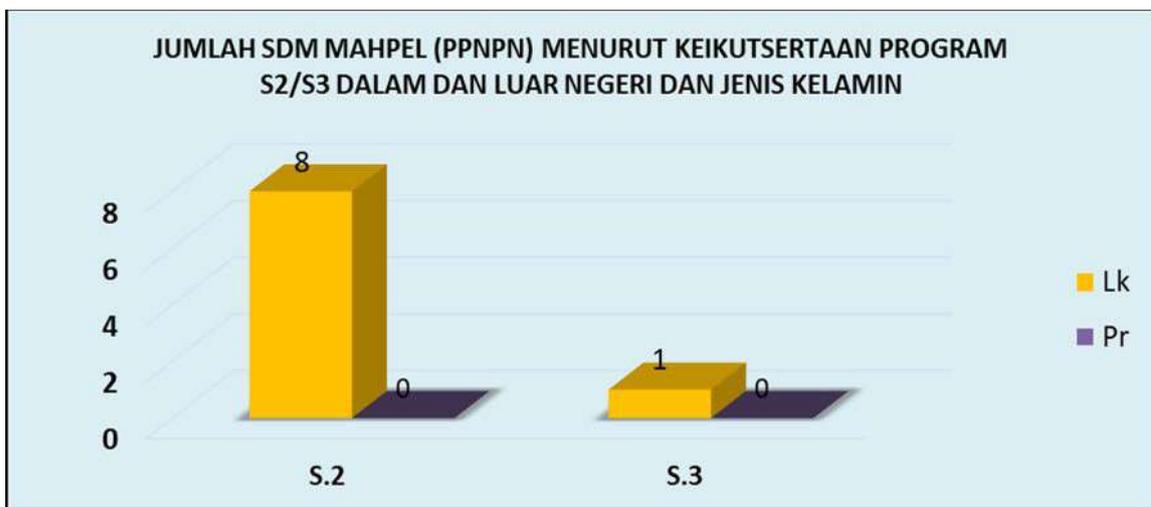




Tabel 1.9 SDM Mahpel (PPNP) berdasarkan Menurut Keikutsertaan Program S2/S3 dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan di Luar/Dalam Negeri	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Pendidikan Luar Negeri									
	S.2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	S.3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pendidikan Dalam Negeri									
	S.2	8	0	8	100.00	0.00	100.00	88.89	0.00	88.89
	S.3	1	0	1	100.00	0.00	100.00	11.11	0.00	11.11
	Sub Jumlah	9	0	9	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

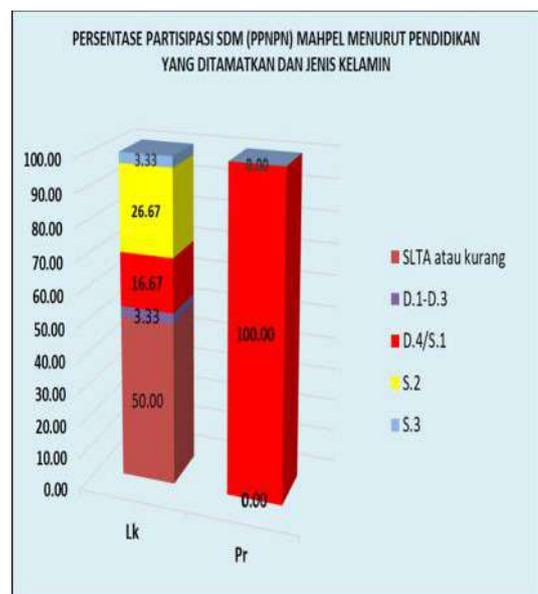
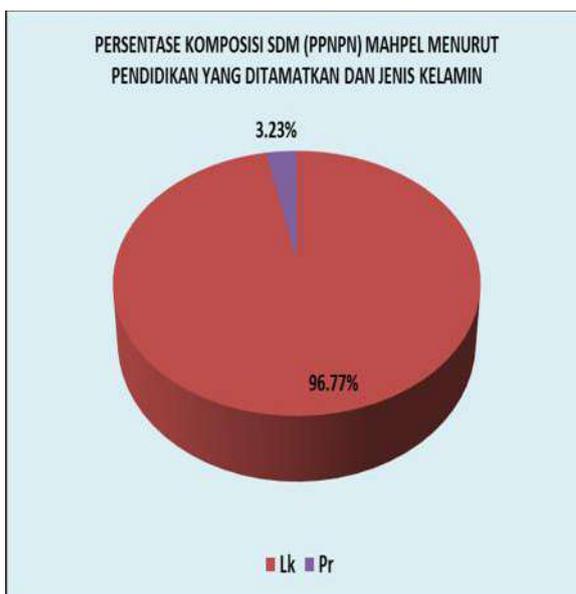
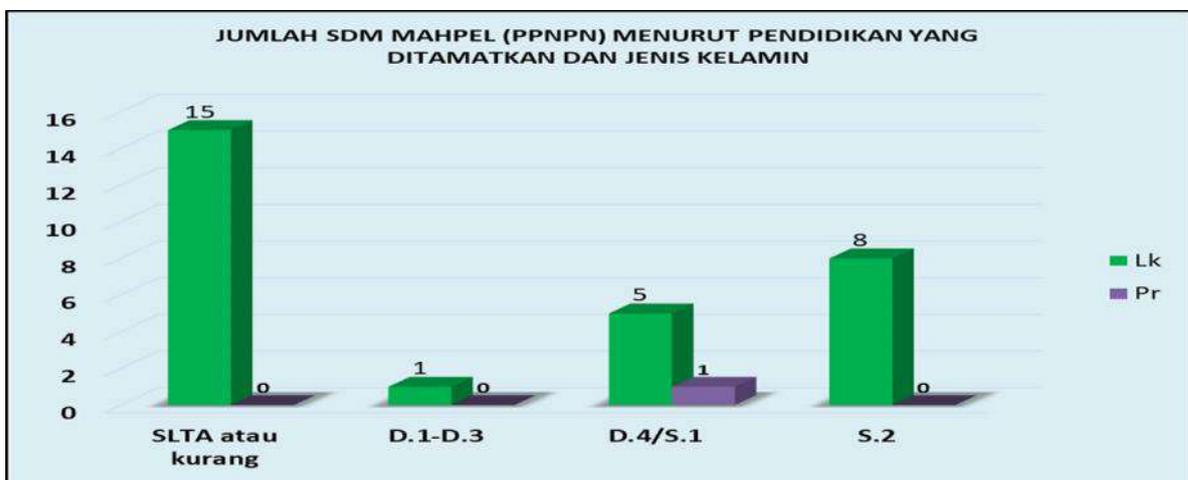
Grafik 1.9 SDM Mahpel (PPNP) berdasarkan Menurut Keikutsertaan Program S2/S3 dan Jenis Kelamin



Tabel 1.10 SDM PPNPN Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan yang ditamatkan	Jumlah Pegawaiian			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Paripasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	SLTA atau kurang	15	0	15	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	48.39
2	D.1-D.3	1	0	1	100.00	0.00	100.00	3.33	0.00	3.23
3	D.4/S.1	5	1	6	83.33	16.67	100.00	16.67	100.00	19.35
4	S.2	8	0	8	100.00	0.00	100.00	26.67	0.00	25.81
5	S.3	1	0	1	100.00	0.00	100.00	3.33	0.00	3.23
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>96.77</b>	<b>3.23</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

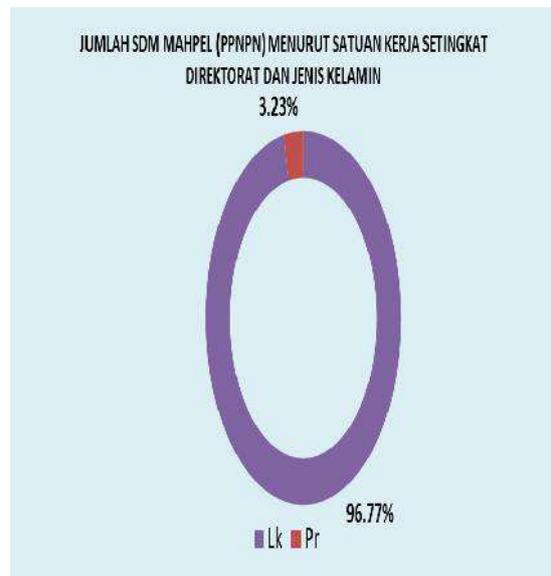
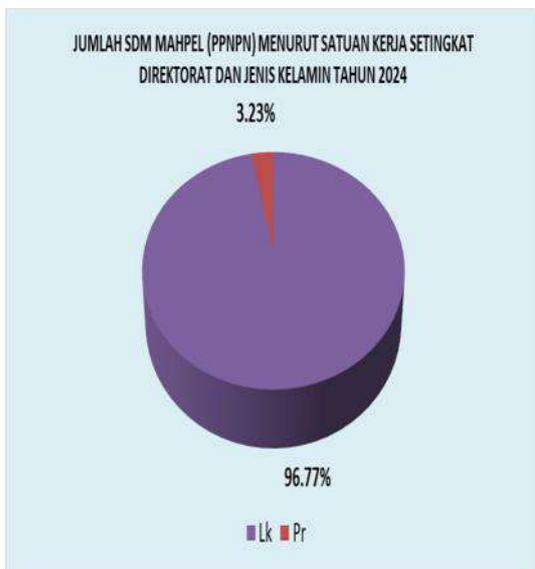
Grafik 1.10 SDM PPNPN Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin



Tabel. 1.11 SDM PPNPN Menurut Satuan Kerja dan Jenis Kelamin

No	Pusat/Biro/Direktorat	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai			Persentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	PPNPN Mahkamah Pelayaran							-	-	-
1	Anggota Panel Ahli	10	1	11	90.91	9.09	100.00	33.33	100.00	35.48
2	Pengadministrasi Umum	4	0	4	100.00	0.00	100.00	13.33	0.00	12.90
3	Pramubakti	1	0	1	100.00	0.00	100.00	3.33	0.00	3.23
4	Petugas Kebersihan	6	0	6	100.00	0.00	100.00	20.00	0.00	19.35
5	Satpam	7	0	7	100.00	0.00	100.00	23.33	0.00	22.58
6	Pengemudi	2	0	2	100.00	0.00	100.00	6.67	0.00	6.45
	<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>96.77</b>	<b>3.23</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Grafik 1.11 SDM PPNPN Menurut Satuan Kerja dan Jenis Kelamin



#### **D. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan**

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan perhubungan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama tahun 2020 – 2024. Meningkatnya peran Mahkamah Pelayaran dalam menurunkan tingkat kecelakaan transportasi laut. Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas Mahkamah Pelayaran yaitu melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal serta menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal, dan fungsi sebagai berikut:

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait dengan penerimaan berkas berita acara pemeriksaan pendahuluan dan tindak lanjut hasil keputusan Mahkamah Pelayaran. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Pelayaran selama tahun 2020 – 2024, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

Melaksanakan persidangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan target waktu yang ditempuh melalui strategi peningkatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait tindak lanjut hasil keputusan sidang.

Melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal secara cepat, tepat dan seadil-adilnya sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, yang ditempuh melalui strategi, antara lain:

1. Melaksanakan persidangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan target waktu yang ditempuh melalui strategi peningkatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait tindak lanjut hasil keputusan sidang dan melakukan sidang pada 1 (satu) lokus tempat sidang dengan 2 (dua) kasus lanjutan pemeriksaan kecelakaan kapal.

2. Melakukan sosialisasi Pemeriksaan Lanjutan kecelakaan kapal dengan mengundang KSU/KSOP/KUPP mengenai BAPP dan melaksanakan investigasi dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan transportasi secara cepat, tepat dan seadil-adilnya sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, yang ditempuh melalui strategi, antara lain:
  - 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran berdasarkan kompetensi dibidangnya.
  - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sekretariat Mahkamah Pelayaran.
  - 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung investigasi kecelakaan transportasi sesuai standar yang berlaku.
3. Menyediakan sarana dan prasarana perantara perkantoran yang mendukung dan menjamin kebersihan di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
  - 1) Peningkatan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Mahkamah Pelayaran.
  - 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana serta kebersihan di lingkungan kantor Sekretariat Mahkamah Pelayaran.
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Mahkamah Pelayaran.

## **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kata Pengantar  
Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2024
2. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)  
Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2024.
3. Bab I Pendahuluan  
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP, Tugas dan Fungsi Mahkamah Pelayaran, Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran dengan penekanan kepada arah Kebijakan strategis Mahkamah Pelayaran serta Sistematika Penyajian Laporan Kinerja tahunan yang bersangkutan.

#### 4. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini memuat rencana strategis Mahkamah Pelayaran yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Utama per sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran serta ringkasan Perencanaan Kinerja dengan menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan.

#### 5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2024 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024.
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran Tahun 2021 – 2024.
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.
- 5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

#### B. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### 6. Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2024 serta saran tindak lanjut/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

#### 7. Lampiran-Lampiran

- a. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024;
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- c. Rencana Kinerja Tahunan, Tahun 2024;
- d. Rencana Aksi Tahun 2024;



### A. Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran

Dalam Peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun, yang disusun secara sistematis dan dilaksanakan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengacu pada rencana strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Dengan demikian rencana strategis yang disusun telah menjangkau substansi tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran. Rencana strategis mendefinisikan arah strategis organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses pencapaiannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dengan detail seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

## Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Pelayaran

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Pelayaran

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
Visi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam mewujudkan Visi Kementerian Perhubungan Yang Berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden.	Terwujudnya penyelenggaraan proses Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal secara tepat cepat dan seadil-adilnya berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak berkaitan dengan keselamatan pelayaran.
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.</li> <li>2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi.</li> <li>3. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel.</li> <li>4. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan.</li> <li>5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan.</li> <li>6. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan</li> </ol>	Menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal oleh Panel Ahli yang profesional dalam bidangnya secara kualitatif sebagai pembinaan hukum dan penegakan hukum ( <i>Law Enforcement</i> ) perkapalan dan pelayaran serta tenaga profesi kepelautan agar angkutan laut di Indonesia dapat terselenggara dengan aman, selamat, lancar dan tertib.

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
	<p>7. Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Budaya Kinerja.</p> <p>8. Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi Dan Teknologi Kementerian Perhubungan.</p> <p>9. Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi.</p> <p>10. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama Dan Kemitraan Kementerian Perhubungan.</p>	
Tujuan	<p>1. Meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan dukungan administrasi kepada unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan indikator indeks profesionalisme asn, indeks merit system, indeks tata kelola manajemen ASN, indeks pengelolaan keuangan, indeks perencanaan, indeks pengawasan kearsipan, indeks pengelolaan aset.</p> <p>2. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi birokrasi, dan</p>	<p>1) Terlaksananya tindak lanjut hasil keputusan Mahkamah Pelayaran oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</p> <p>2) Penegakan Hukum di bidang keselamatan pelayaran dicapai dengan peningkatan akuntabilitas kinerja Mahkamah Pelayaran berupa berkas kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Pelayaran yang tepat waktu.</p>

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
	<p>penguatan bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia secara konsisten di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan indikator indeks reformasi hukum, indeks kualitas kebijakan, indeks maturitas SPIP, indeks kelembagaan, indeks kepemimpinan perubahan.</p> <p>3. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi dengan indikator indeks SPBE Kementerian Perhubungan.</p> <p>4. Mendorong <i>stakeholder</i> dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi investigasi kecelakaan transportasi dan hasil sidang Mahkamah Pelayaran dalam rangka kualitas manajemen keselamatan transportasi dengan indikator rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti.</p>	
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan	1. Meningkatkan Peran Mahkamah Pelayaran

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
	<p>hukum diukur dengan indikator: Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan.</p> <p>2. Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan diukur dengan indikator: Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor transportasi.</p> <p>3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik diukur dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan.</p>	<p>dalam menurunkan tingkat kecelakaan kapal.</p> <p>2. Meningkatnya kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan proses sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.</p> <p>3. Meningkatnya efektivitas sosialisasi/desiminasi/seminar/ <i>workshop</i> publikasi tentang keselamatan pelayaran.</p> <p>4. Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal dan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal</p> <p>5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi</p>
Indikator	<p>1. Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan.</p> <p>2. Penurunan Emisi GRK sektor transportasi.</p> <p>3. Indeks RB Kementerian Perhubungan.</p>	<p>1. Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan dan Sidang Mahkamah Pelayaran yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> dan <i>regulator</i>;</p> <p>2. Putusan Hukum dibidang Keselamatan Pelayaran</p>

## B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) mencakup periode tahunan yang sifatnya sangat strategis karena menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dengan demikian, RKT berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra dengan tujuan perencanaan tahunan pembangunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Kantor Mahkamah Pelayaran menyusun RKT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Renstra Mahkamah Pelayaran Tahun 2020-2024.

Selain Renstra dokumen lain atau peraturan lain yang menjadi acuan adalah Undang Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Dokumen rencana kinerja antara lain berisikan informasi mengenai: sasaran, indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Kelima sasaran yang terdapat di dalam Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran tahun 2020 – 2024 pelaksanaannya diwujudkan melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mahkamah Pelayaran yang dijabarkan kedalam 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi;

2. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik;
3. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran;
4. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran; dan
5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.

Target Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2023 secara umum sejalan dengan Target yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024, secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tabel RKT 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1)	Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75
		2)	Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3)	Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Indeks	3.04
		4)	Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran	%	100
		5)	Dukungan Manajemen Reformasi Pada Area Perubahan	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	6)	Penyusunan Regulasi Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1
4.	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	7)	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH dan RKA -K/L, Data Statistik Mahkamah Pelayaran	%	100
		8)	Pengelolaan Keuangan Mahkamah Pelayaran	%	100
		9)	Barang Milik Negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100
		10)	Data Statistik Kecelakaan Kapal	%	100
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	11)	Kegiatan Sosialisasi / bimbingan teknis/seminar/workshop/ <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	%	100
		12)	Pengelolaan Kearsipan dan Surat Masuk serta Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	%	85

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
		13) Pengembangan Kompetensi SDM dan Peningkatan Manajemen Pegawai Mahkamah Pelayaran	%	100
		14) Pembinaan Pegawai	%	100
		15) Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100

### C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Bentuk tekad Mahkamah Pelayaran dalam mewujudkan "Good Governance" dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024. Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran ini merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun *service agreement* dan dokumen "kontrak" antara pimpinan unit-unit kerja dengan Pimpinan Mahkamah Pelayaran serta kontrak kinerja Pimpinan Mahkamah Pelayaran dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja ini adalah rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 – 2024 yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Perjanjian Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu defenitif).

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	% 75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
		2)	Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3)	Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Indeks	3.04
		4)	Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran	%	100
		5)	Dukungan Manajemen Reformasi Birokarsi Pada Area Perubahan	%	100
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	6)	Penyusunan Regulasi Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1
4.	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	7)	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH dan RKA -K/L, Data Statistik Mahkamah Pelayaran	%	100
		8)	Pengelolaan Keuangan Mahkamah Pelayaran	%	100
		9)	Barang Milik Negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		BMN	
		10) Data Statistik Kecelakaan Kapal	% 100
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	11) Kegiatan Sosialisasi / bimbingan teknis/seminar/workshop/ <i>Focus Group Discussion (FGD)</i>	% 100
		12) Pengelolaan Kearsipan dan Surat Masuk serta Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	% 85
		13) Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Manajemen SDM Pegawai Mahkamah Pelayaran	% 100
		14) Pembinaan Pegawai	% 100
		15) Pembinaan Administrasi Kepegawaian	% 100

Indikator merupakan suatu ukuran yang memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Indikator juga dapat digunakan sebagai alat untuk

melakukan perencanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi pada masa yang akan datang. Dalam Indikator Kinerja Utama Mahkamah Pelayaran Tahun 2015 – 2019, sudah tidak relevan lagi, sehingga Indikator utamanya berubah. Adapun Indikator Kinerja Utama lama ini menjelaskan banyaknya jumlah perkara putusan sidang, sedangkan Indikator Kinerja Utama di tahun 2020 – 2024 menjadi Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran.

Tabel 2.3 Target IKU tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKU				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Target	Target	Target	Target	Target
1.	Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran	50	60	66	71	75

Diagram 2. Target IKU tahun 2020 – 2024



Dalam rangka pencapaian target selama Tahun 2024, dialokasikan anggaran sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2024

Uraian Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp.	120.000.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp.	1.148.980.000
3.	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	Rp.	2.816.803.000
4.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp.	324.120.000
5.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp.	16.388.451.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.</b>	<b>20.798.354.000</b>



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui azas pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Untuk mengukur kinerja Mahkamah Pelayaran, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang dapat menggambarkan posisi kinerja instansi sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

#### **A. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Pelayaran. Pengukuran kinerja Mahkamah Pelayaran dilakukan tingkat pencapaian target dari rencana capaian kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala, yaitu bulanan, triwulan dan tahunan. Pedoman yang digunakan dalam capaian kinerja sebagai berikut:

1. Pendekatan Perencanaan Strategis

Pendekatan perencanaan strategis dilakukan dengan menyelaraskan antara visi dan misi dengan potensi sumber daya, peluang dan kendala intern dan ekstern dalam upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk memudahkan penyusunan rencana strategis, digunakan alat bantu berupa formulir Rencana Strategis yang dimuat dalam dokumen RENSTRA. Dalam Rencana Strategis dimuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2. Pendekatan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan tindakan/kegiatan tahunan, yang merupakan penajaman untuk mengoperasionalkan rencana strategis yang disusun seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran. Untuk memudahkan penyusunan rencana kinerja tahunan digunakan alat bantu berupa Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

3. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran dilakukan terhadap nilai rata-rata capaian indikator kinerja masukan (input) dan keluaran (output). Pengukuran kinerja kegiatan ini merupakan dasar pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan program, karena penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Persentase pencapaian sasaran merupakan perbandingan antara tingkat capaian target yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Persentase pencapaian

sasaran setiap indikator juga dibandingkan dengan persentase tahun lalu apakah capaian sasaran meningkat atau menurun. Dalam penghitungan persentase capaian kinerja terdapat 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut :

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pencapaian Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2024 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagaimana terlihat dalam form Pengukuran Kinerja.

## I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

2	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Tar get	Realisasi Tahun 2024				Total	Capaian (%)
					Tw. 1	Tw. 2	Tw. 3	Tw. 4		
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75	39,21	62,75	82,35	100	100	133,33
		2) Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	28,57	40	76,76	100	100	100
										<b>233,33</b>
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3) Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Indeks	3.04			3,382	-	3,382	111,25
		4) Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran di tahun 2024	%	100	13,33	56,25	75	73,33	100	100

		mengalami perubahan menjadi Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran								
		5) Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100		1			100	100
										<b>311,25</b>
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	6) Regulasi Hukum pada Dokumen Kajian Kelembagaan Mahkamah Pelayaran di Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1				1	100	<b>100</b>
										<b>100</b>

4.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	7)	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH , RKA-K/L	%	100	2	1	3	6	<b>100</b>	
		8)	Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	-	50	75	100	100	<b>100</b>
		9)	Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100	-	1	-	1	100	<b>100</b>
		10)	Data Statistik Kecelakaan Kapal	%	100	-	50	50	-	100	<b>100</b>
										<b>400</b>	

5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	11)	Kegiatan Sosialisasi/ bimbingan Teknis/ seminar / Focus Group Discussion (FGD)	%	50 + 33 (88)	-	210	-	210	<b>238,63</b>	
		12)	Pengelolaan surat masuk dan surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran	%	85				92,66	<b>109,01</b>	
		13)	Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Manajemen Pegawai Mahkamah Pelayaran	%	100	-	5	7	10	83,33	<b>83,33</b>
		14)	Pembinaan Pegawai	%	100		22	2	-	100	<b>100</b>
		15)	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100			12	-	100	<b>100</b>
											<b>630,97</b>

Tabel 3.1. Perbandingan Target Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	60	83	138,83	66	100	152	71	100	140,84	75	100	133,33
		2) Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	6,25	6,25	100	70	70	100	90	90	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>				<b>145,08</b>			<b>222</b>			<b>230,84</b>			<b>233,33</b>		
2)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3) Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Index	3,01	3,25	107,97	Berubah penempatan SS			3,03	3,48	114,85	3,04	3,382	111,25
		4) Keputusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran /Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5) Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	Belum ada di RO tahun 2021			100	90,50	90,50	100	100	100	100	100	100
		6) Persentase putusan yang diakses oleh publik	%	100	100	100	Perubahan di Aplikasi sehingga statistik data yg mengakses sdh tdk ada								

<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>				<b>307,97</b>			<b>190,50</b>			<b>314,85</b>			<b>311,25</b>		
3)	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	Jumlah Dokumen Regulasi Hukum Rancangan 7) Peraturan Mahkamah Pelayaran	Dokumen	4	3	75	Perubahan karena sudah tidak ada di RO			1	1	100	1	1	100
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>				<b>175</b>			<b>100</b>			<b>100</b>			<b>100</b>		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			
				Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	
4)	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	8) Jumlah Dokumen LAKIP, RENSTRA, PK, SPIP dan LAPTAH	Dokumen	1	1	100	5	5	100	5	5	100	6	6	100	
		9) Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	98,26	98,26	100	99,77	99,77	100	100	100	100	100	100	
		10) Jumlah dokumen barang milik negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Dokumen	1	1	100	2	2	100	100	100	100	100	100	100	100
		11) Jumlah Dokumen Data Statistik Kecelakaan Kapal	Dokumen	1	1	100	1	1	100	100	100	100	1	1	100	
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>				<b>398,26</b>			<b>399,77</b>			<b>400</b>			<b>400</b>			

5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran	12) Kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis / seminar / workshop / Focus Group Discussion (FGD)	%	'100	100	100	100	185	185	50	207	414	88	210	238,63
		13) Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	Dokumen	1	1	100	2	2	100	85	86	101,2	85	92,66	109,01
		14) Kegiatan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Manajemen Pegawai Mahkamah Pelayaran	Dokumen	1	1	100	4	4	100	17	12	70,59	100	83,33	83,33
		15) Pembinaan Pegawai	%	Belum ada di RO tahun 2021			100	100	100	100	100	100	100	100	100
		16) Pembinaan Administrai Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>				<b>400</b>			<b>585</b>			<b>785,79</b>			<b>630,97</b>

### III. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Tabel. 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan Realisasi Kinerja		
				Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75	100	133,33
		2) Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	100	100
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3) Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Indeks	3,04	3,382	3,382
		4) Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100
		5) Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100	100	100
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	6) Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1	1	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan Realisasi Kinerja		
				Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	7) Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH & SPIP	%	100	100	100
		8) Realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100
		9) barang milik negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100	100	100
		10) Data Statistik Kecelakaan Kapal	%	100	100	100
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran	11) Sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD)	%	88	210	238,63
		12) Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	%	85	92,66	106,08
		13) Pengembangan Kompetensi SDM	%	100	83,33	83,33
		14) Pembinaan Pegawai	%	100	100	100
		15) Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100

#### IV. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

- a. **Sasaran pertama adalah** “Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi”

Sasaran ini dicapai melalui satu program yang dimiliki oleh Mahkamah Pelayaran yaitu Penegakan Hukum di bidang Keselamatan Pelayaran.

Adapun kegiatan ini yang telah disetujui dalam DIPA Mahkamah Pelayaran Tahun Anggaran 2024, guna mencapai indikator kinerja dari sasaran yang pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran;
- 2) Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu.

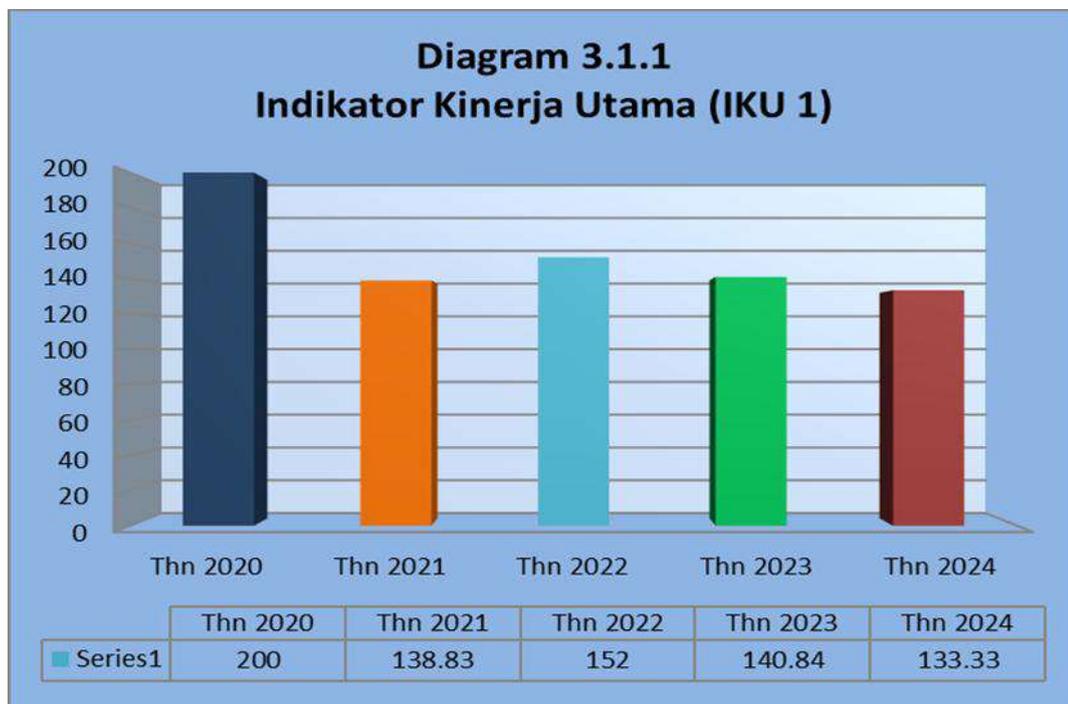


Target Indikator Kinerja Utama Mahkamah Pelayaran pada tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran.

Pada sasaran strategis tahun 2024, rata-rata capaian sasaran mencapai 233,33, ada kenaikan sebesar 2,49 dibandingkan tahun 2023, perubahan ini di karenakan adanya target indikator kinerja pada sasaran strategis 2024 yang meningkat dan semua keputusan Mahkamah Pelayaran sejumlah 17 ditindaklanjuti oleh Ditkapel, sedangkan

untuk tahun 2024 jumlah putusan yang dihasilkan 26 keputusan yang akan digunakan untuk menghitung IKU tahun 2025.

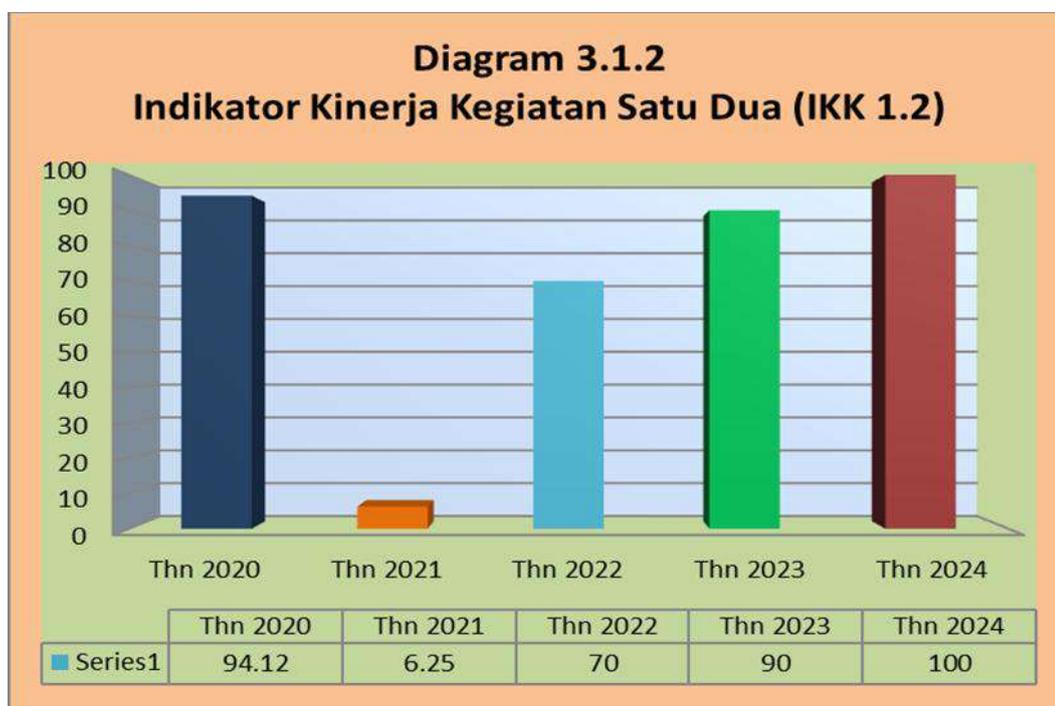
- 1) Pada Indikator Kinerja 3.1.1 “Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 75%, dengan realisasi kinerja 100% dengan capaian kinerja adalah sebesar 133,33%. Pagu anggaran semula Rp. 200.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 150.000.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 149.788.556, sisa anggaran 211,444 dengan persentase 99,86%.



Kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja utama ini, diambil dari Keputusan Mahkamah Pelayaran atas Penjatuhan sanksi administratif kepada Nahkoda dan atau Perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan, ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Target kinerja yang berhasil dicapai pada tahun 2024 adalah 75% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian 133,33%. Berdasarkan capaian indikator dimaksud dapat dinyatakan bahwa Mahkamah Pelayaran telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tahun 2024. Berdasarkan persentase Capaian tersebut di atas, sudah sesuai dengan target dan justifikasi

keberhasilan dari IKU Mahkamah Pelayaran, hal ini disebabkan karena komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dan intensif serta kerjasama antara Mahkamah Pelayaran dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terkait tindaklanjut dari Keputusan Mahkamah Pelayaran, apalagi sejak terbitnya PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan PM 30 Tahun 2022 tentang perubahan PM 6 Tahun 2020, sehingga Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Keputusan dapat terlaksana sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

- 2) Pada Indikator Kinerja Diagram 3.1.2 “Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 100% dan capaian kinerja 100%. Pagu anggaran semula Rp. 1.316.720.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 1.202.479.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.202.478.379, sisa anggaran 621, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 100%



Pada Indikator Kinerja ini target dalam 1 tahun pada tahun 2024 adalah 30 putusan dan penyelenggaraan sidang yang telah dilaksanakan adalah 30 kali untuk menghasilkan putusan yang tepat waktu, sehingga perolehannya  $30/30 \times 100\% = 100\%$ , walau ada beberapa hambatan dan kendala yang

dihadapi dalam mencapai indikator kinerja tersebut antara lain :

- 1) Pelaksanaan prasadang/sidang sudah dilaksanakan sesuai jadwal namun Panel Ahli juga mengikuti sidang PTUN penyelesaian gugatan keputusan perkara kecelakaan kapal yang diputuskan oleh Mahkamah Pelayaran;
- 2) Mahkamah Pelayaran tetap melakukan proses terhadap kapal asing yang mengalami kecelakaan kapal di wilayah perairan Indonesia, walau Ditkapel tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan Berita Acara Pengenaan Sanksi untuk kapal asing tersebut;
- 3) Terdapat Anggota Panel Ahli yang memasuki masa Purnabhakti / Memasuki usia pensiun Bapak Frederick Roinrowan;
- 4) Hal-hal Teknis lainnya.

b. **Sasaran kedua adalah** “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”.

Indikator Kinerja pada sasaran yang kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran
- 2) Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran.
- 3) Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan



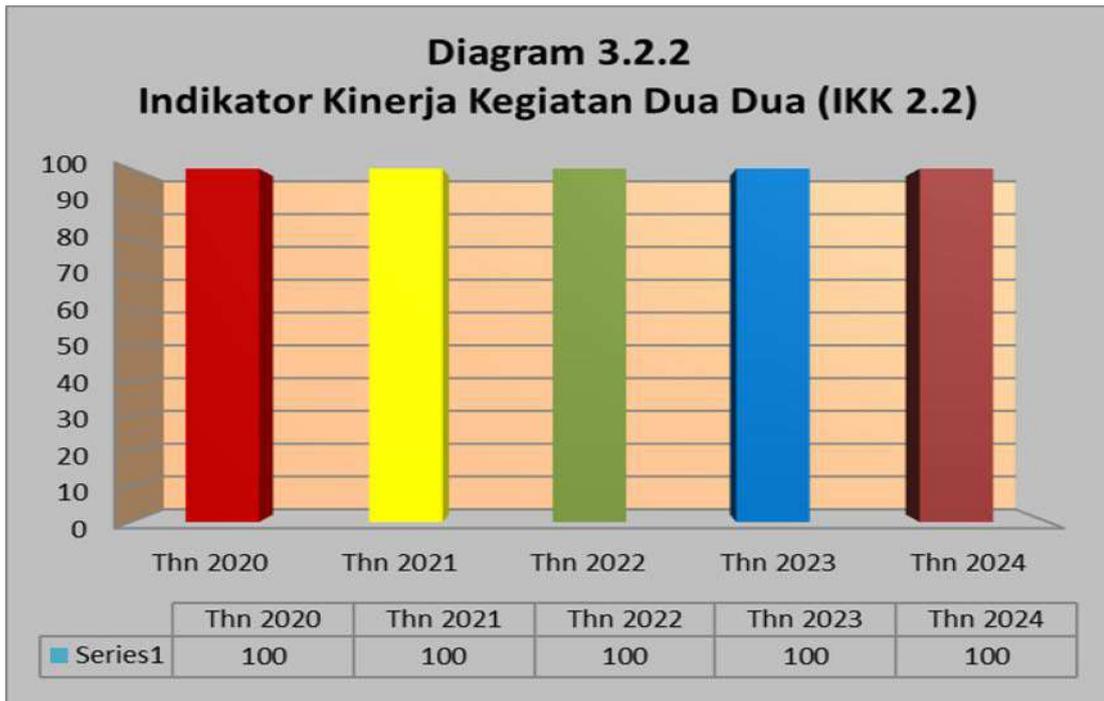
Sasaran kedua pada diagram 3.2 memberikan info penyelenggaraan kegiatan SPIP Mahkamah Pelayaran melalui Indeks Maturitas SPIP merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan

pengendalian intern dalam suatu organisasi pemerintahan sedangkan. kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Mahkamah Pelayaran meliputi kegiatan peliputan sedang yang di upload di website dan kegiatan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, regulasi dan sumber daya manusia aparatur. Pada sasaran strategis ini, rata-rata capaian sasaran tahun 2024 sebesar 311,25% di bandingkan dengan tahun 2023 sebesar 314,85% mengalami penurunan sebesar 3,6%, hal dikarenakan capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran” mengalami penurunan yang semula yang tahun sebelumnya 3,48 menjadi 3,382.

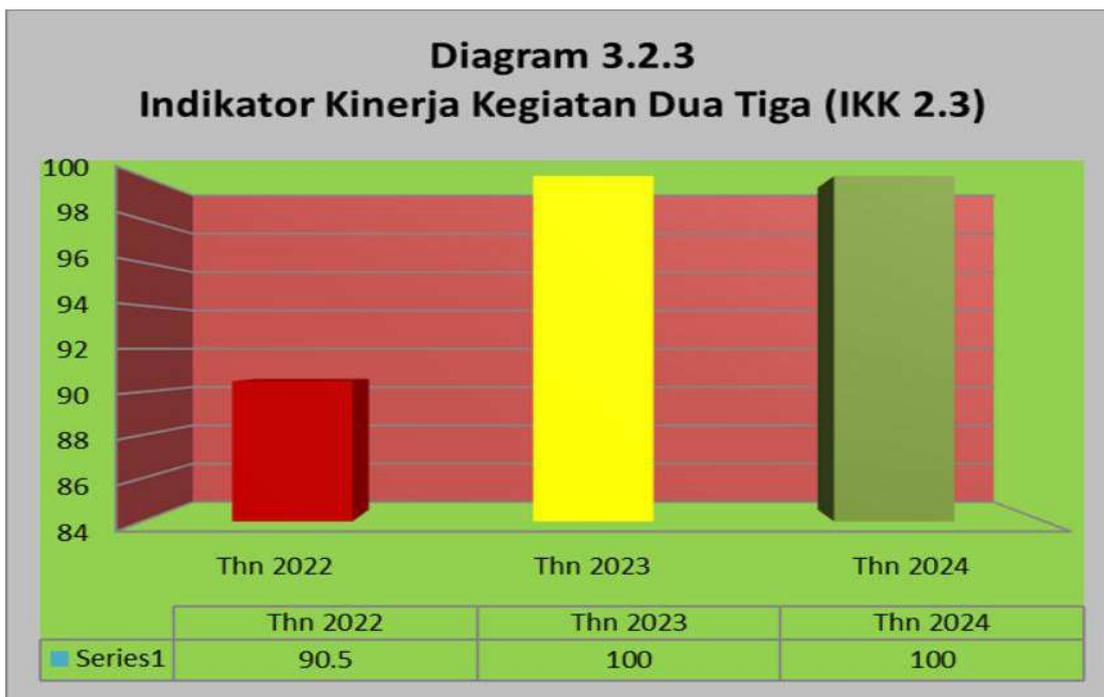
- 1). Pada Indikator Kinerja Diagram 3.2.1 “Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran” Target kinerja tahun 2024 sebesar 3.04 dengan realisasi capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (dimana Mahkamah Pelayaran di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan) adalah sebesar 3,382. Pagu anggaran penyelenggaraan kegiatan SPIP semula Rp.66.514.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 55.000.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 54.143.298,- sisa anggaran Rp. 856.702 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98.44%, dimana untuk alokasi anggaran kegiatan Manajemen Risiko masih bergabung dengan kegiatan SPIP Mahkamah Pelayaran.



2). Pada Indikator Kinerja Diagram 3.2.2 “Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran kegiatan berupa Jumlah Keputusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran. Data-data Mahkamah Pelayaran dapat di lihat /di akses oleh publik baik dari nasional maupun mancanegara disajikan informasi dalam website Mahkamah Pelayaran, berupa hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran dan kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online melalui website Mahkamah Pelayaran ([mahpel.dephub.go.id/web/](http://mahpel.dephub.go.id/web/)) dan kegiatan menghadiri undangan rapat kegiatan arsitektur SPBE. dengan Target kinerja tahun 2024 dengan total kegiatan sebesar 60 setiap tahun sedangkan realisasi adalah 60 kegiatan yang dihadiri baik online maupun offline, sehingga capaian kinerja  $60/60 \times 100 = 100\%$ . Pagu anggaran semula Rp. 90.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 79,267,000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 79,266,343, sisa anggaran 657 dengan persentase 100%.



2) Pada Indikator Kinerja Diagram 3.2.3 “Persentase Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan” Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 100% dan capaian kinerja 100%. Pagu anggaran yang semula Rp. 50.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 43.370.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 43.369.500, dengan persentase 100%.



Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Adapun Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun 9 (sembilan) Program Reformasi Birokrasi, pada antara lain:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan peraturan perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan ketatalaksanaan
5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur
6. Penguatan Pengawasan dan
7. Penguatan akuntabilitas kinerja
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Reformasi Birokrasi terhadap Nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mencapai 100%. Mahkamah Pelayaran dalam kegiatan Reformasi Birokrasi lebih ditekankan kepada penyiapan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Mahkamah Pelayaran untuk kegiatan Reformasi Birokrasi hanya *supporting* dalam pengumpulan data-data untuk Sekretariat Jenderal dalam pengumpulan data dukung / barang bukti. Penilaian Kegiatan RB dilaksanakan pada Sekretariat Jenderal berupa Indeks capaian yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan RB di Mahkamah Pelayaran lebih fokus menyiapkan data dukung pada area 2 (dua) yaitu penataan peraturan perundang-undangan, untuk mencari data dukung penguatan kelembagaan guna penyempurnaan peraturan pada Mahkamah Pelayaran supaya lebih terarah, serta memiliki standar operasional prosedur sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, dengan tujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dengan melakukan benchmarking ke DI Jogjakarta guna penyusunan penguatan peraturan dan penataan kelembagaan Mahkamah Pelayaran.

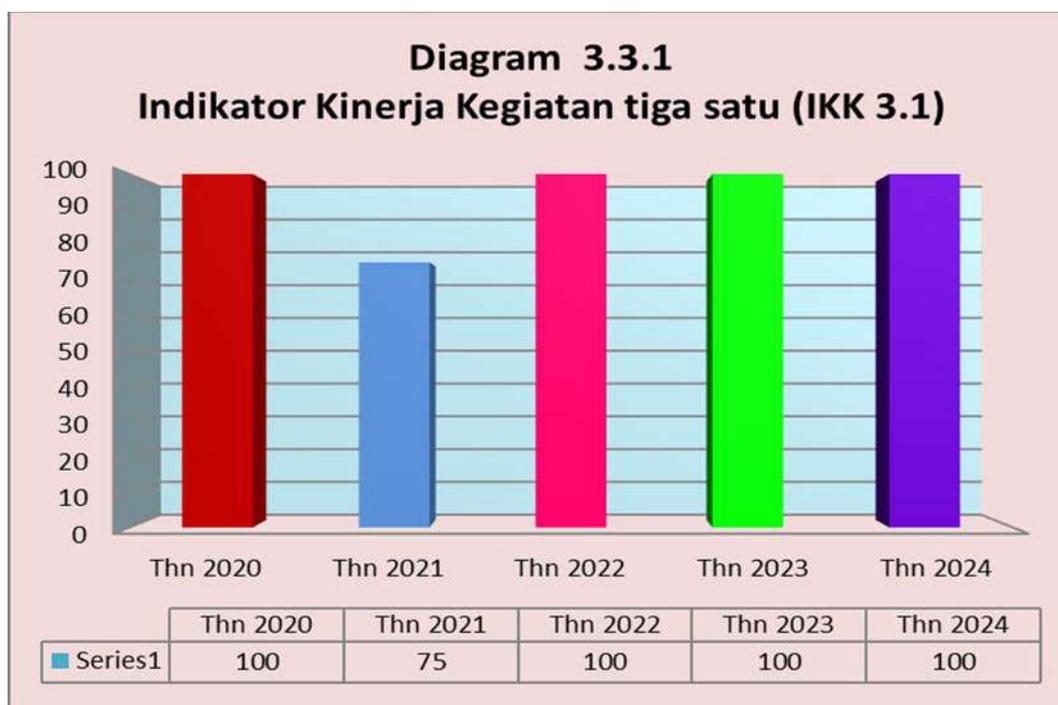
- b. Sasaran ketiga adalah** “Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum di Mahkamah Pelayaran”.

Indikator Kinerja pada sasaran yang ketiga adalah Penyusunan Regulasi Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran.



Pada akhir tahun 2024 kewenangan Mahkamah Pelayaran ditambah dan diperluas dengan dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan lingkup yurisdiksinya yang lebih luas dimana sebelumnya Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dengan menegakan kode etik profesi dan kompetensi dengan memberi sanksi Nakhoda dan/ atau Perwira Kapal dan sekarang ditambah dan diperluas menjadi menetapkan sanksi administratif kepada Nakhoda, perwira kapal, operator, pemilik kapal, dan atau petugas/pejabat yang terbukti melakukan kesalahan dan / atau kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan kapal dan melakukan mediasi dalam penyelesaian perselisihan

kerja laut. Saat ini Mahkamah Pelayaran sedang proses menyusun revisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 dan mengkaji kembali Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2022 serta revisi perubahan Nomor PM 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran. Pada Indikator Kinerja Diagram 3.3.1 “Penyusunan Regulasi Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 1 (satu) Peraturan dengan realisasi 1 (satu) Peraturan dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pagu anggaran semula Rp. 100.000.000 direvisi menjadi Rp. 52.858.000, dan dengan realisasi anggaran Rp. 52.858.000 dengan persentase sebesar 100%.



c. **Sasaran keempat adalah** “Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran”

Indikator Kinerja pada sasaran yang keempat adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Renstra, PK, LAKIP, LMCK, LAPTAH dan RKA-KL, Data Statistik Mahkamah Pelayaran;
- 2) Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran;
- 3) Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN;

#### 4) Data Statistik Kecelakaan Kapal.



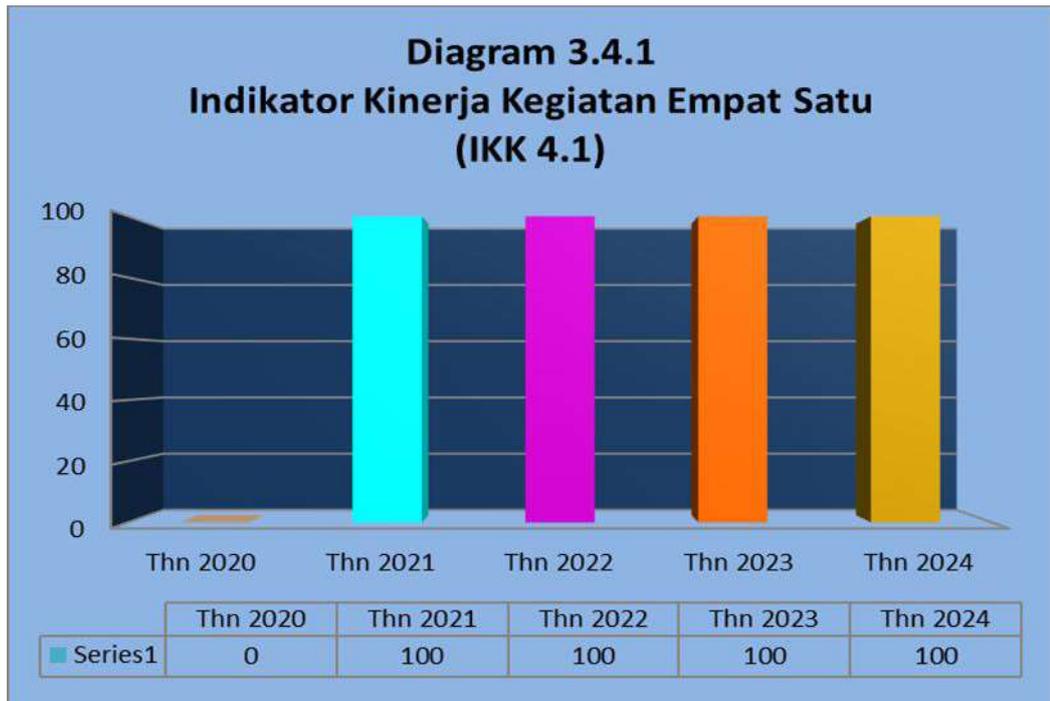
Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam mencapai tujuan organisasi. Ketersediaan dan kompetensi pegawai merupakan hal yang perlu dipenuhi agar proses kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Sasaran Keempat ini dicapai melalui Sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku serta sifat yang ditentukan oleh lingkungan kerjanya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi.

Pada sasaran strategis tahun 2024 rata-rata capaian adalah 400 sama dengan rata-rata capaian tahun 2023. Adapun Pagu semula Indikator Kegiatan ini adalah Rp 424.977.000 direvisi Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp.366,977,000 dan anggaran yang terserap Rp. 364,933,787, dengan sisa anggaran Rp.2.043,213, dengan persentase realisasi anggaran 99,44%: Pada Indikator Kinerja Diagram 3.4.1 “Penyusunan Dokumen Renstra, PK, LAKIP, LAPTAH, RKA-K/L, Data Statistik Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2024 realisasi adalah 100% (6 laporan) dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100% dengan rincian Pagu anggaran dari masing-masing kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Program (Evaluasi Renstra), pagu awal semula Rp. 78.000.000 direvisi "Automatic Adjustment" menjadi sebesar Rp. 78.000.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 77.920.200, sisa anggaran Rp 79.800 dengan persentase 99,90%
- 2) Kegiatan Perjanjian Kinerja (PK), pagu awal semula Rp. 30.000.000 direvisi "Automatic Adjustment" menjadi sebesar Rp. 23.768.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 23.768.000, sisa anggaran 0, dengan persentase 100%;
- 3) Kegiatan LAKIP (Penyusunan SAKIP), pagu awal semula Rp. 115.400.000 direvisi "Automatic Adjustment" menjadi sebesar Rp. 105.400.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 105.296.937, sisa anggaran 103.063, dengan persentase 99,90% ;
- 4) Kegiatan LAPTAH, pagu awal semula Rp. 40.000.000 direvisi "Automatic Adjustment" menjadi sebesar Rp. 32.000.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 31.999.922, sisa anggaran Rp.78, dengan persentase 100%;
- 5) Kegiatan RKA-K/L, pagu awal semula Rp. 101.312.000 direvisi "Automatic Adjustment" menjadi sebesar Rp. 91.312.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 91.311.728, sisa anggaran Rp. 272, dengan persentase 100%;
- 6) Kegiatan Metadata Statistik, pagu awal semula Rp. 60,265,000 direvisi "Automatic Adjustment" menjadi sebesar Rp.35,265,000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 34,637,000, sisa anggaran Rp. 628,000, dengan persentase 98,22%;

\*Catatan Keterangan :

Sisa anggaran di bawah Rp.1000 tidak dihitung dalam menghitung persentase realisasi anggaran.

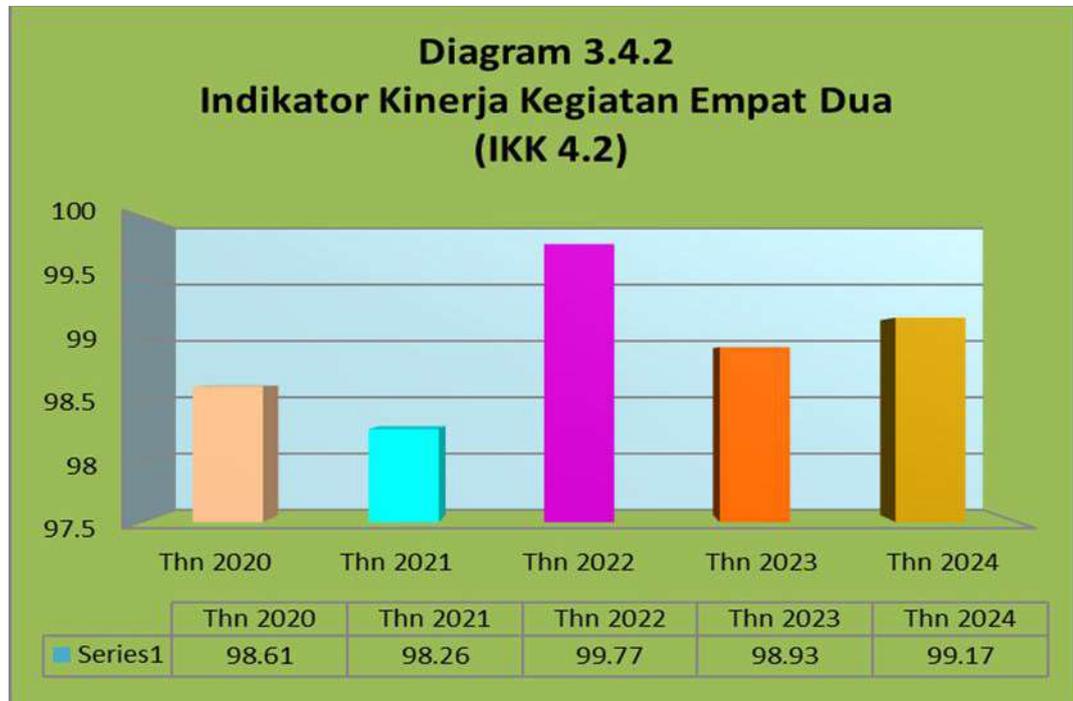


Capaian sasaran kinerja Diagram 3.4 ini adalah 6 Laporan / dokumen :

1. Dokumen Renstra Naskah Teknokratik tahun Sekretariat Jenderal Periode 2025-2029 yang telah dilaksanakan pada bulan September, Oktober dan November 2024;
2. Perjanjian Kinerja tahun 2024 ini disusun sebanyak 2x, perubahan yang ke 2 dikarenakan adanya revisi / pergeseran anggaran karena *Automatic Adjustment (AA)*;
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 telah disusun pada bulan Januari 2025 dan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK TW.I, II, III dan IV);
4. Penyusunan Laporan Tahunan 2024, telah disusun pada bulan Januari 2025;
5. Penyusunan RKA-K/L / Pagu Anggaran Mahkamah Pelayaran dilaksanakan pada awal bulan tahun berjalan Pagu Indikatif s.d Pagu difinitif 2025;
6. Laporan Rekapitulasi Data Statistik Mahkamah Pelayaran tahun 2024.

2) Pada Indikator Kinerja Diagram 3.4.2 “Persentase realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan

realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pagu anggaran semula Rp. 163.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 106.645.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 96.202.800, sisa anggaran 10.442.200 dengan persentase 90,21 %.



Tingkat penyerapan anggaran Mahkamah Pelayaran pada tahun 2024 sebesar 97%. Dari target pagu anggaran tahun 2024 dialokasikan untuk Mahkamah Pelayaran Rp. 22.172.039.000, terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp. 8,792,069,000,-
- Belanja Barang : Rp. 12,518,970,000,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 861,000,000,-

Realisasinya sebesar Rp. 21.504.437.084, dengan perincian :

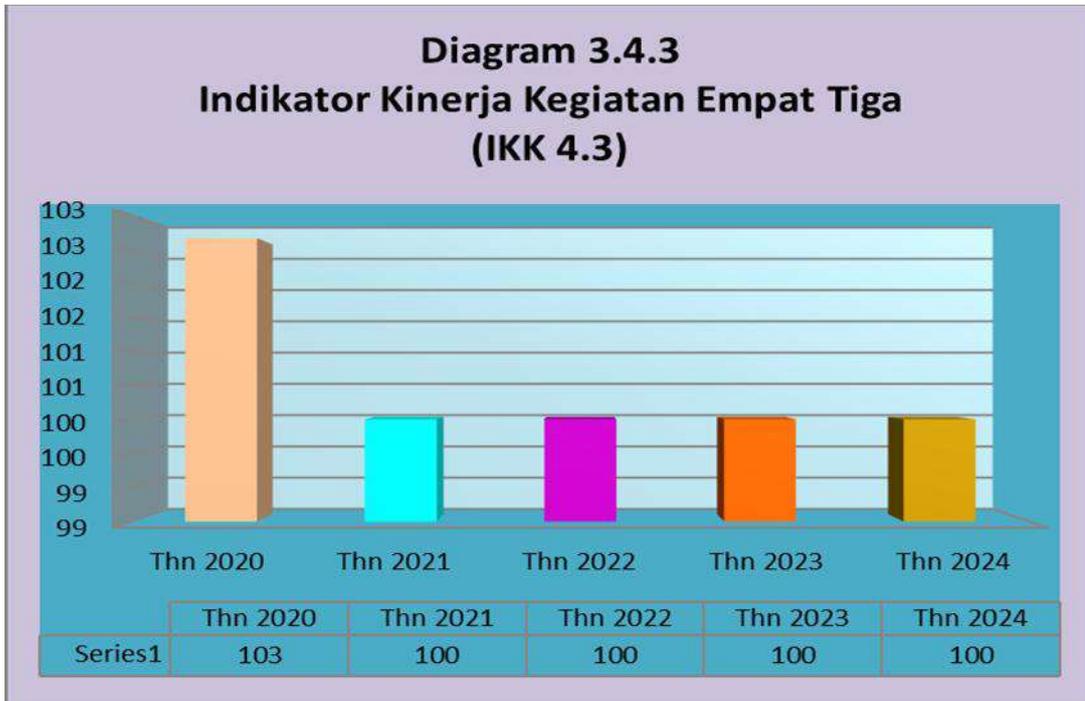
- Belanja Pegawai : Rp. 8.643.760.058,-
- Belanja Barang : Rp. 11.999.677.026,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 861.000,000,-

Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 192.934.464, dengan perincian :

- Belanja Pegawai : Rp. 148,308.942,-
- Belanja Barang : Rp. 519,292.974,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 0,-

3) Pada Indikator Kinerja Diagram 3.4.3 “Dokumen Barang Milik Negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN”. Target kinerja

tahun 2024 sebesar 2 laporan dengan realisasi 2 laporan dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pagu anggaran semula Rp. 233.198.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 223.251.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 222.010.371, sisa anggaran Rp.1,240,629 dengan persentase 99,44%.



Pada Indikator Kinerja Diagram 3.4.4 “Data Statistik Kecelakaan Kapal”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 1 (satu) laporan kegiatan dengan realisasi 1 (satu) laporan berupa buku pengumpulan Data Statistik kecelakaan kapal dengan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pagu anggaran yang semula Rp. 150.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 130.000.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 122.876.041, sisa anggaran Rp.7.123.959 dengan persentase 94,52%.

Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Kecelakaan Kapal targetnya sudah di laksanakan kunjungan 2 wilayah KSOP Semarang dan KSOP Utama Surabaya, sedangkan pada TW.III adalah 2 Daerah yaitu KSOP Kelas I Palembang Sumatera Selatan dan KSOP Kelas II Teluk Bayur Sumatera Barat dengan total 6 wilayah pengumpulan dan penyusunan data statistik, dan kegiatan yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Oktober 2024 di KSOP Kelas IV Padangbay Bali.



Salah satu komponen strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi dari program adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan yang ada merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi.

Melaksanakan penyusunan statistik kecelakaan kapal sebagai bentuk penyajian data kecelakaan kapal yang diproses oleh Mahkamah Pelayaran di tahun 2024. Sebagai indikatornya adalah jumlah laporan statistik kapal. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penyusunan data statistik kecelakaan kapal berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Pelayaran. Kegiatan ini mempunyai target capaian 1 (satu) laporan dokumen.

**d. Sasaran kelima adalah** “Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran”

Dalam upaya meningkatkan kemampuan skill dan kinerja pegawai, serta stake holder Mahkadiperlukan juga fasilitas pendukung agar dapat memadai kinerjanya. Untuk mengetahui tingkat kualitas layanan

penyelenggaraan perkantoran dapat diketahui melalui 5 (lima) Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi, workshop, bimtek, seminar & Focus Group Discussion (FGD);
- 2) Pengelolaan Kearsipan dan Surat Masuk serta Surat Keluar Sesuai Sistem Admnistrasi Perkantoran (SAP);
- 3) Pengembangan kompetensi SDM dan Peningkatan Manajemen SDM Pegawai Mahkamah Pelayaran;
- 4) Pembinaan Pegawai;
- 5) Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Evaluasi Kinerja Mahkamah Pelayaran.



- a. Kegiatan Sosialisasi, pagu awal semula Rp. 120.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 120.000.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 120.000.000, sisa anggaran Rp 0, dengan persentase 100%
- b. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD), pagu awal semula Rp. 65.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 64.210.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 64.210.000, sisa anggaran Rp.0, dengan persentase 100%



Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi pemeriksaan kecelakaan kapal Mahkamah Pelayaran dalam rangka Peningkatan Keselamatan Pelayaran, dan Focus Group Discussion (FGD) Mahkamah Pelayaran berupa :

- Penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan penguatan kelembagaan Mahkamah Pelayaran sebagai peradilan maritim saat ini dan masa depan dan sekaligus memperingati hari ulang tahun Mahkamah Pelayaran yang ke-86, di selenggarakan di ruang Aula Matraman Gedung Karya Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa, 28 Mei 2024, dengan mengambil tema “Peran Serta Mahkamah Pelayaran dalam mewujudkan *Zero Accident*”, dilaksanakan secara offline fisik dan virtual zoom meeting. Kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dibuka resmi oleh Bp Menteri Budi Karya Sumadi yang dihadiri oleh ± 210 ( dua ratus sepuluh) orang peserta, dengan target peserta semula untuk Sosialisasi 50 dan FGD 33 peserta.
- Kegiatan FGD yang selanjutnya di dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah meliputi 3 sesi kegiatan mulai dari batch 1 sampai dengan batch 3, yang pertama di laksanakan di Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Jl.Embong Malang No.25-31 Kedungdoro Kec.Tegalsari Surabaya pada tanggal 18 s.d 20 Agustus 2024, dengan pelaksanaan acara pada Senin, 19 Agustus 2024 yang di hadiri oleh Ketua Mahkamah Pelayaran. Sedangkan FGD Bach 2 berikutnya diselenggarakan pada tanggal 26 s.d 28 Agustus 2024 yang pelaksanaan

kegiatan pada tanggal 27 Agustus 2024 bertempat di Hotel *Four Point by Sheraton* Batam. Kegiatan FGD Peran Mahkamah Pelayaran Terhadap Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal di lingkungan Pelindo Batch 2 didampingi Panel Ahli selaku Narasumber Bapak Dr. Ir.Pratomo Setyohadi,M.Sc dan Bapak Yanuar Prayoga Warsadi,S.H., didampingi Sdr.Dendi Darmawansyah,S.H.

- Kegiatan FGD batch 3 yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 10.s.d 12 September 2024 berupa Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal pada unit pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Wilayah Koordinasi Jawa Timur dengan Ketua Mahkamah dan Sessmahpel selaku Narasumber Bp.Baitul Ihwan, SH., DESS,CGCAE dan R.Totok Mukarto, S.H., CN, M.Si.

1) Pada Indikator Kinerja “Pengelolaan Kearsipan dan Surat Masuk serta Surat Keluar Sesuai Sistem Admnistrasi Perkantoran (SAP)”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 85% dengan realisasi 92,66% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 109,01%. Pagu awal semula Rp. 220.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 170.000.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 170.000.000, sisa anggaran Rp. 0 dengan realisasi persentase anggaran sebesar 100%.



Pada kinerja ini semua sesuai dengan aturan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2021 tentang Tata Kearsipan di

Lingkungan Kementerian Perhubungan dan KM 41 Tahun 2021 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Perhubungan.

Adapun Capaian Kinerja Penyelenggaraan Arsip Mahkamah Pelayaran mendapatkan penilaian dari Audit Internal Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Biro Umum selaku unit Pembina Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 92,66 (Sembilan Puluh Dua Koma Enam puluh Enam) atau dengan Predikat AA adalah **Sangat Memuaskan**.

2) Pada Indikator Kinerja Diagram 3.5.3 “Pengembangan kompetensi SDM”.

Target kinerja tahun 2024 untuk kegiatan pemantapan pegawai kegiatan pengembangan kompetensi & peningkatan SDM Mahkamah Pelayaran (diklat) adalah sebesar 12 (dua belas) pegawai, dengan realisasi 10 (sepuluh) pegawai telah di beri pendidikan dan pelatihan, pada tahun 2024, dan 1 (satu) kegiatan pengembangan kapasitas pegawai / *character team building* melibatkan seluruh pegawai guna meningkatkan kekompakan dan semangat bekerja, dengan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.

Pagu anggaran dari masing-masing kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pemantapan Pegawai, pagu awal semula Rp. 55.120.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 19.381.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 19.380.588, sisa anggaran Rp. 412, dengan persentase 100%
- b. Kegiatan Pengembangan, Kompetensi & peningkatan Manajemen SDM Pegawai Mahkamah Pelayaran, pagu awal semula Rp. 183.000.000 direvisi “Automatic Adjustment” menjadi sebesar Rp. 131.746.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 131.745.537, sisa anggaran Rp. 463, dengan persentase 100%

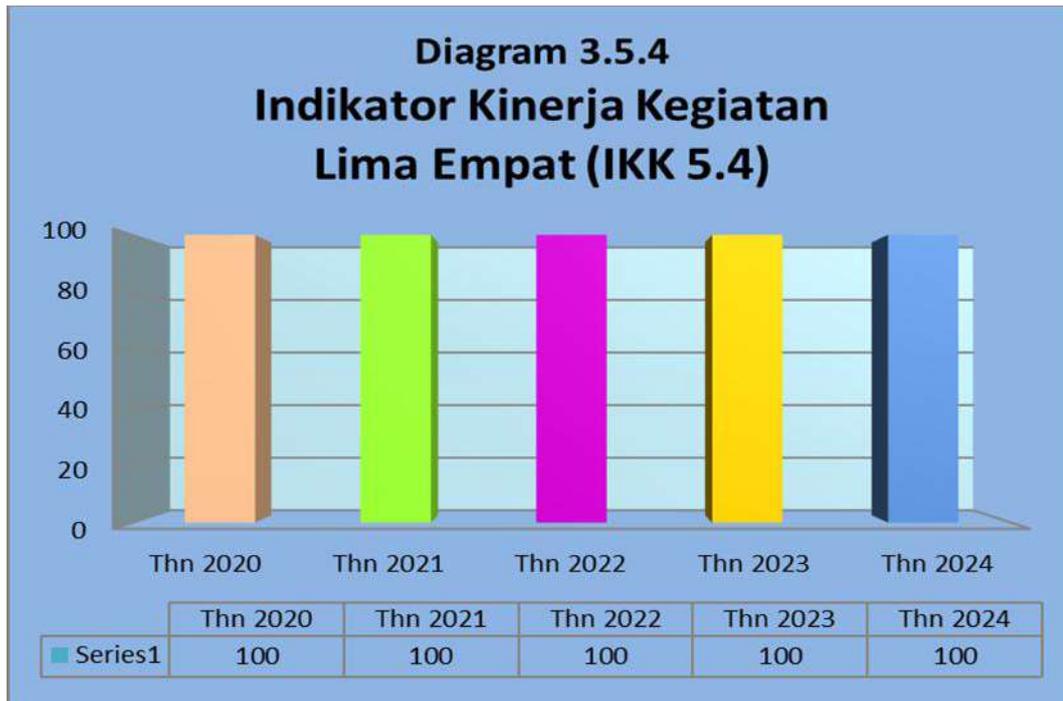


- a. Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pemicu untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi dibidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu membuat/merancang program untuk pembangunan terkhusus sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat, dalam peningkatan pelayanan baik yang bersifat internal maupun pelayanan yang bersifat eksternal. Ketika menjadi bagian dari organisasi, di institusi pemerintahan, setiap individu adalah sumber daya manusia (SDM) yang memberikan kontribusi. Untuk memberikan kontribusi terbaik, pemantapan profesi dan pengembangan diri menjadi penting. Untuk itu Pemantapan Pegawai dapat diperlukan agar etos kerja dan keahlian dari para pegawai menjadi profesional. Sejalan dengan upaya pemerintah akan mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional tentunya diperlukan pemikiran bersama. Dalam upaya itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur menjadi

prioritas utama, adalah beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain dapat melalui Pendidikan dan pelatihan, Pembelajaran langsung ditempat bekerja secara informal, maupun melalui upaya mandiri, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil. Untuk mempercepat upaya peningkatan Kompetensi bagi seorang PNS sangat mustahil kalau tidak melakukan transfer *knowledge* yang baik dan benar sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan saat ini, baik dari segi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasannya serta evaluasi.

Pengembangan kompetensi dan peningkatan manajemen pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat melalui *off the job training* dan *on the job training*. *Off the job training* yaitu pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasi dalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan pendekatan *on the job training* adalah pendekatan pelatihan yang diberikan dengan menyesuaikan metode kerja, melakukan adaptasi dengan pekerjaan, menggunakan media kerja atau alat kerja secara langsung. Dalam rangka meningkatkan pengembangan kinerja sumber daya manusia (SDM) Mahkamah Pelayaran. Subbagian Umum khususnya Bagian kepegawaian melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai Pada Aplikasi E-Kinerja Periode Januari s.d Juni 2024 pada tanggal 27 s.d 29 Juni 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, dengan Tema “ Evaluasi Kinerja Pegawai Berdasarkan Permen PANRB Nomor 06 Tahun 2022” kegiatan ini dibuka Sekretaris Mahkamah Pelayaran, diwakili Bapak Purwo Anggoro, S.E.,M.Sc. Narasumber yang dihadirkan adalah berasal dari Direktorat Kinerja ASN, Badan Kepegawaian Negara Ibu Erysa Choirunnisa selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Kinerja ASMN Badan Kepegawaian Negara dan peserta yang hadir berjumlah 19 (sembilan belas) orang.

3) Pada Indikator Kinerja “Pembinaan Pegawai”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Pagu awal semula Rp. 83.820.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 165.110.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 165.109.400, sisa anggaran Rp. 600 dengan persentase 100%.



Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) berdasarkan Surat pengajuan usulan dari Ketua Mahkamah Pelayaran Nomor KP.201/1/1/MP/2024 tanggal 5 Januari 2024 ada sebanyak 17 orang pegawai.

Untuk Tahun 2024 berdasarkan Nomor : KP.005/03/I/MP.2023 tanggal 18 Januari 2024 perihal usulan Tanda Kehormatan Presiden RI, ada 2 (dua) pegawai yang mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Satya antara lain :

1. Dendi Darmawansyah, S.H. (Jabatan Penyusun Bahan Evaluasi Kecelakaan Kapal)
2. Yuniarto (Jabatan Pengelola Kerumahtangaan)

Selanjutnya dilihat dari kebutuhan akan kekurangan pegawai, telah diusulkan melalui aplikasi e-formasi baik itu CPNS maupun PPPK yang di terima oleh Biro SDM dan Organisasi, kemudian di saring oleh Kemenpan RB. Pada tahun 2024, Mahkamah Pelayaran Menerima 2 (dua) orang PPPK yaitu Sdr. Rendy Januar, S.Sos dan Sdri. Ai Latifah.

4) Pada Indikator Kinerja “Pembinaan Administrasi Kepegawaian”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%. Ada 2 (dua) kegiatan dalam Indikator ini, kegiatan Administrasi Kepegawaian, Mahkamah Pelayaran Pagu awal semula Rp.152.600.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 8.736.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 8.736.000, sisa anggaran Rp. 0 dengan persentase 100%. Sedangkan Kegiatan ke dua yakni Evaluasi Kinerja Panel Ahli Mahkamah Pelayaran Pagu awal semula Rp. 60.000.000 direvisi menjadi sebesar Rp. 93.331.000 dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 93.330.810, sisa anggaran Rp. 190 dengan persentase 100%.



Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Panel Ahli Tahun 2024 bertujuan untuk mengukur kinerja masing-masing Anggota Panel Ahli dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjanya. Tahapan penilaian kinerja Panel Ahli yang diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2024 di Kantor Mahpel Jakarta, di buka oleh Bapak Baitul Ihwan, S.H., DESS, CGCAE dengan perihal Evaluasi Pelaksanaan kegiatan persiapan evaluasi penilaian Kinerja Panel Ahli Periode Januari s.d Desember 2024. Output kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi kinerja Anggota Panel Ahli dan adanya kesepakatan penambahan

terhadap Anggota Panel Ahli sebanyak 9 orang Anggota Panel Ahli pada tahun 2024.

Untuk Tahun 2024 Mahkamah Pelayaran mendapatkan 1 orang pegawai dari mutasi perpindahan dari Balai Pengelola Transportasi Kelas II Sumatera Barat Direktorat Perhubungan Darat atas nama Sdr. Muhamad Widiyantoro,S.Tr.

Untuk Kenaikan Pangkat pada Mahkamah Pelayaran sejumlah 3 (tiga) orang pegawai telah mengalami Kenaikan Pangkat per 1 Februari 2024 berdasarkan surat usulan Nomor KP.302/1/1/MP/2024 tanggal 02 Januari 2024, atas nama Sdri. Adinda Yuliantika, A.P.Kb.N, sedangkan Surat Nomor KP.302/1/4/MP/2024 tanggal 29 Mei 2024 mengusulkan Kenaikan Pangkat atas nama Sdr. Taufan Isharmawan, SH,M.M.Tr, untuk Kenaikan Pangkat periode tmt 1 Agustus 2024 dan Sedangkan usulan Kenaikan Pangkat periode tmt 1 Oktober 2024 dengan surat Usulan Ketua Mahkamah Pelayaran Nomor : KP.302/1/6/MP/2024 tanggal 05 Agustus atas nama Sdr.Stanly Runtulalo, S.T., M.A., C.FR.A, Dwi Amalia,S.E., dan Sdri. Mumpuni Nukiasari, A.Md sedangkan usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) berdasarkan usulan surat Ketua Mahkamah Pelayaran Nomor KP.201/1/1/MP/2024 tanggal 5 Januari 2024 ada sebanyak 17 orang pegawai, disamping itu unit kepegawaian juga melakukan rapat dengan Biro SDMO berkaitan kegiatan Penyusunan Data Base Kepegawaian, E-Kinerja, Penyusunan Peta Pegawai, Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Pegawai serta penyusunan kebutuhan pegawai / usulan formasi pegawai di lingkungan Sekretariat Mahkamah Pelayaran.

## V. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu komponen yang sangat berperan penting dalam berjalannya suatu organisasi. Pada akhir tahun 2024, Mahkamah Pelayaran tercatat memiliki pegawai sebanyak 65 (enam puluh lima) orang pegawai. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek yang cukup penting dalam sebuah organisasi, oleh karena itu fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia mesti dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan organisasi ataupun kelembagaan dapat tercapai. Disamping itu dengan pengelolaan dan penataan sumber daya manusia yang baik diharapkan kekurangan SDM dihadapi Mahkamah Pelayaran dapat di atasi melalui seleksi penerimaan Formasi CPNS dan melalui perpindahan (mutasi) pegawai dari unit kerja lain.

**Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Mahkamah Pelayaran Tahun 2024**

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil Negara	32
2.	Panel Ahli	11
3	PPPK	2
4.	Tenaga Kontrak :	
	a.Pengadministrasi Umum	4
	b.Satpam	7
	c.Pramubakti	1
	d.Pengemudi	2
	e.Petugas kebersihan	6
	Jumlah	65

Sumber : Data Unit Kepegawaian tanggal 31 Desember 2024

Walaupun dengan SDM yang terbatas Mahkamah Pelayaran berhasil dalam pencapaian kinerja dengan meningkatnya jumlah keputusan Mahkamah Pelayaran yang di hasilkan yang semula di tahun 2023 hanya 17 Keputusan dan ditahun 2024 menjadi 26 jumlah keputusan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan SDM Mahkamah Pelayaran berupa :

- a. Mengikutkan para pegawai Bimbingan Teknis baik online maupun offline
- b. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi berupa hadiah bingkisan dan perjalanan dinas.
- c. Melakukan rotasi dan mutasi agar pegawai refresh tidak jenuh disuatu bidang pekerjaan / tugas saja;
- d. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai melakukan benchmarking ke Pemkot Bandung dan Pemerintahan khusus DI Jokjakarta;
- e. Untuk efektif dan efisien dalam hal peanggaran dan penanganan kasus pemeriksaan kecelakaan kapal, melibatkan pegawai dalam melaksanakan sidang ke daerah untuk 2 (dua) kasus sekaligus;
- f. Pimpinan memberikan arahan, motivasi dan melakukan Evaluasi terhadap tugas-tugas dan kerja yang telah dilakukan pegawai dalam setiap apel pagi;
- g. Mengantisipasi kekurangan anggota Panel Ahli dengan melakukan rapat persiapan untuk proses rekrutmen anggota Panel Ahli Mahkamah;
- h. Dengan adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, untuk mengantisipasi kekurangannya dengan menyusun kembali Formasi kebutuhan pegawai jabatan fungsional tertentu;
- i. Mengusulkan 3 (tiga) orang pegawai PPNP menjadi pegawai PPPK;
- j. Meningkatkan disiplin pegawai dengan menggunakan absensi biometrik;
- k. Untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta sharing kegiatan, Mahkamah Pelayaran menyelenggarakan Coffee Morning dengan Unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- l. Memanfaatkan teknologi dan menyederhanakan proses pekerjaan.
- m. Menciptakan lingkungan yang asri dan bersih serta menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana pegawai sehingga pegawai semangat dan betah bekerja;
- n. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat healing refreshing seperti *outing* diluar kantor untuk memupuk kerjasama team dan kekompakan pegawai.

## 2. Sumber Daya Keuangan dan Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Kementerian Perhubungan Tahun 2024, maka Anggaran APBN Kementerian Perhubungan yang dialokasikan untuk Mahkamah Pelayaran sebesar Rp. 22,172,039,000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 8,792,069,000,-
- Belanja Barang : Rp. 12,518,970,000,-
- Belanja Modal : Rp. 861,000,000,-

Penyerapan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 21,504,437,084 atau sebesar 97% dengan rincian perbelanjaan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 8,643,760,058,-
- Belanja Barang : Rp. 11,999,677,026,-
- Belanja Modal : Rp. 861,000,000,-

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2024 dapat diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum_{j=1}^2 RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3. Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2024 perbulan**

NO.	BULAN	RPD	REALISASI ANGGARAN	TK (TINGKAT PENYERAPAN)
1	Januari	479.372.000	479,371,676	100,00%
2	Februari	733.318.000	736,710,424	100,46%
3	Maret	2.318.025.000	2,316,317,354	99,93%
4	April	2.004.016.000	2,012,015,538	100,40%
5	Mei	2.348.408.000	2,340,408,397	99,66%
6	Juni	1.715.859.000	1,715,859,095	100,00%

7	Juli	2.151.667.000	2,162,881,191	100,52%
8	Agustus	1.521.819.000	1,490,540,677	97,94%
9	September	2.309.183.000	2,289,592,509	99,15%
10	Oktober	1.304.168.000	1,256,872,559	96,37%
11	November	1.836.608.000	1,584,844,674	86,29%
12	Desember	3.449.598.000	3,119,022,990	90,42%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\sum_{j=1}^i RAbulankej}{\sum_{j=1}^i RPDbulankej} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus di atas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$K = \frac{(100\%+100\%+99,93\%+100+99,66\%+100\%+100\%+97,94\%+99,15\%+96,37\%+86,29\%+90,42\%)}{12}$$

$$K = 96,99\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2024 sebesar 96,99%.

**Tabel 3.4. Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75	100	133,33	150,000,000	149.788.556	99,86	
		2) Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	100	100	1,202,479,000	1,202,478,379	100	
		3) Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Indeks	3,04	3,382	111,25	55,000,000	54,143,298	98,44	
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>					<b>233,33</b>			<b>199,86</b>		
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	4) Pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100	79,267,000	79,266,343	100	
		5) Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area perubahan	%	100	100	100	43,370,000	43,369,500	100	
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>					<b>200</b>			<b>200</b>		
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum di Mahkamah Pelayaran	5) Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1	1	100	0	0	100	
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>					<b>100</b>			<b>100</b>		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	6) Penyusunan dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH dan Data Statistik Mahkamah Pelayaran	Dokumen	6	6	100	366.977.000	364.933.787	99,44
		7) Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100	106.645.000	96.202.800	90,21
		8) Barang Milik Negara yang tercatat / terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100	100	100	223,251,000	222,010,371	99,44
		9) Data statistik kecelakaan kapal	%	100	100	100	130.000.000	122.876.041	94,52
<b>'Rata-Rata Capaian Sasaran</b>						<b>400</b>	<b>383,61</b>		
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran	10) Sosialisasi Bimteks/Seminar/Workshop/ Focus Group Discussion (FGD)	Jumlah Peserta	88	207	238,63	184,210,000	184,210,000	238,63
		11) Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	%	85	92,66	109,01	170,000,000	170,000,000	100
		12) Pengembangan kompetensi SDM dan peningkatan Manajemen SDM Mahkamah Pelayaran dan Pemantapan Pegawai	%	100	83,33	83,33	151,127,000	151,126,125	100
		13) Pembinaan Pegawai	%	100	100	100	165.110.000	165.109.400	100
		13) Pembinaan Admnistrasi Kepegawaian dan Evaluasi Kinerja Panel Ahli Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100	102,067,000	102,067,810	100
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>						<b>630,97</b>	<b>638,63</b>		

## B. Realisasi Anggaran

### 1) Pagu Anggaran

Pagu awal Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Mahkamah Pelayaran sebesar **Rp. 22,172,039,000,-** dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 8,792,069,000,-
- Belanja Barang : Rp. 12,518,970,000,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 861,000,000,-

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 telah di Revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Matriks Revisi Anggaran 2024**

No	Revisi Ke-	Pagu Awal	Pagu Akhir	Keterangan
1	DIPA AWAL	20.798.354.000		Tanggal 24 November 2023
2	Revisi I		20.798.354.000	Tanggal 25 Januari 2024
3	Revisi II		20.798.354.000	Tanggal 19 Februari 2024
4	Revisi III		20.798.354.000	Tanggal 24 April 2024
5	Revisi IV		22.172.039.000	Tanggal 16 Mei 2024
6	Revisi V		22.172.039.000	Tanggal 11 Juli 2024
7	Revisi VI		22.172.039.000	Tanggal 14 Oktober 2024
8	Revisi VII		22.172.039.000	Tanggal 18 November 2024
9	Revisi VIII		22.172.039.000	Tanggal 02 Desember 2024
10	Revisi IX		22.172.039.000	Tanggal 10 Desember 2024

**Tabel 3.6. Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2022 - 2024**

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pemotongan/ Penambahan	Total
1	2022	18.882.199.000	(1.394.269.000)	17.487.930.000
2	2023	18.940.420.000	(940.000.000)	18.000.420.000
3	2024	20.798.354.000	1.373.685.000	22.172.039.000

**Gambar 3.6. Grafik Perkembangan Pagu Tahun 2022 – 2024**



**2) Realisasi Daya Serap Keuangan**

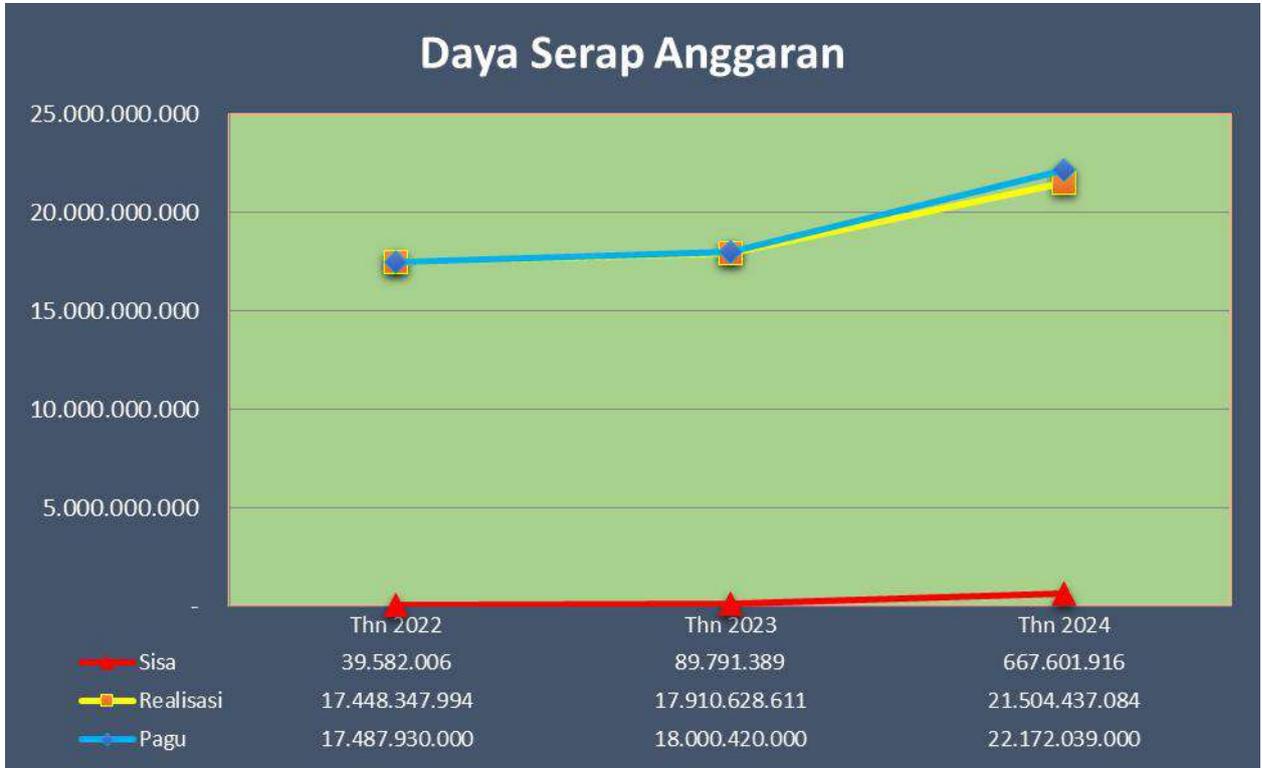
Realisasi daya serap dapat disajikan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2022 – 2024 seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.7. Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi		% Fisik	Sisa Yang Tidak Terealisasi	
		Rupiah	%		Rupiah	% Keu
2022	17.487.930.000	17.448.347.994	99,77	100	39.582.006	0,23
2023	18.000.420.000	17.910.628.611	99,50	100	89.791.389	0,50
2024	22.172.039.000	21,504,437,084	97,50	100	667.601.916	2,50

Catatan : Data s.d Bulan 31 Des 2024

**Gambar 3.7. Daya Serap Anggaran Keuangan**



**3) Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap**

**a) Belanja Pegawai**

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2024 Mahkamah Pelayaran Tahun 2024 sebesar Rp. 56.709.221,-, dengan detail sebagai berikut :

**Tabel 3.8. Dana Belanja Pegawai Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap**

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
<b>1965.994.001</b>				
511111	1,763,010,000	1,706,121,000	56,889,000	96.77%
511119	29,000	28,554	446	98.46%
511121	121,093,000	121,092,860	140	100%
511122	28,381,000	28,380,684	316	100%

511123	77,720,000	77,720,000	0	100%
511124	30,476,000	30,476,000	0	100%
511125	17,431,000	17,430,553	447	100%
511126	79,590,000	79,589,580	420	100%
511129	199,951,000	196,305,000	3,646,000	98.18%
511151	63,995,000	63,995,000	0	100%
511519	4,252,753,000	4,252,752,400	600	100.00%
511611	90,488,000	90,487,300	700	100 %
511619	2,000	1,288	712	64.40%
511621	9,049,000	9,048,730	270	100%
511622	2,767,000	2,766,084	916	99.97 %
511624	13,500,000	13,500,000	0	100%
511625	7,605,000	7,604,100	900	99.99 %
511628	13,341,000	12,874,000	467,000	96.50 %
512211	400,000,000	342,192,000	57,808,000	85.55 %
512212	24,244,000	20,085,000	4,159,000	82.85 %
512411	1,596,644,000	1,571,310,191	25,333,809	98.41 %
<b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.899.971.000</b>	<b>6.843.261.779</b>	<b>56.709.221</b>	<b>99,18 %</b>

#### b) Belanja Barang

Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2024 Mahkamah Pelayaran Tahun 2024 sebesar Rp 32,558,864,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.9. Dana Belanja Barang Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap**

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
<b>BELANJA BARANG</b>				
521111	2.074.186.000	2.066.795.350	7390650	99,50
521114	8863000	8862500	500	99,99
521115	77256000	76.856.000	400	99,48
521119	29000	28554	446	99,46
521211	720148000	720144360	3640	100
521213				

521811				
523111				
523121				
524111				
524113				
524114				
524119				
<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>				

**c) Belanja Modal**

Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2024 Mahkamah Pelayaran Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.10. Dana Belanja Modal Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap**

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
<b>BELANJA MODAL</b>				
533121	861.000.000	861.000.000	0	100%
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>861.000.000</b>	<b>861.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

**Tabel 3.11. Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan**

Kode/ Nama Kegiatan	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
1932 Legislasi dan Litigasi	108,940,000	108,918,300	21,700	99,98%
1933 Pengelolaan Organisasi dan SDM	1,139,299,000	1,132,170,879	7,128,121	99,37%
1938 Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	1,987,575,000	1,980,811,352	6,763,648	99,66%
1941 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	723,816,000	721,911,328	1,904,672	99,74%

<b>4657 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum</b>	14,040,790,000	13,966,816,752	73,973,248	99.47%
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>18,000,420,000</b>	<b>17,910,628,611</b>	<b>89,791,389</b>	<b>99.50%</b>

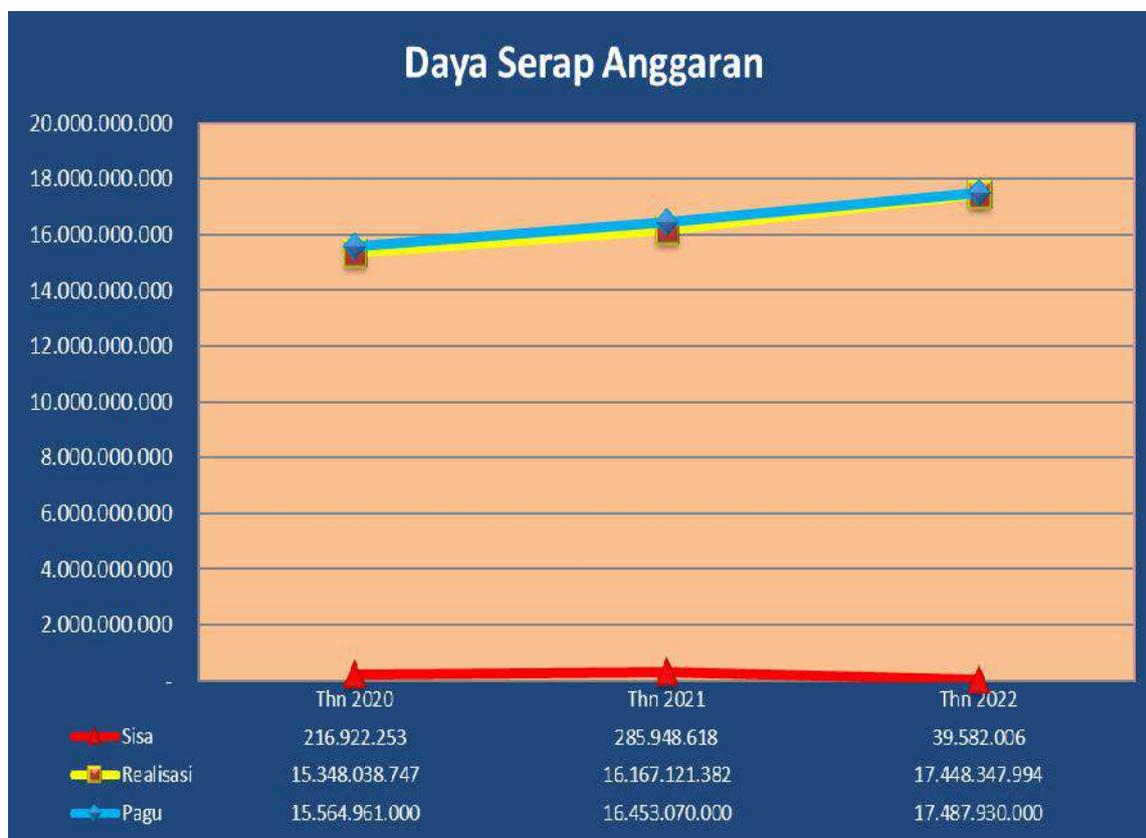
**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**UAKPB : 412622 MAHKAMAH PELAYARAN**

Tgl.Data : 29/01/24 12:00 PM  
Tgl.Cetak : 29/01/24 12:38 PM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	46,661,959
131111	Tanah	54,746,028,500
132111	Peralatan dan Mesin	18,038,670,765
133111	Gedung dan Bangunan	9,452,288,712
134111	Jalan dan Jembatan	44,453,000
134112	Irigasi	60,219,000
134113	Jaringan	1,913,600,000
135121	Aset Tetap Lainnya	640,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17,300,669,867)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,231,843,218)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(40,411,819)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(9,712,740)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(550,445,000)
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	198,290,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2,311,087,407
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,140,808,739)
<b>J U M L A H</b>		<b>65,538,047,960</b>

**Gambar 3.7. Daya Serap Anggaran Keuangan**



**4) Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap**

**a). Belanja Pegawai**

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2023 Mahkamah Pelayaran Tahun 2023 sebesar Rp. 56.709.221,-, dengan detail sebagai berikut :

**Tabel 3.8. Dana Belanja Pegawai Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap**

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
<b>1965.994.001</b>				
511111	1.610.000.000	1.609.572.860	427.140	99,97 %
511119	26.000	25.748	252	99,03 %
511121	107.000.000	106.704.140	295.860	99,72 %
511122	30.000.000	29.171.822	828.178	97,24 %

511123	85.000.000	84.220.000	780.000	99,08 %
511124	60.000.000	59.376.000	624.000	98,96 %
511125	10.000.000	9.585.870	414.130	95,86 %
511126	83.000.000	82.703.640	296.360	99,64 %
511129	216.000.000	189.250.000	26.750.000	87,62 %
511151	65.000.000	64.910.000	90.000	99,86 %
511519	4.458.945.000	4.432.745.750	26.199.250	99,41 %
512411	175.000.000	174.995.949	4.051	100,00 %
<b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.899.971.000</b>	<b>6.843.261.779</b>	<b>56.709.221</b>	<b>99,18 %</b>

### c) Belanja Barang

Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2023 Mahkamah Pelayaran Tahun 2023 sebesar Rp 32,558,864,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.9. Dana Belanja Barang Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap**

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
<b>BELANJA BARANG</b>				
521111	1.875.724.000	1.870.277.161	5.446.839	99,71
521114	23.195.000	20.508.500	2.686.500	88,42
521115	157.460.000	157.460.000	0	100
521119	9.505.000	9.500.000	5.000	99,95
521211	588.349.000	581.986.613	6.362.387	98,92
521213	55.060.000	54.060.000	1.000.000	98,18
521811	347.282.000	347.189.468	92.532	99,97
523111	1.121.404.000	1.120.985.119	418.881	99,96
523121	1.487.140.000	1.486.491.200	648.800	99,96
524111	3.031.625.000	3.019.523.371	3.019.523.371	99,60
524113	123.294.000	123.030.000	264.000	99,79
524114	1.066.422.000	1.065.027.400	1.394.600	99,87
524119	605.768.000	603.630.304	2.137.696	99,65
<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>10.492.228.000</b>	<b>10.459.669.136</b>	<b>32.558.864</b>	<b>99,69%</b>

### c) Belanja Modal

Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2023 Mahkamah Pelayaran Tahun 2023 sebesar Rp. 521.751,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.10. Dana Belanja Modal Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap**

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
<b>BELANJA MODAL</b>				
533121	608.221.000	607.699.249	521.751	99,91%
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>608.221.000</b>	<b>607.699.249</b>	<b>521.751</b>	<b>99,91%</b>

**Tabel 3.11. Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan**

Kode/ Nama Kegiatan	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
1932 Legislasi dan Litigasi	108,940,000	108,918,300	21,700	99,98%
1933 Pengelolaan Organisasi dan SDM	1,139,299,000	1,132,170,879	7,128,121	99,37%
1938 Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	1,987,575,000	1,980,811,352	6,763,648	99,66%
1941 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	723,816,000	721,911,328	1,904,672	99,74%
4657 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	14,040,790,000	13,966,816,752	73,973,248	99,47%
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>18,000,420,000</b>	<b>17,910,628,611</b>	<b>89,791,389</b>	<b>99,50%</b>



## A. KESIMPULAN

1. Penyusunan laporan kinerja Mahkamah Pelayaran dilakukan dan disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Nilai capaian kinerja sasaran program dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Pelayaran selama periode tahun anggaran 2024 mencapai 133,33%, sedangkan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program tersebut adalah sebesar 100% dari alokasi anggaran. Capaian kinerja secara garis besar sebagai berikut :
  - a. **Sasaran pertama adalah “Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi”**
    - 1) Pada Indikator Kinerja “Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 75%, dengan realisasi kinerja 100% dengan capaian kinerja adalah sebesar 133,33%;

- 2) Pada Indikator Kinerja “Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 100% dan capaian kinerja 100%.
- b. Sasaran kedua adalah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”**
- 1) Pada Indikator Kinerja “Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran” Target kinerja tahun 2024 sebesar 3.04 dengan realisasi adalah sebesar 3.382 dan capaian kinerja 111,25%.
  - 2) Pada Indikator Kinerja “Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran” Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 100% dan capaian kinerja 100%;
  - 3) Pada Indikator Kinerja “Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan” Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 100% dan capaian kinerja 100%;
- c. Sasaran ketiga adalah “Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum di Mahkamah Pelayaran”**
- 4) Pada Indikator Kinerja “Regulasi Hukum Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 1 Peraturan dengan realisasi 1 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.
- d. Sasaran keempat adalah “Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran”**
- 5) Pada Indikator Kinerja “Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, LAPTAH, RKA-K/L dan Data Statistik Mahkamah Pelayaran.”. Target kinerja tahun 2024 adalah 100% dimana target ada 6 (enam) laporan dengan realisasi 100% sejumlah 6 (enam) laporan dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
  - 6) Pada Indikator Kinerja “Pengelolaan Keuangan Mahkamah Pelayaran”. Dengan ”kegiatan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Mhkamah Pelayaran” Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;

- 7) Pada Indikator Kinerja “Barang Milik Negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 2 (dua) laporan BMN dengan realisasi 2 (dua) laporan BMN ( laporan semester dan laporan tahunan BMN) dengan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
- 8) Pada Indikator Kinerja “Data Statistik Kecelakaan Kapal”. Target kinerja tahun 2024 adalah 100% berupa 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen laporan pengumpulan / pencarian data statistik Mahkamah Pelayaran dengan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.

**e. Sasaran kelima adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Perkantoran”**

- 9) Pada Indikator Kinerja “Kegiatan Sosialisasi /bimbingan teknis,/seminar/workshop dan Focus Group Discussion (FGD” Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% (88 peserta), dengan realisasi (210 peserta) dengan capaian persentase realisasi kinerja adalah sebesar 238,63%;
- 10) Pada Indikator Kinerja “Pengelolaan Kerasipan dan Surat Masuk serta Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 85% dengan realisasi 92,66% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 109,01%;
- 11) Pada Indikator Kinerja “Pengembangan kompetensi SDM dan Peningkatan Manajemen SDM Pegawai Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 83,33%;
- 12) Pada Indikator Kinerja “Pembinaan Pegawai”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
- 13) Pada Indikator Kinerja “Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Evaluasi Kinerja Panel Ahli Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%

Gambar 4. Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024



Dengan demikian sesuai kriteria keberhasilan dapat dikatakan Unit Kerja Mahkamah Pelayaran telah berhasil dalam mencapai kinerjanya. Karena hampir seluruh sasaran dapat dilaksanakan melebihi dari target awal yang telah ditentukan.

## B. SARAN & REKOMENDASI

**Beberapa hal yang direkomendasikan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2024 sebagai berikut :**

1. Melakukan evaluasi IKU Mahkamah Pelayaran “Tingkat Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran”, perlu upaya yang lebih intensif agar terus melakukan koordinasi peningkatan kerjasama dengan internal Kementerian Perhubungan seperti Ditkapel, KSOP Utama, KSOP serta KUPP, KPLP.
2. Kerjasama dengan stake holder dan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan, mengingat berbagai pencapaian target indikator memerlukan keterlibatan dan peran aktif dari berbagai pihak baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, *civil society* maupun

- Aparat Penegak Hukum/APH seperti Mahkamah Agung, INSA, PELINDO, Perusahaan-perusahaan pelayaran, Universitas, dan lain-lain;
3. SDM yang dimiliki oleh Mahkamah Pelayaran masih kurang untuk kontribusi tertentu seperti untuk Tenaga Panel Ahli terutama dari unsur PNS dan Non PNS, kendalanya adanya anggota Tim Panel Ahli yang memasuki masa purnabhakti (pensiun) dan mengundurkan diri, sehingga perlu adanya rekrutmen Panel Ahli dari unsur Non PNS dan PNS guna menunjang kinerja Mahkamah Pelayaran.
  4. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran berimplikasi perluasan kewenangan Mahkamah Pelayaran sehingga perlu penguatan kewenangan dan penataan kembali kelembagaan Mahkamah Pelayaran;
  5. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Pelayaran dibidang Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, sehingga Mahkamah Pelayaran perlu kiranya memperkuat kewenangan Mahkamah Pelayaran sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai bentuk kesiapan Mahkamah Pelayaran dalam menghadapi tantangan tugas di masa mendatang seperti menyusun revisi perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2019, merevisi Nomor PM 6 tahun 2020 dan Nomor PM 30 Tahun 2022 tentang Tata cara Pemeriksaan kecelakaan kapal, menyusun Master Plan Mahkamah Pelayaran, dan lain-lain;
  6. Perlunya peningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui Diklat/Pelatihan-pelatihan, sehingga kinerja SDM Mahkamah Pelayaran dalam bekerja mengalami peningkatan;
  7. Sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran belum memadai, telah dilakukan renovasi ruang sidang, ruang rapat-rapat/ pengembangan gedung kantor serta ketersediaan alat-alat penunjang pekerjaan kantor seperti PC, Laptop, Printer, Proyektor, alat Perekam, dan lain-lain;

8. Upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang;
9. Instrumen manajemen risiko perlu diterapkan untuk menjaga setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja dan sasaran diidentifikasi dan dimitigasi sehingga berada dalam level yang dapat diterima manajemen sepanjang tahun 2024;
10. Perlu koordinasi dengan instansi Kemenhub pusat untuk menyampaikan kendala dalam peningkatan profesionalisme bagi para anggota panel ahli, para pegawai, pejabat struktural maupun pejabat fungsional terutama dalam hal penyusunan peraturan, proses bisnis maupun SOP, yaitu :
  - a. Memberikan pelatihan yang selaras dengan tantangan tugas maupun perkembangan teknologi terutama dalam hal perkembangan sistem aplikasi informasi berbasis teknologi dan layanan SPBE;
  - b. Meningkatkan metode dan kualitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Mahkamah Pelayaran;
  - c. Melakukan percepatan penanganan kasus pemeriksaan kecelakaan kapal melalui penetapan lokus (tempat kejadian), 2 perkara kecelakaan kapal yang dapat diselesaikan dalam 1 tempat (lokus);
  - d. Meningkatkan sosialisasi dan inovasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan website Mahkamah Pelayaran oleh masyarakat.
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi kepada Masyarakat melalui media cetak dan media elektronik, terlaksananya forum tatap muka dengan insan komunikasi.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2024;

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;

Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;

Lampiran 4 Rencana Aksi Tahun 2024;

## 1. Data-data Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal

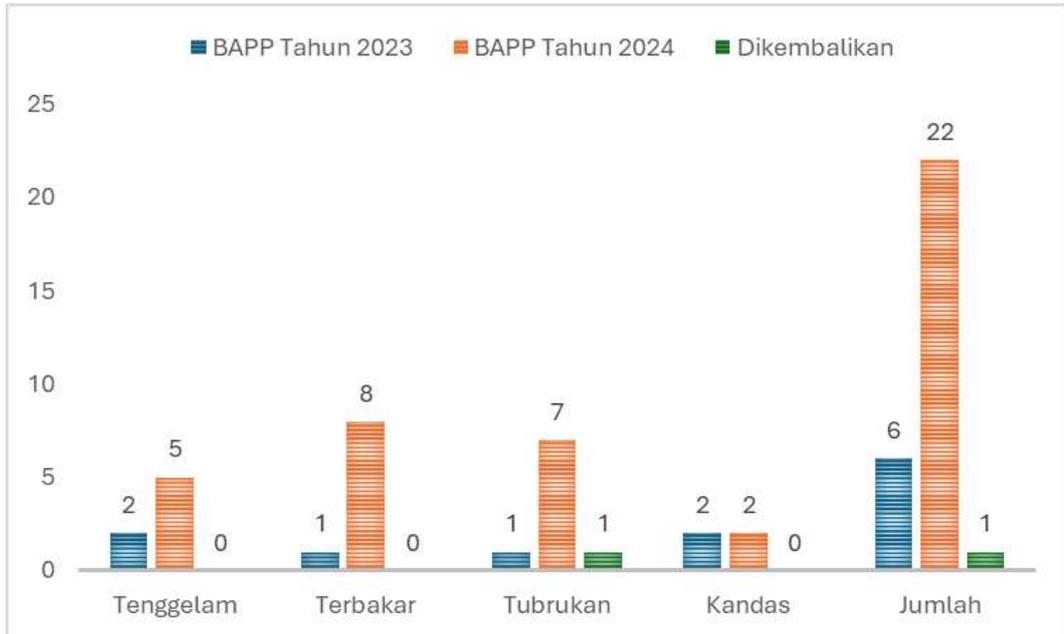
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, pada Bab I Pasal 18 ayat (2) bahwa selain melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal kepada Menteri Perhubungan, Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri melaporkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal kepada Mahkamah Pelayaran dalam hal ditemukan keterangan atau bukti awal mengenai dugaan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal atas terjadinya Kecelakaan Kapal. Adapun Pelimpahan berkas BAPP tahun 2023 adalah 6 berkas. Berkas BAPP yang diterima tahun 2024 adalah 23 berkas. Terdapat 29 Berkas BAPP untuk di proses penyelesaiannya dengan rincian sebagaimana Tabel 1.1. dan Grafik 1.1, yang terdiri dari:

- 7 (Tujuh) kapal tenggelam;
- 9 (sembilan) kasus kapal terbakar;
- 9 (sembilan) kasus kapal tubrukan;
- 4 (empat) kasus kapal kandas.

**Tabel 1.1 Berkas BAPP Kecelakaan Kapal Pelimpahan berkas Kecelakaan Kapal dari tahun 2023 dan berkas Kecelakaan Kapal yang diterima tahun 2024**

No.	Uraian	BAPP Tahun 2023	BAPP Tahun 2024	Dikembalikan	Total
1	Tenggelam	2	5	0	7
2	Terbakar	1	8	0	9
3	Tubrukan	1	7	1	9
4	Kandas	2	2	0	4
5	<b>Jumlah</b>	6	22	1	29

**Grafik 1.1 Jumlah BAPP Tahun 2023 dan 2024**

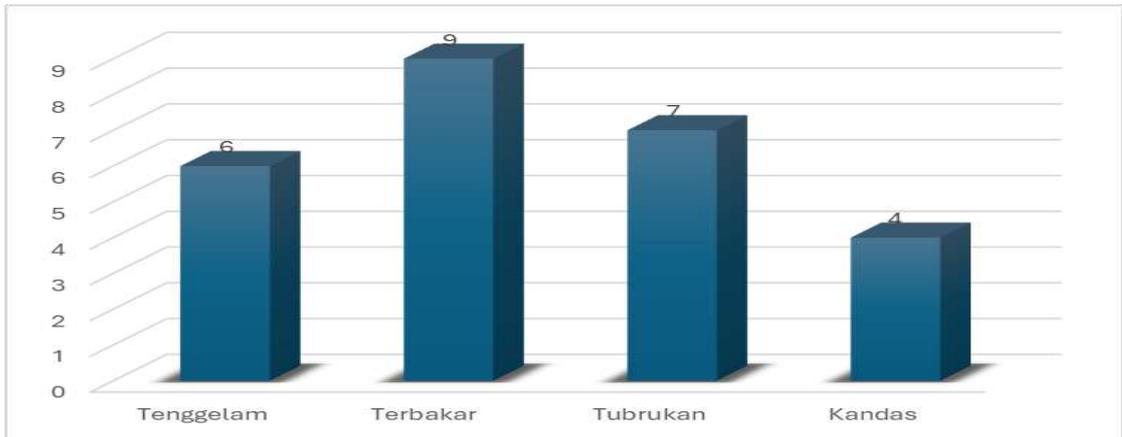


Selama tahun 2024 Mahkamah Pelayaran telah menyelesaikan berkas perkara Kecelakaan Kapal sebanyak 26 (dua puluh enam) Keputusan Mahkamah Pelayaran terdiri dari: 6 (enam) kasus kapal tenggelam, 9 (sembilan) kasus terbakar, 7 (Tujuh) kasus kapal tubrukan dan 4 (empat) kasus kapal kandas. Selanjutnya 2 (dua) berkas BAPP kecelakaan kapal dilimpahkan tahun 2025, dengan rincian sebagaimana Tabel 1.2 dan Grafik 1.2 di bawah.

**Tabel 1.2 Berkas BAPP Kecelakaan Kapal yang diputus Pada Mahkamah Pelayaran Tahun 2024**

No.	Uraian	Jumlah	Dilimpahkan Tahun 2025	Total
1	Tenggelam	6	1	7
2	Terbakar	9	-	9
3	Tubrukan	7	1	8
4	Kandas	4	-	4
5	Jumlah	26	2	28

**Grafik 1.2 Keputusan Mahkamah Pelayaran Tahun 2024**

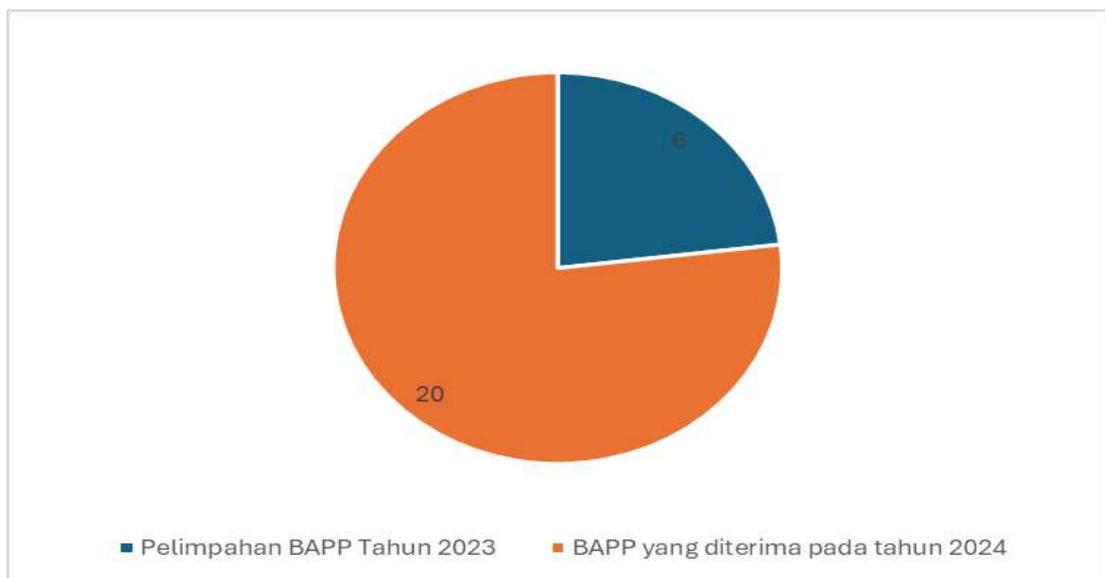


Rekapitulasi penyelesaian berkas BAPP seperti rincian pada Tabel 2.3 dengan persentase 77% BAPP tahun 2024 dan 23% BAPP tahun 2023 seperti Tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel 1.3 Rekapitulasi Penyelesaian Berkas BAPP**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pelimpahan BAPP Tahun 2023	6	Sebanyak 6 berkas pelimpahan BAPP tahun 2023
2	BAPP yang diterima pada tahun 2024	20	2 berkas akan di diselesaikan pada tahun 2025
3	Total BAPP	26	-

**Diagram 1.1 Rekapitulasi Penyelesaian berkas BAPP Tahun 2024**

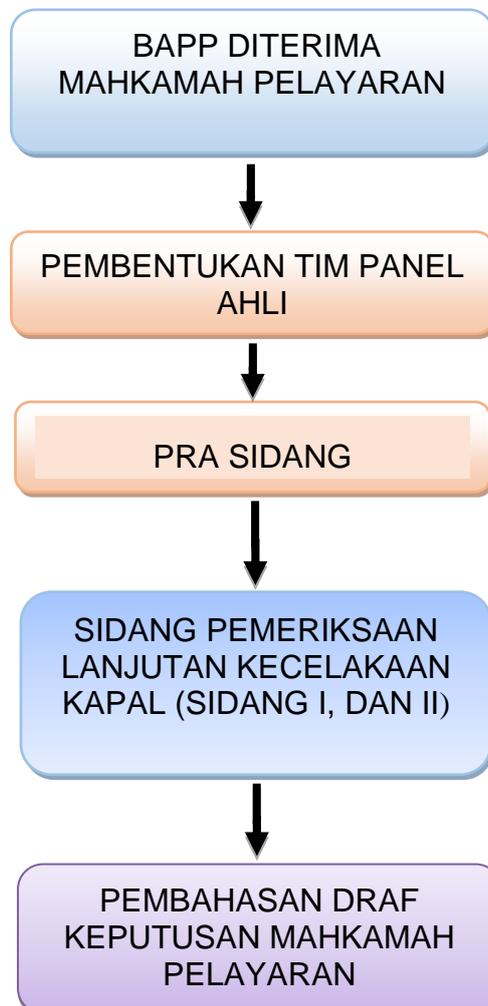


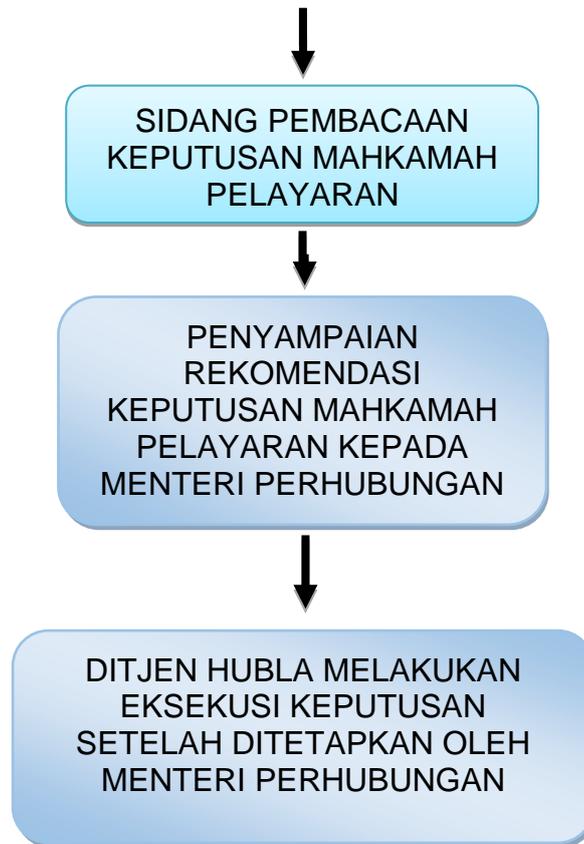
**a. Tahapan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal :**

- 1) Berkas BAPP diterima Mahkamah Pelayaran;
- 2) SK Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Penunjukan Pembentukan Tim Panel Ahli;
- 3) Pelaksanaan Prasadang;
- 4) Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal;
  - a. Sidang I;
  - b. Sidang II (jika diperlukan).
- 5) Pembahasan Draf Keputusan Mahkamah Pelayaran;
- 6) Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran;
- 7) Penyampaian rekomendasi Ketua Mahkamah Pelayaran kepada Menteri Perhubungan;
- 8) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan eksekusi keputusan setelah di tetapkan oleh Menteri Perhubungan.

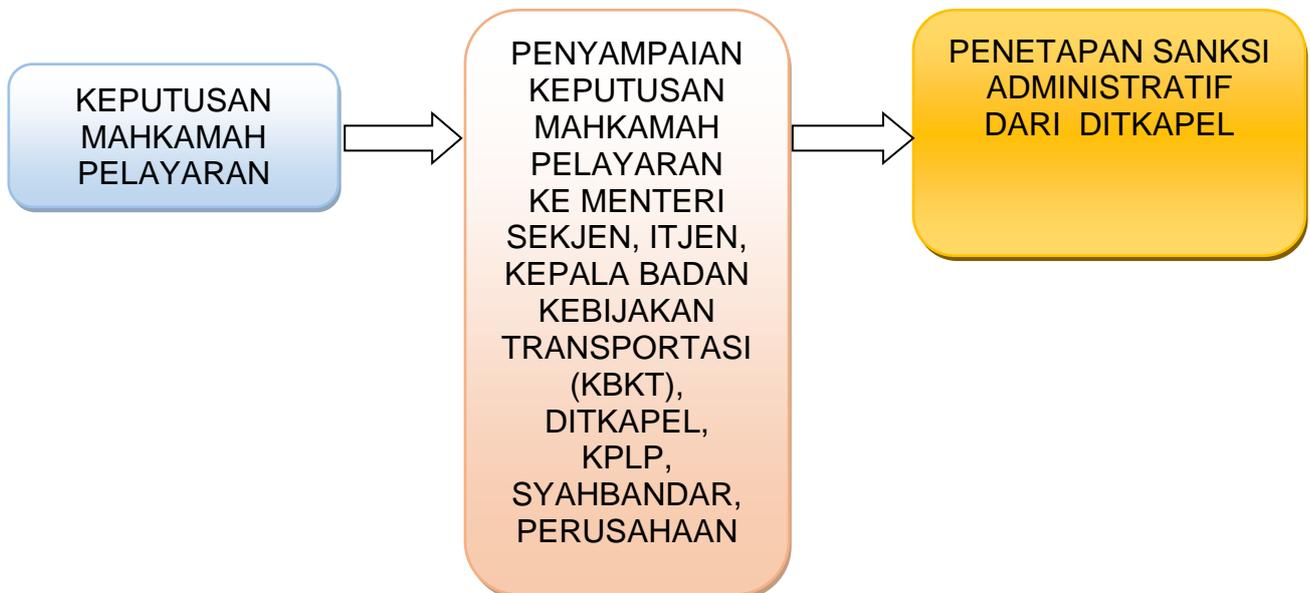
Alur Pemeriksaan lanjutan sebagaimana Bagan 1.1 dan Alur penyampaian keputusan sebagaimana Bagan 1.1.

**Bagan 1.1**  
**ALUR PEMERIKSAAN LANJUTAN BERKAS BAPP**





**ALUR PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN**



#### **a. Proses Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal oleh Tim Panel Ahli Mahkamah Pelayaran**

Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan kapal. Atas hasil pemeriksaan kecelakaan kapal tersebut, nantinya dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan sebab-sebab kecelakaan yang sama. Pemeriksaan kecelakaan kapal meliputi pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang dilakukan oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar laporan kejadian kecelakaan kapal dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran.

Setelah berkas Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) dari KSOP/KUPP/KSU diterima oleh Mahkamah Pelayaran maka untuk pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, Ketua Mahkamah Pelayaran membentuk Tim yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim Panel Ahli, 5 (lima) orang anggota tim panel ahli, 1 (satu) orang Sekretaris Tim Panel Ahli, Kasubbag Administrasi Perkara dan Persidangan dan 2 (dua) orang Staf Bidang Subbag Administrasi Perkara dan Persidangan sebagai Sekretariat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Pembentukan Tim. Selanjutnya Sekretaris Tim Panel Ahli beserta dengan Sekretariat melakukan pengecekan kelengkapan BAPP yang akan di tindak lanjuti, Tim Panel Ahli melakukan prasidang kecelakaan kapal maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Surat Keputusan. Prasidang tersebut diselenggarakan di kantor Mahkamah Pelayaran (Gambar 1.1 dan Bagan 1.2).

Keputusan Mahkamah Pelayaran di sampaikan kepada Menteri Perhubungan di tembuskan kepada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Kebijakan Transportasi (KBKT), Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, KPLP Syahbandar. Hasil keputusan Mahkamah Pelayaran di tindaklanjuti oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan di sampaikan ke Mahkamah Pelayaran dan di laporkan kepada Biro Perencanaan sebagai penilaian IKU Mahkamah Pelayaran yang merupakan penilaian Kinerja Sekretariat Jenderal.

**Gambar 1.1**



Rapat Prasadang Kecelakaan Kapal Tenggelamnya LCT Rimba Raya XV pada hari Kamis Tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 22.00 WITA di Perairan Sungai Seimanggaris Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, pada hari Selasa, 13 Februari 2024, di Kantor Mahkamah Pelayaran

**Gambar 1.2**



Rapat Prasadang Kecelakaan Kapal Tubrukan Antara Km Labobar Dengan KM Sabuk Nusantara-35, TB Nelly-31 Dan TK Nelly-52, LCT Mulia Jaya Di Perairan Sekitar Dermaga Samudera Pelabuhan Bitung pada hari Selasa, 5 November 2024, di Kantor Mahkamah Pelayaran.

**Gambar 1.3**



Rapat Prasadang Kecelakaan Kapal Terbakarnya KM Bukit Raya di Outer Buoy (OB) Muara Jungkat Perairan Pontianak, Kalimantan Barat, pada hari Selasa, 10 Juni 2024, di Kantor Mahkamah Pelayaran

**Gambar 1.4**



Rapat Prasadang Kecelakaan Kapal Tenggelamnya TB Arung Samudra-VI Yang Ditunda TB PU-1601 di Perairan Tenggara Pulau Bangka Laut Jawa, pada hari Senin, 04 November 2024, di Kantor Mahkamah Pelayaran

Dalam Prasadang Anggota Panel Ahli menetapkan layak atau tidak layak BAPP disidangkan, apabila dinyatakan layak maka Tim Panel Ahli menentukan Para Terduga, Saksi dan Ahli, selanjutnya Mahkamah Pelayaran memanggil awak kapal melalui surat panggilan kepada pihak perusahaan. Sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dilaksanakan di kantor Mahkamah Pelayaran Jakarta, dalam hal pihak yang dipanggil lebih dari lima puluh persen tidak dapat hadir di Jakarta disebabkan karena kendala teknis maupun finansial yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, maka Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal dapat dilaksanakan di kantor Syahbandar pembuat BAPP kecelakaan kapal, atas persetujuan Ketua Mahkamah Pelayaran. Prosedur dan Tata Cara Persidangan pada prinsipnya sama dengan sidang yang dilaksanakan di kantor Mahkamah Pelayaran di Jakarta.

Pada tahun 2024, berkas BAPP yang disidangkan sebanyak 26 (dua puluh enam) berkas, sedangkan untuk pelaksanaan sidang selama tahun 2024 adalah sebanyak 33 sidang dengan rincian di daerah sebanyak 18 (Delapan Belas) kali dan 15 (Lima Belas) kali diselenggarakan di kantor Mahkamah Pelayaran.

**Gambar 1.6**



Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Terbakarnya KM Alexindo 8 pada Tanggal 21 September 2024, pada hari Selasa s.d. Rabu tanggal 2 dan 3 Juli 2024 di KSOP Khusus Batam

**Gambar 1.7**



Pelaksanaan Sidang Pertama Kecelakaan Kapal Tubrukan TK apol 3017 yang ditarik TB Mitra Anugerah - 1 dengan pilar jembatan mahakam samarinda kalimantan timur pada tanggal 23 Desember 2022, pada hari Rabu s.d. Kamis, tanggal 12 dan 13 Juni 2024 di KSOP Kelas I Samarinda

**Gambar 1.8**



Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tenggelamnya TB Samudera Sindo II pada Tanggal 15 Maret 2024, pada hari Senin s.d. Selasa, tanggal 10 dan 11 Juni 2024 di KSOP Utama Tanjung Perak

**Gambar 1.9**



Pelaksanaan dan Pengambilan Sumpah pada Sidang Pertama Kecelakaan Kapal terbakarnya KM Mutiara Berkah I di dermaga PT Indah Kiat Pulp Paper (IKPP) Merak-Banten, pada hari SeniSelasa, 2 s.d. 5 Juli 2024 di Kantor KSOP Kelas I Banten.

**Gambar 1.10**



Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal terbakarnya KM Bukit Raya di Outer Buoy (OB) Muara Jungkat Perairan Pontianak, Kalimantan Barat, pada Hari Rabu-Kamis, 26-27 Juni 2024 di Kantor KSOP Kelas I Pontianak

**Gambar 1.11**



Pelaksanaan Sidang Pertama Kecelakaan Kapal Kecelakaan Kapal Tubrukan Antara Km Labobar Dengan KM Sabuk Nusantara-35, TB Nelly-31 Dan TK Nelly-52, LCT Mulia Jaya, pada Hari Senin s.d. Kamis, tanggal 25 s.d. 28 November 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran

**Tabel 1.4 Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal berdasarkan tempat Pelaksanaan sidang Pada Tahun 2023/2024**

No	Kasus	Sidang Pertama Dan Tempat Sidang	Sidang Lanjutan, Sidang Keputusan Dan Tempat Sidang
1.	Kandasnya TK Pacific 3001 Yang Ditunda KT Pacific One Pada Tanggal 22 Januari 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib Di Perairan Sekitar Tanjung Kabil	Sidang ke I tanggal 10 s.d. 11 Oktober 2023 di KSOP Khusus Batam	Sidang ke II tanggal 27 November 2023 di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta.  Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 15 Januari 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta.
2.	Kandasnya MV Wan Hai 215 pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 13.10 WIB di	Sidang I tgl 12 s.d. 13 Oktober 2023 Di KSOP Khusus	Sidang II Tgl 9 November 2023 di Kantor Mahkamah

	perairan sekitar Sekupang antara Pulau Mariam dan Rambu Suar Merah Tenggara DSI 852	Batam, Jakarta	Pelayaran, Jakarta.  Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 30 Januari 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta.
3.	Tubrukan Antara MT Dewayani Dengan MT Serena III Pada Tanggal 03 April 2023 Pukul 01.30 WITA Di Perairan Gili Selang Bali	Sidang ke I tanggal 21, 22, dan 23 November 2023 di Kantor KSOP Kelas IV Padangbai	Sidang II tanggal 4 dan 5 Januari 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta  Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tgl 12 Februari 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta.
4.	Terbakarnya MT Kristin di Perairan Ampenan lebih kurang 1.5 Mil laut dari terminal bahan bakar (TBBM), Ampenan Lombok Mataram, Nusantara Barat	Sidang ke I tanggal 24 dan 25 November 2023 Di KSOP Kelas IV Padangbai	Sidang II Tgl 8 Januari 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta  Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 15 Februari 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran, Jakarta
5.	Tenggelamnya LCT Bahana Putra Di Laut Maluku Jarak 35 Mil Laut Utara Pulau Mayau	Sidang ke I tgl 29 s.d 30 November 2023 di KSOP Kelas I Bitung	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tgl 16 Februari 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran.
6.	Tenggelamnya LCT Batiwakkal Permai di Tanjung Damao, Perairan Talau Sulawesi Utara	Sidang ke I tanggal 1 s.d 2 Desember 2023 di KSOP Kelas I	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah

		Bitung	Pelayaran tanggal 16 Februari 2024 Kantor Mahkamah Pelayaran.
7.	Terbakarnya TB Sabang 35 pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Area Kolam Galangan PT Sumber Marine Shipyard Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau	Sidang ke I tanggal 20 s.d. 21 Februari 2024 Di KSOP Khusus Batam	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 1 April 2024.
8.	Tubrukan Antara SB Evelyn Calisca 01 Dengan Kayu Nibung Pada Hari Kamis Tanggal 27 April 2023 Pukul 13.15 WIB Di Perairan Sungai Air Tawar Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir, Riau	Sidang ke I tanggal 28 s.d. 29 Februari 2024 di KSOP Kelas IV Tembilahan	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 1 April 2024.
9.	Tenggelamnya LCT Rimba Raya XV pada hari Kamis Tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 22.00 WITA di Perairan Sungai Seimanggaris Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara	Sidang ke I tanggal 13 dan 14 Maret 2024 di KSOP Kelas IV Nunukan	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 23 April 2024
10.	Terbakarnya TB Paiton yang menarik TK Apol 3012 diambang luar Sungai Musi	Sidang ke I tanggal 21 dan 22 Februari 2024 di KSOP Kelas I Palembang	Sidang ke II tanggal 20 dan 21 Maret 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran.  Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 24 April 2024
11.	Tubrukan kapal KM DAN No 1 dengan KM MAJU di Laut Jawa pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 02.30 WITA di Perairan Tanjung Layar Pulau Laut Barat Kotabaru Kalimantan Selatan	Sidang ke I tanggal 5 s.d. 8 Maret 2024 di KSOP Kelas II Kotabaru Batulicin	Sidang ke II tanggal 25 Maret 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran.  Sidang Pembacaan Keputusan

			Mahkamah Pelayaran tanggal 26 April 2024.
12.	Kandasnya MT AASHI pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di sekitar Pantai Perairan Lahewa Pulau Nias - Sumatera Utara Indonesia	Sidang ke I tanggal 13 dan 14 Maret 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran	Sidang ke II tanggal 23 April 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran.  Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 16 Mei 2024.
13.	Kandasnya KM Budi Mulia 69 Pada Tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 11.55 WIT Di Perairan Pulau Tonghaya (Selong Kecil), Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara	Sidang ke I tanggal 03 Juni 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 13 Agustus 2024.
14.	Terbakarnya LCT Marina Bay pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA di perairan sekitar 3 – 4 NM arah selatan dari pulau Dua Kecamatan Lembeh Selatan Bitung Sulawesi Utara	Sidang ke I tanggal 20 dan 21 Juni 2024 di KSOP Kelas I Bitung	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 23 Agustus 2024.
15.	terbakarnya KM Bukit Raya di Outer Buoy (OB) Muara Jungkat Perairan Pontianak, Kalimantan Barat	Sidang ke I tanggal 26 dan 27 Juni 2024 di KSOP Kelas I Pontianak	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 30 Agustus 2024.
16.	Tubrukan TK apol 3017 yang ditarik TB Mitra Anugerah - 1 dengan pilar jembatan mahakam samarinda kalimantan timur pada tanggal 23 desember 2022	Sidang ke I tanggal 12 dan 13 Juni 2024 di KSOP Kelas I Samarinda	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 2 September 2024.

17.	Terbakarnya KM Mutiara Berkah I di dermaga PT Indah Kiat Pulp Paper (IKPP) Merak-Banten	Sidang ke I tanggal 2 s.d. 5 Juli di KSOP Kelas I Banten	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 5 September 2024.
18.	Tenggelamnya TB Samudera Sindo II pada Tanggal 15 Maret 2024	Sidang ke I tanggal 10 dan 11 Juni 2024 di KSOP Utama Tanjung Perak	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 06 September 2024.
19.	tenggelamnya KLM The Oceanic pada tanggal 01 Maret 2024 pukul 12.00 WIT, di Tenggara Pulau Arborek, Kabupaten Raja Ampat	Sidang ke I tanggal 17 dan 18 Juli 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran.	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 12 September 2024.
20.	Tenggelamnya TB Marguna I pada Tanggal 01 Februari 2024	Sidang ke I tanggal 4 dan 5 Juli 2024 di KSOP Khusus Batam	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 13 September 2024.
21.	Terbakarnya KM Alexindo 8 pada Tanggal 21 September 2024	Sidang ke I tanggal 2 dan 3 Juli 2024 di KSOP Khusus Batam	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 13 September 2024.
22.	Terbakarnya KM Umsini pada Tanggal 09 Juni 2024	Sidang ke I tanggal 3 dan 4 September 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran tanggal 07 Oktober 2024.
23.	Tubrukan antara MV Sophia dengan KM Jaya Elo 01, pada tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 22.13 WIB di sekitar OB Pontianak	Sidang ke I tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran 21 Oktober 2024
24.	MT Metro Maritim III Yang Menubruk Dermaga 01 Curah Cair Terminal Kijing Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat Pada Tanggal 26 Juni 2024	Sidang ke I tanggal 2 dan 3 Oktober 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran 31 Oktober 2024

25.	Kecelakaan Kapal Tenggelamnya TB Arung Samudra-VI Yang Ditunda TB PU-1601 Pada Tanggal 29 Juni 2023 Sekira Pukul 01.30 WIB Di Perairan Tenggara Pulau Bangka Laut Jawa	Sidang ke I tanggal 18 dan 19 November 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran 16 Desember 2024
26.	Kecelakaan Kapal Tubrukan Antara Km Labobar Dengan KM Sabuk Nusantara-35, TB Nelly-31 Dan TK Nelly-52, LCT Mulia Jaya Pada Tanggal 11 Agustus 2024 Sekira Pukul 13.00 WITA	Sidang ke I tanggal 25 s.d. 28 November 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran	Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran 17 Desember 2024

#### **b. Pembahasan Draft Keputusan Mahkamah Pelayaran**

Pelaksanaan kegiatan Pembahasan draft Keputusan Mahkamah Pelayaran dilakukan setelah Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal oleh Tim Panel Ahli, pembahasan draft Keputusan Mahkamah Pelayaran dilaksanakan untuk mendapatkan Keputusan Mahkamah Pelayaran yang komprehensif sehingga dapat diketahui faktor penyebab kecelakaan kapal dan menentukan ada tidaknya kelalaian dari Terduga Nakhoda dalam menerapkan standar profesi kepelautan. Pelaksanaan pembahasan juga mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal agar ada percepatan dan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan 150 (seratus lima puluh) hari kerja sampai Keputusan Mahkamah dibacakan dalam Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran (Gambar 1.12).

**Gambar 1.12**



Pembahasan draf keputusan Mahkamah Pelayaran tentang Terbakarnya TB Sabang 35 pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Area Kolam Galangan PT Sumber Marine Shipyard Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau pada koordinat 01° 03,309' U /103° 54,319' T, dilaksanakan di Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta pada tanggal 19 s.d. 23 Maret 2024

**Gambar 1.13**



Pembahasan draf keputusan Mahkamah Pelayaran tentang Terbakarnya TB Paiton yang menarik TK Apol 3012 diambang luar Sungai Musi, diselenggarakan pada tanggal 25 s.d. 29 Maret 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta

**Gambar 1.14**



Pembahasan draf keputusan Mahkamah Pelayaran Tentang Kecelakaan Kapal Tenggelamnya LCT Rimba Raya XV pada hari Kamis Tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 22.00 WITA di Perairan Sungai Seimanggaris Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, pada tanggal 25 s.d. 29 Maret 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta

**Gambar 1.15**



Pembahasan draf keputusan Mahkamah Pelayaran Tentang Terbakarnya KM Mutiara Berkah I di dermaga PT Indah Kiat Pulp Paper (IKPP) Merak-Banten, pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran

**Gambar 1.16**



Pembahasan draf keputusan Mahkamah Pelayaran Tentang terbakarnya KM Bukit Raya di Outer Buoy (OB) Muara Jungkat Perairan Pontianak, Kalimantan Barat, pada 21 s.d. 23 Agustus 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran

**c. Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran**

Hasil dari Pembahasan draf keputusan Mahkamah Pelayaran yang dilaksanakan oleh Tim Panel Ahli yang berjumlah 12 (dua belas) orang Panel Ahli yang terdiri dari :

1. Capt. Bambang Suharti, S.E., M.M., M.Mar
2. Capt. Frederick H. Roinwowan
3. Capt. Muhammad Ghazali, S.H., M.H., M.Mar
4. Capt. Suhidman, M.Mar
5. Elfis, M.Mar
6. Iryanto Laisa, M.Mar.E
7. Adi Karsyaf, S.H., M.H
8. Amung Rakhmat, S.H.
9. Yanuar Prayoga Warsadi, S.H
10. Andi Ike Rismayanti, S.T
11. David Febianto, S.T
12. Dr. Ir. Pratomo Setyohadi, M.Sc

Hasil keputusan dan rekomendasi berdasarkan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal adalah Keputusan Mahkamah Pelayaran tentang kecelakaan kapal sebanyak 26 (Dua puluh enam) keputusan. Keputusan Mahkamah Pelayaran tentang kecelakaan kapal tersebut dibacakan pada pelaksanaan sidang pembacaan keputusan di Kantor Mahkamah Pelayaran. Mahkamah Pelayaran tidak dapat gegabah dalam memutus sebuah perkara. Sebab setidaknya ada tiga

hal yang harus terpenuhi, yakni ikhtisar kejadian kecelakaan kapal, hasil pembuktian yang diperoleh dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan, dan pendapat Mahkamah Pelayaran, yang memuat tentang kondisi kapal, dokumen kapal, dan awak kapal pada saat kejadian kecelakaan kapal. Adapun hasil keputusan dan rekomendasi berdasarkan sidang pembacaan keputusan tahun 2024 adalah sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 1.5

**Tabel 1.5 Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran Tentang Kecelakaan Kapal Tahun 2024**

NO	BERKAS	LAMA WAKTU PENYELESAIAN BAPP SESUAI HARI KERJA	HASIL KEPUTUSAN
1.	Kandasnya TK Pacific 3001 Yang Ditunda KT Pacific One Pada Tanggal 22 Januari 2023 Sekira Pukul 18.30 Wib Di Perairan Sekitar Tanjung Kabil	86 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga I Nakhoda, Saudara Delvi Guswendri, dengan Sanksi Peringatan.  Menghukum Terduga II Mualim I, Saudara Andika Putra, dengan Sanksi mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Perwira Kapal di kapal-kapal niaga selama jangka waktu 3 (Tiga) bulan.
2.	Kandasnya MV Wan Hai 215 pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 13.10 WIB di perairan sekitar Sekupang antara Pulau Mariam dan Rambu Suar Merah Tenggara DSI 852 pada koordinat 01°08.8' U / 103°54.7' T	97 hari kerja dari tanggal SK.	Menghukum, Terduga Nakhoda MV Wan Hai 215, Saudara Sun Weichao, dengan sanksi Peringatan.
3.	Tubrukan Antara MT Dewayani Dengan MT Serena III Pada Tanggal 03 April 2023 Pukul 01.30	72 hari kerja dari tanggal SK	Membebaskan Terduga I Nakhoda MT. Dewayani atas nama saudara Andriyanto suyono.

	WITA Di Perairan Gili Selang Bali		<p>Menghukum Terduga II Mualim MT.Dewayani atas nama saudara Richardo Febrianto Simatupang, selama jangka waktu 2 (dua) bulan.</p> <p>Membebaskan Terduga I Nakhoda MT. Serena III, atas nama Joutje Sengke.</p> <p>Menghukum Terduga II Mualim II MT. Serena III atas nama saudara puji Rabbani syukur, selama jangka waktu 2 (dua) bulan.</p>
4.	Terbakarnya MT Kristin di Perairan Ampenan lebih kurang 1.5 Mil laut dari terminal bahan bakar (TBBM), Ampenan Lombok Mataram, Nusantara Barat	75 hari kerja dari tanggal SK	Terduga I Nakhoda MT Kristin atas nama saudara Idris lahir Cirebon tanggal 10 Desember 1978 di hukum 7 (tujuh) bulan
5.	Tenggelamnya LCT Bahana Putra Di Laut Maluku Jarak 35 Mil Laut Utara Pulau Mayau	72 hari kerja dari tanggal SK	Terduga Mualim I Saudara Yasiful anam Lahir Jombang, 12 Juli 1970 dihukum 4 (empat) bulan
6.	Tenggelamnya LCT Batiwakkal Permai di Tanjung Damao, Perairan Talau Sulawesi Utara	72 hari sejak tanggal SK diterbitkan.	<p>Terduga I Nakhoda Atas nama sadara Franklin Ambalao lahir di Bulangan tanggal 26 Februari 1973 dihukum 7(tujuh) bulan.</p> <p>Terduga II Mualim I, Atas nama saudara Erfando Maluenseng lahir diMulengen tanggal 24 Mei 1999 dihukum 6 ( enam) bulan.</p>
7	Terbakarnya TB Sabang 35 pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Area Kolam Galangan PT	46 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga I Nakhoda, Saudara Harry Kurniawan, dengan mencabut sementara

	Sumber Marine Shipyard Tanjung Uncang Batam Kepulauan Riau pada koordinat 01° 03,309' U /103° 54,319' T		<p>Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal niaga selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.</p> <p>Menghukum Terduga II KKM, Saudara Marojahan, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Perwira Kapal di kapal-kapal niaga selama jangka waktu 4 (empat) bulan.</p>
8.	Tubrukan Antara SB Evelyn Calisca 01 Dengan Kayu Nibung Pada Hari Kamis Tanggal 27 April 2023 Pukul 13.15 WIB	46 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga Nakhoda SB Evelyn Calisca 01, Saudara Sahran, dengan mencabut sementara Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
9.	Tenggelamnya LCT Rimba Raya XV pada hari Kamis Tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 22.00 WITA di Perairan Sungai Seimanggaris Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara	36 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga Nakhoda LCT Rimba Raya XV, Saudara Wardana, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal Niaga, selama jangka waktu 5 (lima) bulan.
10	Terbakarnya TB Paiton yang menarik TK Apol 3012 diambang luar Sungai Musi	54 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga I Nakhoda TB Paiton atas nama saudara Tamrin, dengan mencabut sementara Sertifikat tersebut sementara sebagai

			<p>Nakhoda dikapal-kapal Niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 1 (satu) bulan.</p> <p>Menghukum Terduga II KKM TB Paiton atas nama saudara Mahmud, dengan mencabut sementara Sertifikat tersebut sementara sebagai KKM (Perwira Kapal) dikapal-kapal Niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 4 (empat) bulan.</p> <p>Menghukum Terduga III Masinis II TB Paiton atas nama saudara Nanang Setiawan, dengan mencabut sementara Sertifikat tersebut sementara sebagai Masinis (Perwira Kapal) dikapal-kapal Niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.</p>
11.	Tubrukan kapal KM DAN No 1 dengan KM MAJU di Laut Jawa pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 02.30 WITA di Perairan Tanjung Layar Pulau Laut Barat Kotabaru Kalimantan Selatan	29 hari kerja dari tanggal SK	<p>Membebaskan Terduga I Nakhoda KM DAN No 1, Saudara Sudirman.</p> <p>Menghukum Terduga II Mualim II KM DAN No 1, Saudara Ismail, dengan mencabut sementara sertifikat keahlian pelaut tersebut sebagai Perwira Kapal di kapal-kapal niaga selama jangka waktu 4 (empat) bulan.</p> <p>Membebaskan Terduga I Nakhoda KM Maju, Saudara Sigit Pramono.</p>

			Membebaskan Terduga II Mualim II KM Maju, Saudara Syamsuni.
12.	Kandasnya MT AASHI pada tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di sekitar Pantai Perairan Lahewa Pulau Nias - Sumatera Utara Indonesia	51 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum, Terduga Nakhoda MV Wan Hai 215, Saudara Sun Weichao, dengan sanksi Peringatan.
13.	Kandasnya KM BUDI MULIA 69 Pada Tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 11.55 WIT Di Perairan Pulau Tonghaya (Selong Kecil), Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara	62 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga Nakhoda KM Budi Mulia 69, Saudara Manuel Jeffry Manumpil, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal Niaga, selama jangka waktu 1 (satu) bulan.
14.	Terbakarnya LCT Marina Bay pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA di perairan sekitar 3 – 4 NM arah selatan dari pulau Dua Kecamatan Lembeh Selatan Bitung Sulawesi Utara	67 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga I Masinis III Saudara Muhammad Ali Shobirin, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Perwira Kapal di kapal-kapal niaga selama jangka waktu 1 (satu) bulan.  Menghukum Terduga II KKM Saudara Ari Darma Simanjuntak, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Perwira Kapal di kapal-kapal niaga selama jangka waktu 1 (satu) bulan.
15.	Terbakarnya KM Bukit Raya di Outer Buoy (OB) Muara Jungkat Perairan Pontianak,	63 hari kerja dari tanggal SK	Membebaskan Terduga I Nakhoda KM Bukit Raya, Saudara Ari Prihatnanto.

	Kalimantan Barat		Menghukum Terduga II Masinis II KM Bukit Raya, Saudara Fiki Alfiyan, dengan Peringatan.
16.	Tubrukan TK apol 3017 yang ditarik TB Mitra Anugerah - 1 dengan pilar jembatan mahakam samarinda kalimantan timur pada tanggal 23 desember 2022	83 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga Nakhoda TB Mitra Anugerah-1, Saudara Lukman Hakim, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai perwira kapal di kapal-kapal niaga, selama jangka waktu 1 (satu) bulan.
17.	Terbakarnya KM Mutiara Berkah I di dermaga PT Indah Kiat Pulp Paper (IKPP) Merak-Banten	66 hari kerja dari tanggal SK	Membebaskan Terduga I Nakhoda KM Mutiara Berkah I atas nama Saudara William Dickson Kaliwuge.  Membebaskan Terduga II Mualim I KM Mutiara Berkah I, atas nama Saudara Rudi Supriatna.  Membebaskan Terduga III Mualim III KM Mutiara Berkah I atas nama Saudara Meiko Samosir.  Membebaskan Terduga IV KKM Mutiara Berkah I atas nama Saudara Jufri Sonda.
18.	Tenggelamnya TB Samudera Sindo II pada Tanggal 15 Maret 2024	58 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga I Nakhoda TB Samudra Sindo - I Saudara Sofian Suri, dengan mencabut sementara sertifikat keahlian pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal niaga

			<p>selama jangka waktu 2 (dua) bulan.</p> <p>Menghukum Terduga I KKM, Saudara Samsi, dengan mencabut sementara sertifikat keahlian pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal niaga selama jangka waktu 1 (satu) bulan.</p>
19.	tenggelamnya KLM The Oceanic pada tanggal 01 Maret 2024 pukul 12.00 WIT, di Tenggara Pulau Arborek, Kabupaten Raja Ampat	48 hari kerja dari tanggal SK	<p>Menghukum Terduga I Nakhoda Saudara Mustaning, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 2 (dua) bulan.</p> <p>Menghukum Terduga II Kepala Kamar Mesin (KKM) Saudara Salahuddin, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Perwira di kapal-kapal niaga berbendera Indonesia selama jangka waktu 1 (satu) bulan.</p> <p>Menghukum Terduga III Masinis II Saudara Deni Ardi Purba, dengan Peringatan.</p>
20.	Tenggelamnya TB Marguna I pada Tanggal 01 Februari 2024	73 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga Nakhoda Saudara Marfilius, dengan sanksi Peringatan.
21	Terbakarnya KM Alexindo 8	73 hari kerja	Membebaskan Terduga

	pada Tanggal 21 September 2024	dari tanggal SK	Nakhoda Saudara Joko sampir.
22	Terbakarnya KM Umsini pada Tanggal 09 Juni 2024	36 hari kerja dari tanggal SK	<p>Menghukum Terduga I Nakhoda KM Umsini, Saudara Muhammad Anwar Noor, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal Niaga, selama jangka waktu 1 (satu) bulan.</p> <p>Menghukum Terduga II Masinis I Senior KM Umsini, Saudara Supomo, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian tersebut untuk bertugas sebagai Perwira di kapal-kapal Niaga, selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.</p> <p>Menghukum Terduga III Kepala Kamar Mesin (KKM) KM Umsini, Saudara Mahasuddin, dengan mencabut sementara Sertifikat Keahlian tersebut untuk bertugas sebagai Perwira di kapal-kapal Niaga, selama jangka waktu 2 (dua) bulan.</p>
23	Tubrukan antara MV Sophia dengan KM Jaya Elo 01, pada tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 22.13 WIB di sekitar OB Pontianak	57 hari kerja dari tanggal SK	<p>Menghukum Terduga I Nakhoda MV Sophia Saudara Andris Julius Mawuntu, dengan Sanksi Peringatan.</p> <p>Menghukum Terduga II Nakhoda KM Jaya Elo 01 Saudara Suratna, dengan</p>

			mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nakhoda di kapal-kapal niaga selama jangka waktu 3 (tiga) bulan
24	MT Metro Maritim III Yang Menubruk Dermaga 01 Curah Cair Terminal Kijing Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat Pada Tanggal 26 Juni 2024	38 hari kerja dari tanggal SK	Membebaskan Terduga Nakhoda MT Metro Maritim III Saudara Didi Rusadi.
25	Kecelakaan Kapal Tenggelamnya TB Arung Samudra-VI Yang Ditunda TB PU-1601 Pada Tanggal 29 Juni 2023 Sekira Pukul 01.30 WIB Di Perairan Tenggara Pulau Bangka Laut Jawa	36 hari kerja dari tanggal SK	Membebaskan Terduga Nakhoda TB PU-1601 Saudara Abdul Rahman.
26	Kecelakaan Kapal Tubrukan Antara Km Labobar Dengan KM Sabuk Nusantara-35, TB Nelly-31 Dan TK Nelly-52, LCT Mulia Jaya Pada Tanggal 11 Agustus 2024 Sekira Pukul 13.00 WITA	33 hari kerja dari tanggal SK	Menghukum Terduga Nakhoda KM Labobar Saudara Sumarjo Pujo Harnowo, dengan sanksi mencabut sementara Sertifikat Keahlian Pelaut tersebut untuk bertugas sebagai Nachoda di kapal-kapal niaga selama jangka waktu 2 (dua) bulan.

**Gambar 1.17**



Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran Tentang Kecelakaan Kapal Tenggelamnya LCT Rimba Raya XV pada hari Kamis Tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 22.00 WITA di Perairan Sungai Seimanggaris Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran

**Gambar 1.18**



Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran Tentang Kecelakaan Kapal Kandasnya KM Budi Mulia 69 Pada Tanggal 19 Agustus 2023 Pukul 11.55 WIT Di Perairan Pulau Tonghaya (Selong

Kecil), Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran

**Gambar 1.19**



Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran Tentang Kecelakaan Kapal Terbakarnya Km Bukit Raya Pada Tanggal 25 April 2024 Pukul 14.05 WIB Di Outer Buoy Muara Jungkat Perairan Pontianak Kalimantan Barat, pada Hari Jumat, 30 Agustus 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran

**Gambar 1.20**



Sidang Pembacaan Keputusan Mahkamah Pelayaran Tentang Kecelakaan Kapal Tubrukan SB Evelyn Calisca 01 dengan Kayu Nibung Pada Hari Kamis Tanggal 27 April 2023 Pada Pukul 13.15

WIB di Perairan Air Sungai Air Tawar Kecamatan Pulau Burung Indragiri Hilir, Riau.

**Gambar 1.21**



Sidang Pembacaan Keputusan Kecelakaan Kapal Kecelakaan Kapal Terbakarnya KM Mutiara Berkah I Pada Tanggal 6 September 2023 Di Dermaga PT Indah Kiat Pulp Paper Merak-Banten, pada Hari Kamis, Tanggal 5 September 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran.

**Gambar 1.22**



Sidang Pembacaan Keputusan Kecelakaan Kapal MT Metro Maritim III Yang Menubruk Dermaga 01 Curah Cair Terminal Kijing Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat, pada Hari Kamis, 31 Oktober 2024 di Kantor Mahkamah Pelayaran

## KEGIATAN STRATEGIS SUBBAG PERKARA DAN PERSIDANGAN

### 1. Verifikasi dan Penelitian Informasi Data Awal Kecelakaan Kapal

Mahkamah Pelayaran melakukan kegiatan Data Awal Kecelakaan Kapal adalah berdasarkan kumpulan data yang didapat dari berita di media elektronik pada lokasi antara lain : Kantor Kesyahbandaran Utama (KSU), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Pelabuhan (Kanpel), atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) dengan rincian sebagai berikut pada Tabel 1.6.

**Tabel 1.6.**  
**Verifikasi Dan Penelitian Informasi Data Awal Kecelakaan Kapal**  
**Mahkamah Pelayaran Tahun 2024**

<b>NO TEMPAT DAN KASUS KECELAKAAN KAPAL</b>	<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b>
<b>1. PENCARIAN DATA AWAL DI KSOP KHUSUS BATAM - KEPULAUAN RIAU</b>	➤ 01 s.d 04 Mei 2024
Terbakarnya Kapal KM. Alexindo 8 yang diduga akibat terjadi percikan api di mess rom / dapur yang mengakibatkan ruangan akomodasi terbakar habis.	

**Gambar 1.23**



Kegiatan Pencarian Data Awal berkas terbakarnya Kapal KM. Alexindo 8, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 14.20 WIB yang berlabuh di Perairan Tanjung Pinggir pada posisi 01°09.592' N / 103°57.096' E, akibat kejadian dari kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa dan crew berhasil dievakuasi ke perahu nelayan.

## **2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Tindaklanjut Hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran Tahun 2023 yang di laksanakan tahun 2024.**

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran diselenggarakan dalam rangka untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi keputusan Mahkamah Pelayaran yang telah

disampaikan oleh KSU, KSOP, KUPP, KSO Utama setempat terhadap para Terduga Nakhoda/Perwira kapal yang dikenakan sanksi/hukuman seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kecelakaan Kapal.

Adapun output kegiatan ini adalah informasi hasil Keputusan yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Berita Acara pembekuan sertifikat pelaut bagi Nakhoda/perwira kapal yang dinyatakan bersalah/lalai atas kecelakaan kapal yang menjadi tanggungjawabnya. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Pelayaran telah membagi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi beberapa kegiatan dan tugas-tugas masing-masing tim, sebagai berikut:

**Tabel. 1.7 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran**

<b>NO</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>NOMOR KEPUTUSAN</b>	<b>LOKASI</b>
1.	7 s.d 9 Mei 2024	<b>HK.212/12/XII/MP.2023</b>  Kecelakaan Kapal Terbakarnya KM Lit Enterprise pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira Pukul 14.55 WIB Di Perairan sekitar 50 Meter dari Dermaga Terminal Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya pada Koordinat 07°11'48,6"S/112° 44.25,1'T	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya
2.	7. s.9 Mei 2024	<b>HK.212/07/VII/MP.2023</b>  Kecelakaan Kapal Tubrukan antara TSHD HAM 311 dan MT.Crane Vesta pada tanggal 6 Desember 2021 di Perairan sekitar Buoy 5 Alur Pelayaran Barat Surabaya Sekitit Pukul 05.07 WIB pada Koordinat 06°52'04'S/112° 44.53'T	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya
3	19 s.d 21 Juni 2024	<b>HK.212/1/14/MP.2023</b>  Tenggelammnya LCT. Cahaya Harapan Hati di DAM Perairan Barat Pelabuhan Tanjung Emas	Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang

		Semarang	
4	19 s.d 21 Juni 2024	<b>HK.212/05/VIII/MP.2023</b> Kecelakaan Kapal Kandasnya TK ER 305 yang digandeng TB Prim Star 3 di Tambak Lorok Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah	Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang
5	19 s.d 21 Juni 2024	<b>HK.212/I/15/MP.2023</b> Kecelakaan kapal Tenggelammnya LCT.Harapan IX Tanggal 12 Juni 2023 di Perairan sebelah Barat Karimum Jaya Sekitak Pukul 20.30 WIB pada Koordinat 05°40',00'S/109°59',00°T	Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang
6	11-13 Juli 2024	<b>HK.212/16/XII/MP.2024</b> Kecelakaan Kapal Tenggelamnya FC ARK Shiloh Pada Tanggal 28 Desember 2022 Pukul 06.10 WIB Diambang Luar Tanjung Kampeh Palembang -Sumatera Selatan	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang
7	11-13 Juli 2024	<b>HK.212/17/XII/MP.2024</b> Kecelakaan Kapal Tubrukan antara TK.Primajaya I yang ditarik TB Arwana 138 dengan Kilung / Bagan pada di Muara Sungai Musi Sungsang Palembang, Sumatera Selatan	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang
8.	tanggal 7 s.d 9 Oktober 2024	<b>HK.212/02/II/MP.2023</b> Kecelakaan Kapal Kandasnya TB Perkasa Wana -1 dan TK. Simindo No.04 Dan Tenggelamnya TB Perkasa Wana-1 di Perairan tanah Ampo Karangasem, Bali	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbay Bali

**Gambar 1.23**



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil Keputusan Mahkamah Tahun 2022 di KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya, pada tanggal 7 s.d. 9 Mei 2024

**Gambar 1.24**



Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil Keputusan Mahkamah Tahun 2022 di KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya, pada tanggal 7 s.d. 9 Mei 2024

**Gambar 1.25**



Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil Keputusan Mahkamah Tahun 2022 di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah, pada tanggal 19 s.d. 21 Juni 2024.

**Gambar 1.26**



Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil Keputusan Mahkamah Tahun 2023 di KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah, pada tanggal 19 s.d. 21 Juni 2024

**Gambar 1.27**



Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil Keputusan Mahkamah Tahun 2024 di KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya, pada tanggal 7 s.d. 9 Mei 2024

**Gambar 1.28**



Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil Keputusan Mahkamah Tahun 2022 di KSOP Kelas I Palembang Sumatra Selatan, pada tanggal 11 s.d. 13 Juli 2024

**Gambar 1.29**



Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut hasil Keputusan Mahkamah Tahun 2024 di KSOP Kelas IV Padangbay Bali, pada tanggal 7 s.d. 9 Oktober 2024

### **3. Fokus Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagaan Mahkamah Pelayaran Sebagai Peradilan Maritim Saat ini dan Masa Depan**

Penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan Mahkamah Pelayaran sebagai peradilan maritim saat ini dan masa depan serta sekaligus memperingati hari ulang tahun Mahkamah Pelayaran yang ke-86. Kegiatan ini di selenggarakan di ruang Aula Matraman Gedung Karya Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa, 28 Mei 2024, dengan mengambil tema “Peran Serta Mahkamah Pelayaran dalam mewujudkan *Zero Accident*”, dilaksanakan secara offline fisik dan virtual zoom meeting. Kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dibuka resmi oleh Bapak Menteri Budi Karya Sumadi yang dihadiri oleh ± 227 ( dua ratus dua puluh tujuh) orang peserta yang terdiri dari Petugas Pemeriksa Kecelakaan Kapal, para Syahbandar dari KSOP dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) di wilayah Bagian Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Barat dengan mengundang antara lain: Para pimpinan Asosiasi Direktur PT. Pelni, Direktur DPC INSA, Kepala Dinas Perhubungan, KSU/KSOP/KUPP, Direktur Pelindo Regional II, Direktur KPLP, Direktur Ditlala, Direktur PT. ASDP Indonesia, Kepala BPTD Wilayah III Provinsi, Ditkapel dan Dithubla. Acara di mulai dengan peluncuran aplikasi Sistem Administrasi Persidangan (SIAP) dan penyerahan Mahkamah Pelayaran Award, *launching* Mars Mahkamah Pelayaran guna meningkatkan jiwa korsa seluruh jajaran

Mahkamah Pelayaran hingga *Forum Group Discussion* dengan sejumlah Narasumber membahas isu Kemaritiman. Dalam Sambutannya Bapak Menteri Perhubungan mengingatkan agar Mahkamah Pelayaran konsisten menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum Maritim di Indonesia dan upaya penegakan hukum bukan mempersulit dunia usaha pelayaran. Ketua Mahkamah Pelayaran dalam arahannya juga menegaskan, dalam rangka menjawab tantangan yang semakin kompleks Indonesia harus membentuk peradilan khusus maritim yang akan menangani segala aspek peradilan, mulai dari aspek peradilan pidana, perdata maupun aspek peradilan etika, sebab Mahkamah Pelayaran sejauh ini hanya di beri kewenangan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dengan menegakan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan atau Perwira kapal, di harapkan dengan adanya FGD ini Mahkamah Pelayaran menjadi peradilan khusus maritim, yang bakal menangani persoalan sengketa pidana, perdata dan ketenaga kerjaan, serta kode etik profesi pelaut. Konsep yang diharapkan dengan adanya peradilan khusus maritim, dimana kompetensinya betul-betul mengerti dan memahami hukum maritim, perkapalan, struktur kapal, operasional serta akan menangani semua aspek peradilan dalam satu kesatuan, sehingga kelak Mahkamah Pelayaran bisa menjadi poros maritim dunia.

**Gambar 1.30**





Kegiatan *Fokus Group Discussion* Penguatan Kelembagaan Mahkamah Pelayaran Sebagai Peradilan Maritim Saat ini dan Masa Depan, diselenggarakan Selasa, 28 Mei 2024, bertempat di Ruang Mataram Gdg. Kementerian Perhubungan

**Gambar 1.31**





Kegiatan *Fokus Group Discussion* Penguatan Kelembagaan Mahkamah Pelayaran Sebagai Peradilan Maritim Saat ini dan Masa Depan, yang diselenggarakan pada Selasa, 28 Mei 2024, bertempat di Ruang Mataram Gdg. Kementerian Perhubungan

**Gambar 1.32**





Kegiatan *Fokus Group Discussion* Penguatan Kelembagaan Mahkamah Pelayaran Sebagai Peradilan Maritim Saat ini dan Masa Depan, yang diselenggarakan pada Selasa, 28 Mei 2024, bertempat di Ruang Mataram Gdg. Kementerian Perhubungan

**PERJANJIAN KINERJA  
KETUA MAHKAMAH PELAYARAN  
TAHUN 2024**



**MAHKAMAH PELAYARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Mahkamah Pelayaran berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini diharapkan agar para pemimpin mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalankan tugas.

Jakarta, 3 Januari 2024

Ketua Mahkamah Pelayaran



BAITUL IHWAN, S.H., DESS., CGCAE.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UNIT ESELON II**  
**SATUAN KERJA MAHKAMAH PELAYARAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAITUL IHWAN  
Jabatan : Ketua Mahkamah Pelayaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOVIE RIYANTO R  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

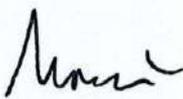
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,  
Ketua Mahkamah Pelayaran

  
NOVIE RIYANTO R





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
MAHKAMAH PELAYARAN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK 1	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IKK 1.1	Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75
		IKK 1.2	Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
SK 2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	IKK 2.1	Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Indeks	3,04
		IKK 2.2	Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 2.3	Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100
SK 3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	IKK 3.1	Penyusunan Regulasi Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1
SK 4	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	IKK 4.1	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, Laptah dan RKA K/L, Data Statistik Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 4.2	Pengelolaan Keuangan Mahkamah Pelayaran	%	100

		IKK 4.3	Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100
		IKK 4.4	Data Statistik Kecelakaan Kapal	%	100
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 5.1	Kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis / seminar / workshop / Focus Group Discussion (FGD)	%	100
		IKK 5.2	Pengelolaan Kearsipan dan Surat Masuk serta Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	%	85
		IKK 5.3	Pengembangan Kompetensi SDM dan Peningkatan Manajemen SDM Pegawai Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 5.4	Pembinaan Pegawai	%	100
		IKK 5.5	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100

**Kegiatan**

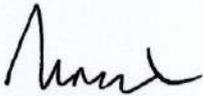
1. Legislasi dan Litigasi
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM
3. Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
5. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum

**Anggaran**

Rp. 120.000.000  
Rp. 1.148.980.000  
Rp. 2.816.803.000  
Rp. 324.120.000  
Rp. 16.388.451.000

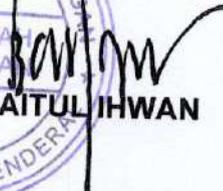
**Disetujui,**

**SEKRETARIS JENDERAL**

  
**NOVIE RIYANTO R**

**Jakarta, 3 Januari 2024**

**KETUA MAHKAMAH PELAYARAN**

  
  
**BAITUL IHWAN**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
KETUA MAHKAMAH PELAYARAN  
TAHUN 2024**



**MAHKAMAH PELAYARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran dapat terselesaikan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Mahkamah Pelayaran berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini diharapkan agar para pemimpin mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalankan tugas.

Jakarta, 20 Desember 2024

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN

  
BAITUL IHWAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UNIT ESELON II**  
**SATUAN KERJA MAHKAMAH PELAYARAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAITUL IHWAN.  
Jabatan : Ketua Mahkamah Pelayaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOVIE RIYANTO R.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,  
Ketua Mahkamah Pelayaran

  
NOVIE RIYANTO R.

  
  
BAITUL IHWAN.



Kegiatan	Anggaran
1. Legislasi dan Litigasi	Rp. 120.000.000 ;
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp. 1.148.980.000 ;
3. Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	Rp. 2.816.803.000;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 324.120.000;
5. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp. 17.762.136.000;
Total	Rp. 22.172.039.000;

Jakarta, 20 Desember 2024

SEKRETARIS JENDERAL

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN

NOVIE RIYANTO R.



BAITUL IHWAN.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**MAHKAMAH PELAYARAN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SK 1	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IKK 1.1	Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75
		IKK 1.2	Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
SK 2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	IKK 2.1	Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Indeks	3,04
		IKK 2.2	Pengelolaan TIK dan Aplikasi SIAP Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 2.3	Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100
SK 3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	IKK 3.1	Penyusunan Regulasi Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1
SK 4	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	IKK 4.1	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, Laptah dan RKA K/L, Data Statistik Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 4.2	Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100

		IKK 4.3	Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100
		IKK 4.4	Data Statistik Kecelakaan Kapal	%	100
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 5.1	Kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis / seminar / workshop / Focus Group Discussion (FGD)	%	100
		IKK 5.2	Pengelolaan Kearsipan dan Surat Masuk serta Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	%	85
		IKK 5.3	Pengembangan Kompetensi SDM dan Peningkatan Manajemen SDM Pegawai Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 5.4	Pembinaan Pegawai	%	100
		IKK 5.5	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100

Jakarta, 20 Desember 2024

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN


  
 BAITUL IHWAN

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
MAHKAMAH PELAYARAN  
TAHUN 2024**



**MAHKAMAH PELAYARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



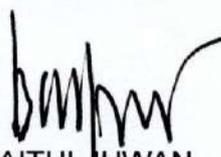
**RENCANA KERJA TAHUNAN  
MAHKAMAH PELAYARAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 1	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IKK 1.1	Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	75
		IKK 1.2	Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
SK 2	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	IKK 2.1	Indeks Maturitas SPIP Mahkamah Pelayaran	Indeks	3,04
		IKK 2.2	Pengelolaan TIK dan Aplikasi SIAP Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 2.3	Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100
SK 3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum di Mahkamah Pelayaran	IKK 3.1	Penyusunan Regulasi Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1
SK 4	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	IKK 4.1	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, Laptah dan RKA K/L, Data Statistik Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 4.2	Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 4.3	Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
		IKK 4.4	Data Statistik Kecelakaan Kapal	%	100
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK 5.1	Kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis / seminar / <i>workshop</i> / <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	%	100
		IKK 5.2	Pengelolaan Kearsipan dan Surat Masuk serta Surat Keluar Sesuai Sistem Administrasi Perkantoran (SAP)	%	85
		IKK 5.3	Pengembangan Kompetensi SDM dan Peningkatan Manajemen SDM Pegawai Mahkamah Pelayaran	%	100
		IKK 5.4	Pembinaan Pegawai	%	100
		IKK 5.5	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	%	100

Jakarta, Januari 2024

Ketua Mahkamah Pelayaran

  
BAITUL HWAN

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Mahkamah Pelayaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Realisasi Tahun 2024 (Rp dalam juta)												Anggaran	Penan ggun Jawab	
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
SK1	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	IK1 Tingkat pemanfaatan rekomendasi sidang Mahkamah Pelayaran	%	75	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut Hasil Putusan Mahkamah Pelayaran	0	0	0	0	2.920	82.000	64.400	0.	0	20.236	383.000	10.900.000	150.000.000		
		IK2 Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Mahkamah Pelayaran	0	0	615,386,579;	141.103.500	161.103.500	166.810.000.	158.885.000	0	0	0	0	0	0	1.202.479.000	
SK2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	IK3 Indeks Maturitas SPiP Mahkamah Pelayaran	Indeks	3.04	Penyusunan Laporan SPiP Mahkamah Pelayaran	0	0	9,150,800;	0	0	5,959,242	0	0	20,651,256	0	0	17,970,000	55.000.000		
		IK4 Pengelolaan TIK Mahkamah Pelayaran	%	100	Pengelolaan Berita Website Mahkamah Pelayaran	0	0	1,593,000;	0	0	0	45,700	0	0	0	0	0	1,721,000	79.267.000	
		IK5 Dukungan Manajemen Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan	%	100	Dukungan Manajemen Reformasi Mahkamah Pelayaran	0	0	0	0	18,721,500	22,784,000	0	0	0	0	0	0	0	43.370.000	Kuasa Pengg una Angga ran (KPA)
SK3	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum Mahkamah Pelayaran	IK6 Penyusunan Regulasi Bidang Transportasi Berbasis Pelayaran	Peraturan	1	Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan Mahkamah Pelayaran	0	0	0	0	5,320	0	0	0	0	0	0	12,326,000	52.858.000		
SK4	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	IK7 Penyusunan Dokumen LAKIP, Renstra, PK, Lajalah dan RKAKL, Data Statistik Mahkamah Pelayaran	%	100	Penyusunan PK Penyusunan LAKIP	0	0	7,791,187;	0	5,260,000	0	57,514,800	0	29,338,750	0	200	2,677,000	105.400.000		



